

PROCEEDINGS EHPA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN INSTITUSIONAL

Bandung, 14-18 September 2006

IB



ektorat
ayaan



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ARKEOLOGI NASIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JAKARTA 2007**

Copyright
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
2007

ISBN: 978-979-8041-44-0

Alamat (*Address*)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
Jalan Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12510 - Indonesia
Telp. +62 21 7988171 / 7988131
Fax. +62 21 7988187
Homepage: www.indoarchaeology.com
E-mail: arken3@arken.com
atik_arken@yahoo.com

Produksi dan Distribusi (*Production and Distribution*)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
(*The National Research and Development Centre of Archaeology*)

306.FUS P

PROCEEDINGS EHPA

**KEBIJAKAN
DAN STRATEGI
PENGELOLAAN INSTITUSIONAL**

Bandung, 14-18 Juni 2006



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata**

Jakarta 2007

Penanggung Jawab (*Responsible Person*)
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
(*Director of National Research and Development Centre of Archaeology*)

Dewan Redaksi (*Board of Editors*)
Ketua merangkap anggota (*Chairperson and member*)
Dr. Truman Simanjuntak, APU (Arkeologi Prasejarah)

Sekretaris (*Secretary and Member*)
Dra. Dwi Yani Yuniawati, M.Hum. (Arkeologi Prasejarah)

Anggota (*Members*)
Dr. Haris Sukendar, APU (Arkeologi Prasejarah)
Dra. Naniek Harkantiningasih, APU (Arkeologi Sejarah)
Dr. Endang Sri Hardiati (Arkeologi Sejarah)
Drs. Sonny Wibisono, MA, DEA. (Arkeologi Sejarah)

Penyunting Bahasa Inggris (*English Editors*)
Dr. P.E.J. Ferdinandus
Dra. Aliza Diniasti

Redaksi Pendamping (*Associate Editors*)
Dra. Fadhila A.A., M.Hum.
Dra. Titi Surti Nastiti, M.Hum.
Drs. Bambang Budi Utomo
Agustijanto Indrajaya, S.S.
Drs. Mujib

Redaksi Pelaksana (*Managing Editors*)
Dra. Sukowati Susetyo
Murnia Dewi
Tohari Achmad

Daftar Isi

- * Penanganan BCB Di Era Otda
Oleh: Repelita Wahyu Oetomo -- 1
- * Profil Dan Strategi Pengembangan Balai Arkeologi Jayapura
Oleh: Sihotang -- 7
- * Profil Dan Strategi Pengembangan Dalam Penelitian Arkeologi
Oleh: Siswanto -- 14
- * Profil Strategi Pengembangan Arkeologi Balai Arkeologi Bandung
Oleh: Sudarti Prijono -- 26
- * Pengembangan Dan Pemanfaatan Penelitian Ikonografi Di Bali
Oleh: A.A. Gde Bagus -- 43
- * Refleksi Hasil Penelitian Arkeologi Islam Di Kalimantan Sampai Tahun 2005
Oleh: Bambang Sakti W.A. -- 54
- * Masalah Penelitian Etnoarkeologi Gua-gua Penguburan Tradisional Di Kalimantan
Oleh: Bambang Sugiyanto -- 70
- * Evaluasi Dan Pengembangan Program Tematik Di Balai Arkeologi Yogyakarta
Oleh: Baskoro Daru Tjahjono -- 85

- * **Studi Arkeolinguistik Sebagai Upaya Pengungkapan Proses Migrasi Puak-puak Di Wilayah Kerja Balai Arkeologi MedanKasus Persebaran Puak-puak Batak di Padang Lawas, Tapanuli Selatan**
Oleh: Ery Soedewo -- 95

- * **Penerapan Penelitian Perkotaan dalam Arkeologi: Prospek dan Pengembangannya**
Oleh: Eka Asih Putrina Taim,.M.Si -- 121

Penanganan BCB Di Era Otda

Repelita Wahyu Oetomo
Balai Arkeologi Medan

Abstrak

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yang ditetapkan dalam Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999, berdampak juga terhadap penanganan benda-benda cagar budaya. Di beberapa tempat semangat otonomi disambut dengan antusias tetapi di daerah lain karena pertimbangan lain semangat otonomi daerah disalah-tafsirkan dengan jalan meraup pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya mengabaikan kepentingan-kepentingan lain. Di era otonomi daerah ini tampaknya kepentingan untuk melestarikan benda-benda cagar budaya menghadapi masalah serius. Penghancuran/perusakan terhadap tinggalan-tinggalan budaya makin marak dilakukan karena pertimbangan selain tidak menghasilkan PAD perawatan terhadap benda-benda cagar budaya justru malah menghabiskan anggaran. Di lain pihak, antusias dari pihak Pemerintah Daerah/Kota terhadap penanganan benda-benda cagar budaya tidak berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten sehingga pemanfaatannya adakalanya juga mengancam kelestarian benda cagar budaya. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah ini, karena apabila dibiarkan berlarut-larut sangat mungkin, tinggalan-tinggalan budaya akan semakin terkikis.

Seperti telah diamanatkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, bahwa yang dimaksud Benda Cagar Budaya adalah

Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah banyak menimbulkan berbagai konflik kepentingan, terutama antara kepentingan pusat dan daerah. Arus pembangunan yang tak terelakkan seharusnya juga diimbangi dengan usaha-usaha pelestarian tinggalan-tinggalan bersejarah yang telah menjadi penanda ruang selama ratusan tahun. Pembangunan kota yang terlalu bergairah tampaknya terlalu tergesa-gesa untuk meraup keuntungan sehingga banyak mengabaikan aspek lingkungan, dan berbagai aspek sosial budaya masyarakat. Penghancuran bangunan-bangunan tua merupakan contoh ketergesaan suatu kota meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam beberapa tahun terakhir tak terhitung lagi berapa jumlah bangunan tua yang telah dirobohkan.

Beberapa contoh kasus di Medan; telah banyak bangunan tua yang telah dihancurkan, diantaranya adalah eks Kantor Bupati Deli Serdang di Jalan Brigjen Katamso, Gedung South East Asia Bank di jalan Ahmad Yani, eks Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Jalan Listrik, Balai Kerapatan Adat Kesultanan Deli di Jalan Brigjen Katamso, serta puluhan rumah adat melayu di Kompleks Perum Kereta Api. Selain itu di Jalan Sukamulia, eks Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara juga telah rata dengan tanah, demikian juga dengan dua bangunan yang merupakan perpaduan arsitektur Eropa dan tropis yaitu Gedung Mega Eltra juga telah diratakan. Masalah yang masih hangat adalah penghancuran bangunan eks Bank Modern di Kesawan, Jalan Ahmad Yani. Bangunan ini bercorak *art deco* berusia sekitar 75 tahun dan pernah

menjadi Kantor Perwakilan *Stork*, perusahaan Belanda yang memproduksi dan menjual mesin-mesin perkebunan.

Dengan mudah pemerintah daerah memberikan ijin pembongkaran bangunan tua tersebut. Kepala dinas Tata kota Medan yang dihubungi *Harian Kompas* pada tahun 2004 menyebutkan bahwa pihaknya kesulitan mempertahankan seluruh bangunan tua di Medan. Tidak semua bangunan tua di Medan harus utuh tambahnya, mengingat bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sehingga pemiliknya merasa keberatan untuk mempertahankannya. Sebanyak 42 bangunan telah dilindungi oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelestarian Bangunan dan lingkungan yang Bernilai Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan serta penghijauan dalam daerah Kota Medan. Tetepi bangunan-bangunan lainnya belum dimasukkan dalam perda tersebut sehingga dapat diubah sesuai kebutuhan. Tetapi berdasarkan kenyataan di lapangan 2 bangunan yang telah di perdakan saat ini juga telah dihancurkan, yaitu Kantor Bupati Deli Serdang dan Bank South East di Jalan Pemuda. Disebutkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 1988, pelaku perusakan/pelanggaran terhadap peraturan ini hanya dikenakan denda sebanyak Rp. 50.000 atau kurungan selamalamanya 3 bulan.

Dengan disyahrkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah, secara substansional Pembangunan Daerah dengan prinsip otonomi daerah, memberikan peran yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. Otonomi memandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Daerah diberikan kewenangan yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut memunculkan pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat secara hirarkis menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Musnahnya bangunan tua bukan semata-mata karena keterbatasan pengelolaan kota secara administratif tetapi karena ada perbedaan aspirasi/persepsi dan kepedulian masyarakat akan hakikat pelestarian bangunan tua. Orientasi yang kaku terhadap tuntutan ekonomi tidak hanya menyebabkan dis-orientasi pembangunan fisik tetapi juga penolakan terhadap konsep dan produk seni bangunan yang telah dibina.

Secara teoritis penyusunan perundang-undangan sudah sedemikian baik, tetapi dalam pelaksanaannya pada beberapa kesempatan adakalanya masih menyimpang dari ketentuan yang disepakati, yang berdampak pada dikorbankannya kepentingan lain. Beberapa contoh adalah dalam penanganan BCB (Benda Cagar Budaya). Untuk masalah tersebut sering terjadi perbedaan kepentingan mengenai penanganan maupun pemanfaatannya yang berakibat dikorbankannya benda cagar budaya tersebut. BCB adalah aset negara yang merupakan warisan leluhur tentang informasi masa lalu berisi pesan bijak mengenai pengalaman sejarah masa lalu, untuk dijadikan pelajaran di masa kini dan masa yang akan datang, untuk itu perlu dijaga kelestariannya. Kepedulian pemerintah adalah dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya, yang intinya mengamanatkan keharusan pemerintah untuk melestarikan benda cagar budaya.

Perencanaan pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri secara sektoral, segala perencanaan dan pemanfaatan harus melalui penanganan terpadu antar institusi dan masyarakat. Pusat sebagai *leading sector*, sementara institusi daerah dan masyarakat sebagai

pendukung. Adakalanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah membawa dilema, karena kurangnya koordinasi pemda dengan otoritas yang berwenang dibidang kepurbakalaan. Pembangunan yang dilakukan di daerah menyalahi aturan-aturan dalam perundang-undangan, hal ini adalah karena pemerintah daerah tidak memahami aturan-aturan teknis mengenai data ilmiah. Langkah-langkah yang ditempuh seharusnya melibatkan otoritas bidang arkeologi. Kepala daerah di era otonomi ini adakalanya menganggap dirinya sebagai raja kecil yang mengcreate gagasannya sendiri dengan mengabaikan intervensi otoritas lain yang seharusnya dilakukan secara *integrated* dengan melibatkan pemegang otoritas bidang keilmuan yang bersangkutan. Antara pihak pemda dan arkeolog seharusnya duduk bersama membahas permasalahan yang ada sesuai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota punya kekuasaan mengembangkan daerahnya termasuk dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah, namun pada konteks tertentu kekuasaan itu harus tetap patuh pada aturan hukum yang telah berlaku sebelumnya. Sebelum UU No. 22/1999 lahir telah ada aturan-aturan yang mengatur boleh-tidaknya sebuah kawasan diotak-atik. Peraturan yang dimaksud adalah UU No. 5 Tahun 1992. Undang-undang tersebut disertai juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang cara pengembangan dan pelestarian BCB.

Jika areal purbakala dikembangkan, prosedurnya tidak cukup hanya pada pemerintah lokal saja, harus ada proposal yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui menteri terkait dan harus disertai masukan dan pertimbangan para ahli, bila perlu harus ada AMDAL. Perlu sosialisasi agar pejabat di daerah ikut melestarikan aset-aset yang menjadi kebanggaan, jangan sampai karena orientasi PAD kawasan /BCB dirusak/diabaikan. Perlu sosialisasi agar para pejabat di daerah ikut melestarikan aset-aset yang menjadi kebanggaan daerah, jangan sampai karena orientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

kawasan cagar budaya, situs purbakalan dan sebagainya yang terlarang untuk dibangun menjadi rusak. BCB merupakan warisan yang tidak dapat diperbaharui, perubahan/perusakan BCB berakibat pada hilangnya data masa lampau yang tidak dapat diulang.***

Profil Dan Strategi Pengembangan Balai Arkeologi Jayapura

Sihotang (Ka. Balar Jayapura)

Abstrak

Balai Arkeologi merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memegang peranan penting dalam upaya pengembangan kegiatan arkeologi di daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Arkeologi sudah seharusnya ditunjang oleh SDM serta Sarana dan Prasarana yang memadai.

Namun demikian hingga saat ini Balai Arkeologi Jayapura belum mencapai standar minimal ketenagaan, baik secara kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan oleh suatu lembaga penelitian.

Hingga kini di Balai Arkeologi Jayapura belum memiliki tenaga peneliti sebagai penggerak utama dalam melaksanakan tugas pokoknya, sehingga dalam pelaksanaan penelitian sebagai program kerja utamanya, Balar Jayapura masih mendatangkan tenaga peneliti dari pusat (Puslitbang Arkenas) untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian arkeologi di wilayah kerjanya.

Jika dilihat dari luas wilayah kerjanya, maka sudah saatnya bagi Balar Jayapura untuk meningkatkan SDM yang ada dengan pengadaan SDM khususnya dalam bidang penelitian (tenaga peneliti) sehingga kegiatan penelitian arkeologi dapat dilakukan seoptimal

mungkain dan dapat menjangkau wilayah yang belum tersentuh dengan penelitian arkeologi sebelumnya, sebagai strategi dalam pengembangan penelitian di wilayah kerjanya, yang nantinya hasil penelitian arkeologi yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sebagai akutabilitas Balar sebagai lembaga penelitian, dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan arkeologi di Indonesia.

A. Pendahuluan

Balai Penelitian Arkeologi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, memiliki nilai strategis dalam pengembangan arkeologi di daerah-daerah khususnya dan Indonesia umumnya. Keberadaan lembaga ini sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan juga untuk memperlancar arus informasi budaya dan mobilisasi kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam menangani masalah-masalah arkeologi di wilayah kerjanya, dan keberadaannya dekat dengan sasaran penelitian, akan lebih efektif dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan nasional.

Balai Arkeologi Jayapura secara kelembagaan mulai operasional tahun 1995, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor. 015/0/1995 tanggal 10 Februari 1995. Tetapi dalam melaksanakan aktivitas perkantorannya, meminjam satu ruangan dari gedung Museum Negeri Provinsi Irian Jaya, di Waena Kabupaten Jayapura, karena belum memiliki gedung sendiri. Demikian juga halnya ketenagaan yang pada saat itu belum ada, sehingga untuk melaksanakan program/kegiatannya dengan menunjuk tenaga perbantuan dari Kanwil Depdikbud Provinsi Irian Jaya, yang terdiri dari 2 orang sebagai tenaga pelaksana yaitu 1 orang dari Bagian Keuangan sebagai bendaharawan rutin dan satu orang dari staf Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalan (SK Kakanwil Depdikbud Provinsi Irian Jaya), serta 1 orang lagi dari

2. Profil dan Strategi Pengembangan

Museum Negeri Provinsi Irian Jaya sebagai Pejabat sementara (kepala Balai Arkeologi Jayapura).

Pada tahun 1997 tenaga/ pegawai Balai arkeologi Jayapura bertambah menjadi 6 orang yaitu 1 orang sebagai Kepala Balai Arkeologi Jayapura yang deventif, dan 5 orang sebagai staf (pelaksana), dan pada tahun 1999 Balar Jayapura mendapat tambahan pegawai 3 orang dari pusat yang diharapkan sebagai tenaga peneliti tetapi pada tahun 2000 tambahan pegawai tersebut beralih tugas keluar Provinsi Papua.

Pada tahun 1999 Kepala Balai Arkeologi Jayapurapun alih tugas ke Balai Arkeologi Palembang, dan sebagai pejabat sementara dipengang oleh Kepala Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Jayapura hingga tahun 2002, dan baru pada tahun 2002 Kepala Balai Arkeologi Jayapura yang deventif diangkat dari Kanwil Depdikbud Provinsi Irian Jaya.

Hingga tahun 2006 keadaan tenaga di Balai Arkeologi seluruhnya berjumlah 22 orang yang terdiri dari 1 Orang kepala, 1 Orang Kasubbag Tata Usaha, 7 Orang Staf yang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 Orang Staf Yang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 7 Orang tenaga honorer yang terdiri dari orang tenaga kepurbakalaan, 3 orang tenaga administrasi, 1 orang tenaga teknis dan 2 orang untuk satuan pengamanan/satpam), sedangkan tenaga peneliti yang deventif hingga saat ini belum tersedia.

Profil Balai Arkeologi Jayapura

Secara komprehensif Profil Balai Arkeologi Jayapura adalah sebagai berikut:

VISI: Terwujudnya Balai Arkeologi Jayapura sebagai Institusi/ Lembaga penelitian kepurbakalaan yang handal, yang dapat mengembangkan, dan memasyarakatkan peninggalan kepurbakalaan untuk kemajuan ilmu pengetahuan,

mencerdaskan masyarakat, serta menunjang program kegiatan kepariwisataan.

MISI:

1. Melaksanakan Penelitian Kesejarahan dan kepariwisataan
2. Mendistribusikan dan menyebarkan informasi kepariwisataan
3. Mengembangkan Kepegawaian
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai
5. Melakukan pembinaan administrasi umum perkantoran
6. Memenuhi peralatan laboratorium penelitian
7. Melaksanakan pembangunan gedung kantor
8. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
9. Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana

Program Tahun 2005 s/d 2009

Adapun program kerja Balai Arkeologi Jayapura adalah meliputi:

1. Penelitian ilmu pengetahuan terapan di-25 situs yang meliputi situs Prasejarah, Islam dan Kolonial
2. Evaluasi laporan hasil penelitian kepariwisataan di 25 situs dan menyusun 5 naskah laporan hasil evaluasi.
3. Dokumentasi data kepariwisataan dan visualisasi data kepariwisataan dalam bentuk VCD (3 keping)
4. Penyebaran informasi kepariwisataan
 - * Pameran kepariwisataan 2 kali
 - * Penyuluhan/ sosialisasi kepariwisataan di 3 daerah/ kabupaten
 - * Seminar/ sarasehan/ diskusi kepariwisataan, dengan instansi pemerintahan yang relevan/ LSM sebanyak 2 kali
 - * Penerbitan naskah laporan/ majalah/ jurnal sebanyak 500 exemplar

2. Profil dan Strategi Pengembangan

5. Pengadaan buku perpustakaan yang berkaitan dengan referensi bahan penelitian keurbakalaan seperti, pengadaan buku-buku Arkeologi, Antropologi, Sejarah, Geologi, Kamus dll.
6. Koordinasi antar instansi pemerintahan yang terkait dalam penanggulangan kasus di daerah yang berkaitan dengan situs atau BCB yang ada di daerah sebanyak 10 kali
7. Pengembangan kepegawaian
 - a. Usulan formasi pengadaan pegawai sebanyak 30 orang
 - b. Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan/latihan
 - *Peningkatan kualitas SDM Pegawai
 - *Pengusulan pejabat fungsional
8. Administrasi Umum
 - a. Pembayaran gaji dan lembur pegawai (PNS dan CPNS)
 - b. Pembayaran honor tenaga Honorer
 - c. Pembayaran kebutuhan kantor sehari-hari ATK dan kebutuhan Rumah tangga lainnya
 - d. Pengadaan pakaian seragam dinas pegawai dan tenaga honorer
 - e. Perjalanan Dinas pejabat/ pegawai kepusat untuk mengikuti rapat pimpinan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pusat dan daerah, konsultasi dll
9. Pembangunan gedung kantor,
Melanjutkan pembangunan gedung kantor dengan luas 396 m², pembangunan Pos Satpam 4m² dan pembangunan mes penelitian 72 m²
10. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung kantor, penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung, pembuatan talud 201 m² dan penataan taman dan halaman 600m²
11. Pengadaan inventaris kantor,
 - a. Pengadaan peralatan kantor 10 unit
 - b. Pengadaan peralatan penelitian/ laboratorium 10 unit

12. Pemeliharaan dan perawatan

- a. Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor 5 kali
- b. Pemeliharaan dan perawatan lingkungan seperti pagar taman/ halaman 5 kali
- c. Pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor 20 unit
- d. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional kantor 2 unit
- e. Pemeliharaan dan perawatan lain-lain seperti, instalasi listrik, telepon dan air 5 kali.

Strategi Pengembangan

Sejak berdirinya Balai Arkeologi Jayapura hingga saat ini, menghadapi masalah yang berkaitan dengan keberadaan tenaga fungsional, sehingga dalam proses perkembangan ketenagaan belum mencapai standar minimal yang dibutuhkan sebagai suatu Instansi yang bergerak di bidang penelitian, yaitu ketidaktersediaannya SDM dibidang penelitian (tenaga peneliti).

Jika dilihat dari luasnya wilayah kerja Balai Arkeologi Jayapura yang meliputi dua provinsi yaitu Papua dan Irian Jaya Barat (IJB) dan juga program kerjanya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka hal tersebut telah mendorong Balai Arkeologi Jayapura untuk segerah memenuhi standar minimal ketenagaan sebagai suatu lembaga penelitian.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Balas Jayapura untuk mengatasi masalah ketenagaan yang dihadapinya dan juga dalam pelaksanaan program kerjanya dalam bidang penelitian arkeologi yaitu dengan cara membuka lowongan honorer bagi tenaga peneliti (baik tenaga arkeologi maupun tenaga antropologi) untuk membantu kelancaran kegiatan penelitian arkeologi, dan disamping itu juga Balai Arkeologi Jayapura melibatkan Puslitbang Arkenas dalam membantu pelaksanaan kegiatan penelitian arkeologi di

2. Profil dan Strategi Pengembangan

wilayah kerjanya, sehingga program kerja Balai Arkeologi Jayapura dapat terlaksana dengan baik.***

Profil Dan Strategi Pengembangan Dalam Penelitian Arkeologi

Siswanto (Balai Arkeologi Yogyakarta)

Ringkasan

Keberhasilan organisasi akan sangat tergantung pada kemampuan dalam mengantisipasi dan melibatkan diri dalam perubahan. Oleh karena itu agar tetap eksis dan mampu menghadapi perubahan maka organisasi perlu landasan pandangan ke depan yang lebih baik (ideal image) dari kondisi sekarang, memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dan kebanggaan bagi organisasi dan personilnya. Bentuk pandangan ke depan yang disebut visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi dapat dianggap sebagai petunjuk bagi organisasi yang ingin memahami maksud dan tujuan organisasi karena sewaktu-waktu organisasi mungkin berubah baik sebagian maupun keseluruhan, untuk itu visi pun dapat berubah (revisioning). Visi dijabarkan ke dalam bentuk misi-misinya, lalu misi-misi tersebut dilaksanakan melalui aksi dan strategi.

I. Pendahuluan

Lembaga penelitian yang bertujuan untuk mewujudkan arah penelitian dan pengembangan arkeologi yang terdepan maka dalam melaksanakan manajemen perlu secara dinamis dan profesional.

3. Profil dan Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan secara umum diperlukan perangkat manajemen strategis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi yang dilakukan secara dinamis dan profesional. Pengembangan dalam penelitian arkeologi walaupun sesuatu yang baru dalam istilah namun telah lama dalam berkiprah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengembangan merupakan kata kerja yang berarti sebuah proses, cara, atau perbuatan mengembangkan atau membuka lebar-lebar agar menjadi lebih besar, lebih luas, lebih baik, lebih merata, lebih sempurna dan lainnya. Demikian pula kata “pengembangan” dalam arti khusus yang sering bersama dengan kata “penelitian” merupakan bentuk perbuatan untuk memperluas, membuka lebar-lebar, menyempurnakan agar lebih baik dari sebelumnya “sehubungan” dengan bentuk aktivitas penelitian. Ada dua pengertian pengembangan, apakah pengembangan substansi penelitian apa pengembangan kelembagaan?. Pengembangan kelembagaan perlu dilakukan seperti revisi, manajemen strategis, pengembangan sumberdaya manusia diimbangi dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang, peka situasi dan perubahan, peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait atau *stakeholders*, dan seluruh elemen pengembangan berorientasi pada hasil (*output*).

Pengembangan bidang penelitian lebih di fokuskan kepada upaya membuka diri dari “eksklusivisme” penelitian dengan cara lebih memahami akan kebutuhan masyarakat dalam kerangka mencerdaskan masyarakat. Akan tetapi tetap konsisten dan fokus tidak mengurangi nilai-nilai akademik penelitian itu sendiri sebagai bagian dari kiprah dunia ilmu pengetahuan. Demikian pula keahlian atau profesionalisme harus menjadi tujuan tetapi tidak berarti menjadikan kotak-kotak yang dapat menimbulkan sikap eksklusif profesi itu sendiri.

Kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dapat diartikan sebagai upaya penelusuran dan pengelolaan berbagai

aspek yang berkaitan dengan peninggalan budaya. Hasilnya ditujukan untuk melengkapi data/informasi koleksi, dan aspek lainnya, sehingga memudahkan dalam menunjang pengembangan pengetahuan tentang kebudayaan pada umumnya, dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

II. Strategi Pengembangan

Penelitian harus menjadi fokus dalam kegiatan lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologinya. Adapun pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan, menambah lebih baik, lebih luas, dan lebih sempurna “penelitian”nya. Karena pengembangan adalah sebuah proses maka untuk mewujudkannya perlu perangkat yang strategis antara lain merancang dan menjalankan visi dan misi-misinya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah dicanangkan, maka strategi yang akan ditempuh dikelompokkan ke dalam bidang-bidang penelitian dan pengembangan yang ditunjang oleh sistem manajerial antara lain sumberdaya manusia, sarana/prasarana, serta kerjasama, dan lainnya, oleh karena itu strategi pengembangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan penelitian dalam rangkaian pengelolaan sumberdaya arkeologi merupakan kegiatan hulu, yaitu kegiatan yang diselenggarakan pada tahap awal yang diharapkan hasilnya dapat dijadikan bahan masukan, bahan penyusunan kebijakan, serta bahan pertimbangan atau acuan untuk kegiatan hilirnya. Adapun kegiatan hilir berupa pengelolaan sumberdaya arkeologi adalah berupa pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan. Oleh karena itu penelitian arkeologi secara ideologis mengemban kepentingan akademis juga harus dapat mengemban kepentingan yang bersifat *strategis*. Sejalan

3. Profil dan Strategi Pengembangan

dengan kecenderungan pembangunan yang berwawasan budaya dan pengelolaan sumberdaya arkeologi dilandasi prinsip *peddle or perish* (menjajakan atau binasa) yang berarti pelestarian dapat berjalan optimal bila sumberdaya arkeologi tersebut memiliki “makna” yang signifikan bagi masyarakat.

Sebagai tugas pokok dan fungsi Balai Arkeologi adalah melakukan penelitian arkeologi dan memasyarakatkan hasil-hasilnya. Demikian pula hasil penelitian Balai Arkeologi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan penentuan kebijakan pembangunan di daerah. Informasi arkeologi yang diperoleh khususnya mengenai sejarah kebudayaan dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun kebanggaan atau jatidiri daerah. Bahkan beberapa sumberdaya arkeologi di daerah yang memang berpotensi, dapat dikembangkan untuk kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat.

Penyusunan rencana strategis merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan manajemen penelitian dan pengembangan bidang arkeologi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, khususnya yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan dengan maksud untuk:

- Menyediakan arahan bagi pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan dan
- Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahun, sebagai bagian dari akuntabilitas publik sekaligus sebagai perintis jalan menuju *good governance*.

2. Peka Situasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP. Nomor 25 tahun 2000 dimana implementasinya masing-masing daerah berusaha menggali pemasukan atau pendapatan (PAD) sebanyak mungkin. Karena

dengan diterapkannya Otonomi Daerah, setiap Pemerintah Daerah (Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota) dituntut mandiri dalam memenuhi kebutuhan layanan kepada masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Keadaan ini mendorong terjadinya upaya penggalian potensi segala sumberdaya yang dimiliki untuk kemakmuran, kemajuan dan kesejahteraan daerah. Pada beberapa contoh keinginan daerah untuk menggali pendapatan melalui sektor kebudayaan banyak terjadi yaitu dengan pemberdayaan aset-aset sumberdaya arkeologi dalam bentuk pemanfaatan.

Di lain pihak euforia tentang pengelolaan sumberdaya arkeologi di daerah yang terkadang berlebihan. Di sisi lain dengan berdalih pembangunan di daerah harus maju maka sumberdaya arkeologi dipandang sebelah mata dan menjadi kurang atau bahkan tidak penting. Secara nasional permasalahan bangsa tersebut di atas menjadi keprihatinan dan sekaligus menjadi tantangan Balai Arkeologi dalam kiprahnya ke depan. Terkait dengan kedudukan Balai Arkeologi yang berada di daerah, tentunya sudah sewajarnya bahwa Balai Arkeologi harus mampu berkiprah untuk lebih peka membantu dan menyumbang untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah melalui penelitian dan peranannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Strategi pengembangan di bidang penelitian arkeologi adalah perlu kepekaan terhadap situasi terutama situasi yang dihadapi oleh bangsa, Misalnya bencana alam. Bencana alam memang tidak terkait langsung pada tugas dari Balai Arkeologi tetapi bagaimana harus bersikap agar arkeologi mampu berkiprah terhadap momen tersebut?, Kepekaan situasi yaitu mengambil bagian yang berkaitan dengan substansi kajian arkeologi maupun berkaitan dengan benda (artefak) nya yang dapat diwujudkan melalui kajian-kajian ilmiah maupun dokumentasi yang diwujudkan dalam bentuk sajian-sajian informasi.

3. Kerjasama

Strategi pengembangan kurang tepat apabila tanpa adanya sikap membuka diri dan memperluas jaringan ditingkat kelembagaan. Melalui kerjasama atau kemitraan terkait maupun tidak terkait sangatlah penting karena ke depan melalui kekuatan jaringanlah lembaga tersebut eksis. Membuka jaringan yang sinergis baik dengan lembaga pemerintah, swasta, LSM, dan kelompok masyarakat *stakeholders* lainnya sangat diperlukan. Menurut Gunawan (2005) paradigma pengelolaan yang baik (*good governance*) merupakan sistem manajemen pemerintahan dengan ditandai adanya kerjasama antara aparatur pemerintahan, LSM, dan kalangan sipil yang memiliki kesadaran akan hak demokrasinya tanpa adanya sistem saling mendominasi.

Membuka diri untuk menjalin kerjasama tidak semuanya mudah karena belum semuanya memahami dan mengerti tugas pokok dan fungsi Balai Arkeologi, terutama pihak swasta, LSM bahkan masyarakat. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, strategi yang ditawarkan melalui pendekatan konvensional antara lain sikap jemput bola, sikap lempar bola, sikap giring bola dan tendang bola. Sikap jemput bola atau sikap proaktif yaitu mengedepankan peran sertanya yang berkaitan dengan sumberdaya arkeologi untuk dapat menjalin kerjasama. Sikap lempar bola artinya ide dan gagasan atau perencanaan ada pada kita, namun karena secara substansial tidak mampu dilaksanakan sendiri maka gagasan tersebut dilontarkan kepada *stakeholders* agar terjalin kerjasama. Kemudian sikap giring dan tendang bola dimaksudkan bahwa apabila ada "tawaran" yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka peluang kerjasama wajib diterima. Akan tetapi peluang dan usaha jalinan kerjasama dengan pihak lain tidak akan pernah terwujud apabila kita hanya bersikap sebagai "penonton bola".

4. Sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan kunci dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan lembaga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terutama teknologi informasi yang sangat pesat harus dapat memanfaatkan secara arif dan seimbang. Karena dari generasi ke generasi perkembangan iptek tersebut selalu dinamis maka penelitian arkeologi harus mampu memanfaatkan. Sisi positif dengan kemajuan iptek dalam penelitian arkeologi adalah mempermudah dan mempercepat perkembangan teknik penelitian hingga penyajian. Melalui iptek akan mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang hasil-hasil penelitian maupun informasi kebudayaan lainnya.

III. Pengembangan Kelembagaan

Keberhasilan organisasi/lembaga akan sangat tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam mengantisipasi dan melibatkan diri dalam perubahan. Oleh karena itu agar mampu menghadapi perubahan maka organisasi perlu landasan pandangan ke depan yang lebih baik (*ideal image*) dari kondisi sekarang, memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dan kebanggaan bagi organisasi dan personilnya. Bentuk pandangan ke depan yang disebut visi memainkan peran yang sangat menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi dapat dianggap sebagai petunjuk jalan bagi organisasi yang ingin memahami maksud dan tujuan organisasi karena sewaktu-waktu organisasi mungkin berubah baik sebagian maupun keseluruhan, untuk itu visi pun dapat berubah (*revisioning*).

Di sisi lain lembaga yang dinamis, proporsional, dan profesional adalah sebuah tawaran yang sangat mendasar agar lembaga tersebut mampu bersaing di masa sekarang dan akan datang.

Dinamis artinya mampu berbuat seimbang (*balance*) terhadap perkembangan paradigma-paradigma baru, perkembangan sosial kemasyarakatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahkan perkembangan politik. Kemudian mampu melakukan terobosan-terobosan dalam pembaharuan, bahkan mampu menciptakan strategi, model, maupun paradigma-paradigma baru. Proporsional yang berarti seimbang antara jumlah kegiatan dengan jumlah sumberdayanya, seimbang antara *input* - *output* - dan *outcome*-nya, seimbang kuantitas dan kualitasnya, dan seterusnya. Sedangkan profesional adalah sikap setiap personil baik staf maupun pimpinan dalam menjalankan dinamika lembaganya. Segala bentuk kegiatan mampu dilaksanakan dengan sukses dengan cara-cara yang profesional yaitu berhasil dengan baik atau sukses karena dilakukan oleh mereka-mereka yang mampu atau sesuai profesinya. Sikap profesionalisme juga harus didukung dan mengedepankan mereka-mereka yang kompeten di dalam bidang keahliannya.

Pengembangan kelembagaan di bidang penelitian arkeologi dalam rangka menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang yang paling dirasakan adalah peningkatan kualitas kelembagaan. Karena segi kuantitas “dijamin cukup” karena jumlah Balai Arkeologi yang telah menjangkau seluruh pelosok tanah air. Adapun yang dimaksud pengembangan kualitas lembaga adalah mengacu apa yang telah diuraikan di atas yaitu diarahkan terciptanya lembaga penelitian arkeologi yang dinamis, proporsional, dan profesional yang memiliki visi dan misi strategis.

IV. Pengembangan SDM

Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumberdaya manusia yang handal, kegiatan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut

serta adanya dukungan dana yang memadai. Sedangkan bagi seorang pimpinan yang profesional dituntut persyaratan antara lain mampu mengakomodasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh sumber daya yang tersedia (atau meningkatkan keandalan staf), bisa menempatkan staf sesuai dengan ketrampilan dan keahliannya (sehingga menghasilkan kinerja yang sinergis), dan mempunyai sikap disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan sebagai batas penyelesaian dan prioritas sebuah program, serta memberikan peluang bagi sistem untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kritikan atau tuduhan dari berbagai pihak baik secara langsung (formal) maupun secara tidak langsung berupa sindiran bahwa penelitian arkeologi dinilai hanya untuk “kepuasan” diri sendiri harus bisa diterima dengan jujur dan arif. Pandangan mereka memang tidak salah dan tidak dapat dipungkiri namun tidak semuanya dapat digeneralisir, artinya tidak semua berperilaku demikian. Kritik tersebut pada intinya ditujukan kepada SDM, dimana dalam menanggapi seharusnya dianggap kritikan yang membangun untuk dapat membangkitkan semangat merubah pandangan, mengedepankan kepentingan publik dan meningkatkan kualitas.

1. Strategi Pengembangan SDM

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang penelitian arkeologi juga sejalan dan mendukung upaya pengembangan kelembagaan sebagaimana bab di atas. Strategi pengembangan SDM yang telah dikembangkan di Balai Arkeologi Yogyakarta antara lain:

- a. Pendekatan partisipatif di dalam pemberian pelayanan, perencanaan dan manajemen;
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui sekolah dan pelatihan-pelatihan formal maupun non formal,
- c. Rekrutmen tenaga baru sesuai kebutuhan dengan kualifikasi dan kompetensi;

- d. Pengembangan wawasan pengelolaan sumberdaya arkeologi di daerah.
- e. Pengembangan penyebarluasan hasil penelitian arkeologi.
- f. Frekuensi penugasan ulang bagi staf yang sudah terlatih di bidangnya;
- g. Pengembangan staf yang memiliki keterampilan yang berorientasi kepada kepentingan publik untuk melaksanakan dan mengevaluasi kinerjanya;
- h. Perencanaan dan manajerial menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi kepada klien;
- i. Mengembangkan rencana pelayanan agar memiliki pemahaman yang baik tentang proses reformasi pelayanan prima lembaga pemerintah.

2. *Strategi Pelatihan*

Untuk menanggulangi hambatan yang mungkin timbul maka beberapa pengalaman dari lembaga lain dalam menentukan strategi pelatihan-pelatihan yaitu akan menggunakan pendekatan partisipatif pembelajaran orang dewasa di dalam:

- a. Melaksanakan serangkaian pelatihan formal dan informal bagi staf di semua tingkatan yang berfokus utama pada pendekatan partisipatif.
- b. Melaksanakan penilaian kebutuhan pelatihan per tahun dan evaluasi pelatihan.
- c. Memberikan pelatihan teknis khusus kepada staf yang penting di dalam mendukung kegiatan misalnya pelatihan teknis komputer, teknis multimedia, pelatihan administrasi perkantoran, dan lain-lain.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan 'Pelatihan Spesifik Tugas' bagi petugas /staf; misalnya pelatihan arkeologi bawah air dan lainnya.

- e. Menekankan pelatihan informal dan tindak lanjut serta dukungan kepada peserta pelatihan.
- f. Menekankan integrasi pelatihan di tingkat lapangan dengan kegiatan pengembangan kelembagaan.g. M e l a k s a n a k a n pelatihan formal dan informal serta kegiatan peningkatan kesadaran yang khusus dirancang untuk mendukung manajer dan mendorong staf mereka untuk menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif.
- h. Bekerja sama dan memperkuat hubungan antara Institusi/ Dinas Terkait serta lembaga-lembaga pelatihan lain untuk meningkatkan kemampuan pelatihan jangka panjang.

V. Penutup

Pengembangar di bidang penelitian arkeologi tidak lain adalah segala upaya untuk memberikan solusi yang selama ini dirasakan dan dialami oleh Balai Arkeologi maupun Pusat Penelitian Arkeologi. Strategi yang digunakan adalah upaya bagaimana “permasalahan” dan “kendala-kendala” tersebut dirubah atau diupayakan menjadi “tantangan”, lalu bagaimana tantangan tersebut akan dirubah menjadi “peluang”. Pengembangan penelitian arkeologi yang meliputi berbagai aspek sangat membuka peluang untuk tetap eksis di masyarakat, dan bersama dengan masyarakat serta berbagai pihak untuk menggunakan peluang-peluang tersebut secara harmoni dan menjaga tanpa ada unsur dominan.

Penelitian yang masih mempunyai warna dan nafas tersendiri dan harus terbuka untuk dikembangkan melalui teknik dan metodologinya, sedangkan di sisi lain pada era pra dan pasca penelitian yaitu melalui hasil penelitian yaitu berupa informasi dan benda-benda cagar budayanya memiliki peluang yang sama untuk dilakukan pengembangan. Di sisi lain arah pengembangan

sumberdaya arkeologi juga diharapkan mengedepankan pada aspek akademik dan bersifat strategis serta bertanggungjawab agar dalam bagian akhir tidak terjadi pilihan “perish” atau binasa.***

Daftar Bacaan

- Anonim, 2000. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*. Restu Agung. Jakarta.
- , 2001. *Peraturan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah*. Citra Umbara. Bandung.
- , 2004. *Rencana Indik Penelitian Arkeologi Nasional*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.
- Gunawan. J. 2005. *Membangun Paradigma Baru Demokratisasi dan Multikulturisme – Ekonomi Politik Globalisasi dan Desentralisasi. Dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. LP3ES. Jakarta.
- Siswanto. 2005. *Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Arkeologi Pada Era Otonomi Daerah*. (belum diterbitkan).

Profil Strategi Pengembangan Arkeologi Balai Arkeologi Bandung

Sudarti Priyono

Pendahuluan

Balai Arkeologi Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis pusat di daerah dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 53/OT. 001/MKP/2003, Tanggal 5 Desember 2003 dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan tersebut, Balai Arkeologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian arkeologi di wilayah kerjanya. Disamping itu melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi, melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi, memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, melakukan bimbingan edukatif cultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi di wilayah kerja dan melakukan urusan rumah tangga Balai.

Potensi sumber daya arkeologi baik yang berskala lokal maupun nasional tersebar di empat propinsi wilayah kerja yang meliputi 42 kabupaten/kota. Sejak berdirinya Balai Arkeologi Bandung (1993), telah sekitar 172 kegiatan pernah dilaksanakan, dari sekian kegiatan tersebut merupakan program murni Balai Arkeologi Bandung, dan

hanya sebagian kecil yang merupakan program kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sebagai UPT di daerah, kebijakan Balai Arkeologi Bandung mengacu pada kebijakan pusat, namun karena berkedudukan di daerah terlebih pada era Otonomi Daerah ini maka mau tidak mau kebijakan Balai Arkeologi Bandung juga mengacu pada kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada kebutuhan dan kepentingan di daerah wilayah kerja.

Permasalahan

Dalam perjalanannya arah dan kebijakan yang diambil Balai Arkeologi Bandung ternyata masih belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan pusat maupun daerah. Hal ini terlihat pada program penelitian Balai Arkeologi Bandung yang masih kurang sinkron dengan kebijakan pusat terkait dengan 5 tema yang telah dicanangkan maupun kebutuhan daerah. Program penelitian di Balai Arkeologi Bandung sebagian masih berorientasi pada kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada tema utama, yaitu klasik awal di Jawa Bagian Barat dan Lampung, walaupun masih ada yang bebas sesuai minat pengusul program. Selain itu program penelitian juga belum mengarah ke permasalahan daerah sebagai yang mempunyai aset sumberdaya arkeologi

Terkait dengan kondisi tersebut, sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan maka Balai Arkeologi Bandung mempunyai visi dan misi, tujuan, sasaran & pokok-pokok kegiatan sebagai berikut.

Visi: Terwujudnya Balai Arkeologi Bandung sebagai lembaga penelitian yang mampu mengembangkan dan memasyarakatkan arkeologi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pencerdasan bangsa, serta pengembangan budaya daerah dan nasional.

Misi: Untuk mewujudkan visi Balai Arkeologi Bandung ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Melaksanakan Penelitian dan Pengkajian
2. Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian
3. Meningkatkan jaringan kerja dengan lembaga terkait
4. Merekomendasikan hasil penelitian untuk Penanganan dan Pemanfaatan sumberdaya arkeologi.

Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirumuskan, tujuan Balai Arkeologi Bandung adalah mendapatkan pengetahuan dan nilai-nilai budaya masa lalu, masa kini dan akan datang, meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat luas tentang tinggalan arkeologi dan nilai-nilai budaya, terjalinnnya kerjasama yang sinergis dalam penelitian, penanganan dan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.

Sasaran: Program kerja Balai Arkeologi Bandung dikembangkan lebih lanjut mengenai jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Adapun arah kebijakan penelitian Balai Arkeologi Bandung mengacu pada tiga hal, yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, rekonstruksi cara-cara hidup dan penggambaran proses budaya. Ketiga arah kebijakan penelitian tersebut tertuang dalam tema penelitian, yaitu

Jangka Pendek (2005)

Diperolehnya informasi sejarah budaya yang bersifat lokal dan penting bagi pembangunan beberapa daerah di wilayah kerja Balai Arkeologi Bandung yang dicapai dengan melakukan penelitian arkeologi 9 program penelitian dan 2 kegiatan penanggulangan kasus, 1 kegiatan bimbingan dan penyuluhan, 1 kegiatan EHPA, 4 kegiatan diskusi intern, publikasi hasil penelitian berupa penerbitan buku ilmiah 2 judul, perekaman objek purbakala berupa pembuatan film

dokumentasi mengenai tinggalan masa klasik di situs Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis, dan 2 kali kegiatan pameran bersama dengan instansi terkait, 1 kali pameran mandiri yang dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

Jangka Menengah (2005-2009)

Tahun 2006 ini merupakan tahapan awal jangka menengah yang memfokuskan pada dinamika keanekaragaman budaya Nusantara, dan mencari asal-usul dari persebaran puak-puak Melayu, serta publikasi informasi hasil penelitian secara luas. Arah penelitian jangka menengah ini di samping mencakup penelitian jangka pendek juga penekanannya pada rekonstruksi cara-cara hidup masyarakat masa lalu di Jawa Bagian Barat dan Lampung. Hal ini dilaksanakan melalui pengkajian informasi arkeologis dengan penelitian arkeologi secara tematis dan eksploratif, penggalian informasi baru mengenai sejarah budaya dan sumberdaya arkeologi, analisis artefak hasil penelitian, serta hubungannya dengan kontek temuan yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan rekonstruksi sistem adaptasi, sosial, dan teknologi masyarakat masa lalu. Pengadaan peralatan, peningkatan sumberdaya dalam teknologi informasi dan pembentukan pangkalan data.

Pemasyarakatan hasil penelitian yang merupakan sumber informasi sejarah budaya melalui publikasi dan rekomendasi.

Jangka Panjang (2009-2020)

Kegiatan jangka panjang yang merupakan kelanjutan kegiatan jangka pendek dan jangka menengah dengan tema siapa dan dari mana kita; migrasi dan proses hunian di Jawa Bagian Barat – Lampung; interaksi manusia dan lingkungan alam masa lalu; dinamika keanekaragaman budaya, perdagangan insuler, mencari asal-usul dan persebaran puak-puak Melayu secara bertahap telah mulai berjalan selaras dengan pelaksanaan kegiatan jangka pendek

dan menengah. Arah kebijakan penelitian jangka panjang ini merupakan gabungan dari jangka pendek dan jangka menengah dan keberhasilannya tergantung pada hasil penelitian jangka pendek dan jangka menengah.

Diharapkan pada arah kebijakan jangka panjang ini dapat menjelaskan proses budaya, bagaimana dan mengapa kebudayaan mengalami perubahan-perubahan, dan pemanfaatan hasil penelitian, informasi sejarah budaya, dan arkeologi di Jawa Bagian Barat-Lampung dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih luas.

Sumberdaya Manusia Balai Arkeologi Bandung

Struktur organisasi Balai Arkeologi Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai mengepalai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Peneliti
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tiga urusan, yaitu Kepegawaian, Urusan Dalam dan Urusan Keuangan.
3. Tenaga Peneliti berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Arkeologi Tugas pokok peneliti adalah melaksanakan penelitian arkeologi di seluruh wilayah kerja Balai Arkeologi yang meliputi empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung.

Adapun sumberdaya manusia pada Balai Arkeologi Bandung, per bulan Juli 2006, adalah sebagai berikut:

Nomor	Paparan Kondisi Pegawai	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	30 Orang
	Jabatan Fungsional	12 Orang

4. Profil dan Strategi Pengembangan

	Urusan tata Usaha	6 Orang
	Teknisi	9 Orang
	Honorar	3 Orang
2	Jenis Golongan / Ruang	
	II/a	-
	II/b	3 Orang
	II/c	1 Orang
	II/d	3 Orang
	III/a	4 Orang
	III/b	9 Orang
	III/c	2 Orang
	III/d	1 Orang
	IV/a	3 orang
	IV/b	1 Orang
3	Tingkat Pendidikan	
	SLTP	-
	SLTA Umum	8 Orang
	SLTA Kejuruan	6 Orang
	Sarjana/S1	11 Orang
	Pasca Sarjana/S2	2 Orang
4	Jabatan Fungsional	
	Peneliti Madya	3 Orang
	Peneliti Muda	3 Orang
	Peneliti Pratama	6 Orang
5	Spealisasi Keilmuan	
	Arkeologi Prasejarah	2 Orang
	Arkeologi Klasik	1 Orang

Arkeologi Islam	3 Orang
Antropologi	1 Orang
Sejarah	2 Orang
Geologi	1 Orang
Biologi	1 Orang
Kimia-Arkeologi	1 Orang
Sarjana Ekonomi	1 Orang

Potensi Peninggalan Arkeologi Dan Prospeknya

Sisa-sisa budaya material yang ditemukan di wilayah kerja Balai Arkeologi Bandung merupakan artefak yang memiliki ciri-ciri tinggalan tradisi megalitik, tinggalan masa Hindu Budha, tinggalan masa Islam, masa kolonial, dan cerita tutur yang menunjukkan perkembangan budaya Islam yang ditemukan di Propinsi Lampung. Di samping itu juga terdapat situs geologi kwarter bagi yang berminat pada penelitian bidang paleontologi.

Tinggalan tradisi megalitik berupa punden berundak, menhir, batu dakon, batu bergores dan nisan-nisan kubur yang terbuat dari tonggak-tonggak batu ditemukan tersebar di pedalaman Jawa Bagian Barat, di wilayah Lampung seperti di Lampung Barat, Lampung Timur dan Lampung Utara. Sedangkan tinggalan masa Hindu-Buda dapat dijumpai di Jawa Barat bagian Tenggara dan pantai utara Jawa Barat, dan di Lampung Timur. Adapun tinggalan masa Islam tersebar hampir di seluruh wilayah kerja, peninggalan kolonial tercecer di beberapa daerah.

Sisa-sisa budaya masa lalu seperti yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa data arkeologi di wilayah kerja Balai Arkeologi Bandung cukup potensial dan berprospek baik dalam bidang paleontologi dan arkeologi seperti aspek pemukiman, yang terdiri dari gua-gua hunian, bukti-bukti tentang aspek persebaran agama dan perdagangan, sisa-sisa makam tua, benteng pertahanan,

bangunan dan alat-alat peribadatan dan lain-lain. Potensi arkeologi di wilayah ini diperkirakan dapat memenuhi kepentingan masyarakat, baik masyarakat akademis yang membutuhkan data budaya yang berhubungan dengan proses hunian di Nusantara, interaksi manusia dan lingkungan masa lampau, keanekaragaman budaya, pemukiman, persebaran puak-puak Melayu maupun kepentingan masyarakat umum. Arkeologi di wilayah ini juga memiliki prospek sebagai pendukung pembangunan kebudayaan daerah dan nasional melalui data yang berkaitan dengan keseragaman budaya. Potensi arkeologi di wilayah ini juga dapat mendukung pengembangan pariwisata dan pendidikan dalam rangka Otonomi Daerah.

Langkah-langkah Setrategis

Mengacu kepada uraian tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa wilayah Jawa bagian Barat dan Lampung merupakan daerah yang potensial dan memiliki prospek untuk menangani tantangan yang berkaitan dengan masalah global baik dalam bidang arkeologi seperti pemukiman, aliran migrasi manusia pada masa prasejarah, adaptasi budaya, sedangkan dalam bidang pembangunan, misalnya yang berkaitan dengan sosial ekonomi, integritas bangsa dan otonomi daerah.

Hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan selama ini masih belum maksimal, masih banyak hal dan aspek yang belum berhasil diungkap, misalnya data pertanggalan obsolut dan masih terdapatnya rancangan penelitian yang belum fokus pada rencana setrategis. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain belum sinkronnya perlengkapan pembuatan bensin untuk karbon dating, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, kurangnya sarana prasarana yang memadai, serta konsep dan metode kerja yang tepat guna yang belum berkembang secara memadai membutuhkan suatu pemikiran dan terobosan-terobosan.

Adanya sistem keuangan negara yang berbasis kinerja, ini sebenarnya merupakan penambahan dana penelitian untuk menambah frekuensi dan diversifikasi jenis penelitian, akan tetapi terbentur kepada sumberdaya manusia yang terbatas jumlahnya. Peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana akan menunjang tercapainya penelitian yang optimal di dalam penelitian arkeologi akan segera terwujud.

Untuk itu Balai Arkeologi Bandung berupaya mengambil langkah setrategis, diantaranya berupa penajaman konsep dan metode kerja, serta penyempurnaan organisasi dan kebijakan seperti yang dikemukakan dibawah ini.

1. Membagi jenis kegiatan ke dalam beberapa kelompok untuk memudahkan dalam memonitor, mengevaluasi dan melaporkan. Langkah ini telah menetapkan adanya tiga kelompok jenis kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan penelitian terdiri dari pengumpulan data di perpustakaan, pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari kegiatan survei dan ekskavasi, pengolahan data, interpretasi dan pelaporan
 - b. Kegiatan pasca penelitian antara lain kegiatan analisis, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi.
 - c. Kegiatan penunjang penelitian, terdiri dari kegiatan kajian ilmiah (diskusi intern), administrasi, kegiatan kepastakaan, urusan keuangan, personalia dan tatalaksana.
2. Mengusulkan kebutuhan yang diutamakan, seperti peningkatan anggaran penelitian, pengusulan SDM peneliti, melengkapi sarana prasarana gedung seperti penggantian kusen-kusen jendela dan pintu beserta asesorisnya, penataan dan penambahan ruangan analisis, peningkatan kualitas SDM peningkatan jaringan kerja dengan instansi-instansi terkait, pengadaan instalasi jaringan internet, dan pengadaan kekurangan peralatan laboratorium C-14.

4. Profil dan Strategi Pengembangan

3. Mengadakan terobosan berupa penyempurnaan setrategi melalui:
 - a. Intensifikasi penelitian dengan penajaman konsep yang sesuai dengan kondisi daerah dan peningkatan frekuensi penelitian.
 - b. Mengembangkan sistem informasi kebudayaan, sesuai dengan sistem informasi kebudayaan terpadu.
 - c. Memberikan bimbingan edukatif kultural, melalui penyuluhan dan ceramah-ceramah kepada masyarakat dan instansi terkait
 - d. Pemasyarakatan hasil penelitian melalui media, seminar, pameran, dan terbitan ilmiah.
 - e. Mengembangkan program kerjasama meliputi kerjasama dalam negeri, terutama dengan instansi/lembaga terkait yang berada di wilayah kerja. Dalam pengembangan ini Balai Arkeologi Bandung berupaya menjajaki kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah, LSM, dan kedepan akan mencoba menjajaki ke BPTN dalam rangka memproses ijin penggunaan peralatan pembuatan benzena dll.

Program-program Tupoksi Yang Sudah Dan Akan Dilaksanakan

NO	TAHUN NAMA KEGIATAN	2005 JML	2006 JML	2007 JML	2008 JML	2009 JML
1	Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan	9 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali
2	Kerjasama Antar Instansi	2 Kali	6 kali	8 Kali	9 Kali	9 Kali
3	Penyelenggaraan Laboratorium	-	4 kali	7 Kali	8 Kali	8 Kali
4	Analisis LAB C-14	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
5	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi & Pameran	1 KGT	2 KGT	2 KGT	3 KGT	3 KGT
6	Penyelenggaraan Ceramah/ Diskusi	5 Kali				
7	Penerbitan Majalah/Jurnal	2 Judul	3 Judul	4 Judul	3 Judul	4 Judul

8	Pameran Kerjasama	2 Kali				
9	Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi	1 KGT				
10	Perlengkapan	4 Unit	9 Unit	6 Unit	9 Unit	9 Unit

Daftar Pustaka

Anonim

2004 Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional, Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.

Anonim

2004 Rencana Strategis Balai Arkeologi Bandung, Balai Arkeologi Bandung, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Bandung

Anonim

2005 Laporan Tahunan Balai Arkeologi Bandungm Balai Arkeologi Bandung, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Bandung

Anonim

2006 Laporan Kegiatan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, Balai Arkeologi Bandung, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Prijono, Sudarti dan Effie Latifundia

2004 Strategi dan Program Penelitian Balai Arkeologi Bandung

Masalah “Power” Dalam Arkeologi Indonesia

R. P. Soejono

Dalam dunia arkeologi terdapat istilah-istilah dan pengertian yang khas diberlakukan dalam lingkup perkembangan ilmu itu sendiri. Diantaranya dijumpai istilah “power” yang mengandung arti kekuatan atau kekuasaan. Istilah ini menunjuk ke suatu situasi, kondisi atau ciri keadaan yang dimiliki obyek atau sasaran dalam lingkup salah satu aspek arkeologi seperti aspek kronologi, teknologi, sosial, politik, religi dls.

“Power” dapat dibedakan implikasinya dalam hubungan intern (*inheren*) yang menyangkut materi arkeologis dan hubungan ekstern yang menyangkut pengaruh/impak (*impack*) dari luar terhadap materi arkeologis. Implikasi itu dapat diikuti secara silih berganti dalam perkembangan arkeologi Indonesia sehingga dewasa ini, tergantung dari pentingnya suatu obyek yang menonjol dalam saat-saat itu.

V. Gordon Childe, seorang pakar arkeologi ternama mengatakan: “*Archaeology is a source of history, not just a humble auxiliary dicipline. Archaeological data are historical documents in their own right, not mere illustration to written text. Just as much as another historian an archaeologist studies and tries to reconstitute the process that has created the human world in which we live-and as our selves in so far as we are each creatures of our ages and social environment. Archaeological data are all changes in the material world resulting from human action, or*

more succintly, the fossilized result of human behaviour. The sum total of this constitute what may be called "the archaeological record".

G E. Rumphius, seorang ilmuwan lingkungan alam (naturalist) menerbitkan buku berjudul "D'Amboinsche Rariteitenkamer" tahun 1709 tentang nekara perunggu Pejeng (Bali) yang unik serta kapak batu, serta kapak perunggu.

Pada abad ke 18 terjadi penemuan Candi Borobudur dan penjajagan dan penyusunan pertama laporan-laporan tentang gugusan Candi Prambanan yang semuanya dilakukan oleh petugas VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Dalam rangka peningkatan perhatian terhadap peninggalan purbakala terjadi suatu peristiwa yang menonjol yaitu pembentukan "*Koninklijk Bataviaasch Genootschap*" (KBG), untuk kemajuan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan (*Kunsten en Wetenschappen/KW*) pada tahun 1778 dengan tujuan mendorong penelitian di bidang seni, kepurbakalaan, adat istiadat, dan kebiasaan, serta juga masalah-masalah yang mendesak tentang perdagangan dan kesejahteraan.

- * Tahun 1885 dibentuk sebuah perkumpulan purbakala (*Archaeologische Vereeniging*) yang terutama berkaitan dengan penelitian candi-candi besar.
- * Tahun 1891 fosil *Pithecanthropus Erectus* ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil
- * Tahun 1931 undang-undang perlindungan kepurbakalaan diterbitkan (*Monumenten Ordonantie*)

Para ahli arkeologi dari Belanda yang dianggap sebagai pembina dan pembangun arkeologi di Indonesia mulai awal abad ke-20 adalah J. Brandes, FDK Bosch, N. J. Krom, P. V. van Stein Callenfels, dan W. F. Stutterheim. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dan tukar menukar komunikasi dengan para ahli di luar

Indonesia telah beberapa kali dilaksanakan, antara lain dalam bentuk *Congress of Prehistorians of the Far East* di Hanoi pada tahun 1933 dan tahun 1940.

Setelah Indonesia merdeka perkembangan arkeologi Indonesia dilanjutkan dengan menggunakan landasan-landasan yang telah diwariskan oleh para pendahulunya dari Belanda. Disamping itu, juga mengadakan pengembangan dalam struktur organisasi, metode kerja, dan strategi pengembangan yang disesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang sedang dihadapi saat itu. Segala sesuatu dalam melanjutkan proses perkembangan itu di Indonesia dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang di bidang arkeologi, yaitu khusus penelitian, pemugaran, dan perlindungan kepurbakalaan dalam cakup/lingkup struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tetap mengikuti garis dan syarat arkeologi sesuai dengan patokan-patokan ilmiah/internasional. Namun suatu bentuk pengembangan dan struktur kelembagaan yang keluar dari jalur pengembangan sistematis untuk ke tingkat lebih maju telah terjadi pada tahun 1997.

Selama kurang lebih 50 tahun bergiat, lembaga arkeologi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan struktur, tugas, dan fungsi. Perubahan terakhir terjadi, khususnya di bidang penelitian, telah menggunakan nomenklatur yang tidak menggambarkan bentuk suatu lembaga penelitian arkeologi. Padahal, apa yang telah dilakukan lembaga penelitian ini (yaitu ex Puslit Arkenas) adalah penelitian di seluruh Indonesia dengan tenaga dan fasilitas yang cukup memadai.

Hambatan yang sangat besar bagi arkeologi sekarang ini adalah pemindahan atau pengalihan para ahli-ahli arkeologi ke tempat-tempat yang tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan formalnya sebagai arkeolog. Hal ini sangat disayangkan dan patut dipermasalahkan demi kelanjutan dan perkembangan arkeologi

Indonesia serta para ahli dan pengelolanya pada masa yang akan datang dalam perkembangan global atau internasional.

Perkembangan arkeologi di Indonesia sejak masa awal perkembangannya pada jaman kolonial (Hindia Belanda) dapatlah ilmu ini di bagi ke dalam beberapa tahap perkembangan utama; jelaslah di sini bahwa power pada setiap tahap memperlihatkan diri sebagai bagian inheren (internal) arkeologi atau sebagai hasil dampak dari luar konteks arkeologi (eksternal).

Masa Kolonial Belanda (tahun 1700-1940) dan Jepang (tahun 1940-1945)

Masa Kemerdekaan: Tahun 1945-1953; tahun 1953-2000; dan tahun 2000-2004

- * Pada masa kemerdekaan, arkeologi Indonesia meneruskan eksistensinya dengan terus mengembangkan arkeologi sesuai dengan syarat dan ciri yang dipatokkan kerja ilmiah arkeologi khususnya dengan menggunakan tenaga Indonesia.
- * Beberapa ahli Belanda seperti H.R. van Heekeren, A.J. Bernet Kempers, V.R. van Romond, dan G.J. de Casparis masih bertugas di Lembaga Purbakala sampai tahun 1956.

Dalam masa kemerdekaan, tenaga ahli Indonesia dapat melanjutkan kelangsungan perkembangan arkeologi Indonesia di semua bidang penelitian dan pemugaran disertai peningkatan metode kerja, pertemuan ilmiah arkeologi di dalam dan di luar negeri, kerjasama kegiatan arkeologi dengan lembaga-lembaga ilmiah di dalam maupun di luar negeri, pengiriman tenaga Indonesia untuk didik di luar negeri, penerapan kerja laboratoris dan lain-lain.

- * Power dalam posisinya sebagai kekuatan yang inheren/internal (terkandung dalam diri obyek arkeologi), maupun sebagai kekuatan di luar kandungan eksternal obyek arkeologi, dapat diikuti eksistensinya secara silih berganti dari masa kemasa.

5. Masalah "Power" dalam Arkeologi Indonesia

- * Power sebagai kekuatan inheren arkeologi, yang memberi kemashuran kepada dunia, adalah Candi Borobudur, Prambanan dls, manusia purba seperti *Pithecanthropus erectus* dls, benteng kolonial, masjid, keraton dll.
- * Power yang memberi kemanfaatan kepada obyek dan data arkeologi lain, adalah kekuatan dari luar seperti unsur pemerintahan.

Tahun 1998 terjadilah perubahan dalam struktur pemerintahan dan perubahan ini merambah ke Struktur Ditlinbinjarah (Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala) pada th 2000, baik mengenai nomenklatur maupun tupoksi yang tidak lagi menjadikan Puslit Arkenas sebagai suatu lembaga penelitian, tetapi hanya sebagai lembaga pelaksana penyusun perencanaan dan program penelitian saja. EHPA sekarang ini berubah nama menjadi "Penyusunan Kebijakan Penelitian Arkeologi" di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus yang seksama karena visi dan misi lembaga ini bertujuan tidak lagi melaksanakan penelitian, tetapi hanya mengamankan dan menyempurnakan sistem dan target pencapaian lembaga agar seefektif dan setepat mungkin dalam mengelola arkeologi dalam wilayah Indonesia. Tidaklah jelas dinyatakan penelitian dan perlindungan arkeologi secara formal dilaksanakan oleh lembaga apa.

Beberapa hal yang perlu khususnya dianjurkan di sini adalah:

- * Struktur arkeologi yang sebelum ini digunakan diberlakukan kembali yaitu mengaitkan arkeologi dengan pendidikan seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan dengan Pariwisata yang visi dan misinya tidak sejalan dengan visi-misi arkeologi
- * Membuat skema tentang program dan pelaksanaannya yang sistematis dan mudah dimengerti.

Sekarang ini mulai tampak ada ketetapan nomenklatur yang pasti tentang Penelitian dan Perlindungan Arkeologi, yang keduanya menjadi bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata yaitu antara lain bahwa penelitian arkeologi ditetapkan sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dengan menyandang tugas-tugas sebagaimana sebelum ini. * * *

Pengembangan Dan Pemanfaatan Penelitian Ikonografi Di Bali

Oleh: A.A. Gde Bagus (Balai Arkeologi Denpasar)

I. Pendahuluan

Penelitian ikonografi di Bali selama ini masih terbatas pada deskripsi bentuk, fungsi, makna, dan persebarannya. Penelitian ikonografi selama ini lebih ditekankan pada kepentingan akademik daripada kepentingan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap tinggalan arca-arca kuna sangat penting karena sebagian besar tinggalan tersebut masih disakralkan dan dipelihara dengan baik serta tersimpan di gedong (pelinggih) di dalam pura atau tempat suci. Tinggalan tersebut meskipun tidak digunakan lagi sebagai objek pemujaan oleh umat Hindu namun tetap dipelihara oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhurnya.

Perkembangan arkeologi Indonesia baik sebagai ilmu maupun kelembagaan saat ini banyak menghadapi berbagai masalah akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Paras arkeolog yang telah berkecimpung di lembaga penelitian arkeologi saat ini tidak dapat lagi berpikir arkeologi untuk arkeologi, melainkan pula harus memikirkan sosial arkeologi. Dalam buku "*Archaeological Heritage Management in the Modern World*", yang disunting oleh Henny Cleere, disebutkan bahwa ada tiga kepentingan pokok dalam pengelolaan tinggalan arkeologi, yaitu: 1). kepentingan akademik, 2). kepentingan ideologi yang berkaitan dengan jatidiri bangsa, dan 3).

kepentingan akademik yang berkaitan dengan pariwisata, (1989:5-11; Kusumahartono, 1993:47). Dari ketiga kepentingan pokok dalam pengelolaan tinggalan arkeologi maka kepentingan ekonomi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan terjadinya perubahan tersebut maka permasalahan penelitian ikonografi di Bali ke depan adalah bagaimanakah pengembangan dan pemanfaatan penelitian ikonografi di Bali dalam memenuhi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Pulau Bali yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata, sebagian besar masyarakatnya mempunyai keterampilan sebagai pengrajin barang seni, seperti pengrajin pahat, pengrajin logam, pengrajin tenun, dan pengrajin gerabah. Mereka tentu sangat membutuhkan disain kuna dalam mengapresiasi hasil karyanya yang selama ini masih terbatas. Di sisi lain wisatawan asing yang berkunjung ke Bali ternyata sangat menggemari disain-disain kuna tersebut.

II. Pengembangan Dan Pemanfaatan

2.1. Penelitian Yang Telah Dilakukan

Tinggalan arca-arca kuno di Bali pada umumnya ditempatkan di *pura-pura*, meskipun ada juga yang masih terletak di areal terbuka seperti daerah tegalan atau persawahan. Arca-arca kuno tersebut meskipun dianggap suci dan keramat tidak lagi digunakan sebagai objek pemujaan. Hal ini terkait dengan perubahan tradisi di dalam masyarakat yang tidak membuat arca-arca semacam itu lagi. Ini berarti bahwa pada suatu saat telah terjadi penghentian tradisi pembuatan arca yang diikuti dengan kegiatan tradisi baru yang dianggap lebih baik.

Berdasarkan ciri-ciri ikonografi arca-arca kuna di Bali, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Arca dewa
2. Arca bukan dewa

Arca dewa adalah arca yang mempunyai *laksana* (tanda atau ciri) tertentu yang menurut ikonografi Hindu-Buddha merupakan ciri kedewaan, seperti *ardhacandra kepala* (bulan sabit dan tengkorak) yang merupakan *laksana* dewa Siwa, *sangka* (kerang) yang merupakan *laksana* dewa Wisnu. Adanya perbedaan *laksana* yang disandingkan pada masing-masing dewa juga memiliki makna yang berbeda-beda. Di samping itu juga melambangkan kekuatan dan kekuasaan dewa yang diartikan (Hardiati, 1993:10; Kuspariyati, 2001:8).

Arca dewa yang ditemukan di Bali meliputi dewa-dewa dari pantheon Hindu dan Buddha. Dewa dari pantheon Hindu antara lain: Siwa Mahadewa, Siwa Mahaguru, Siwa Ardhanari, Siwa Bhairawa, Wisnu, Brahma, Caturkaya, Durgamahisasuramardini, Ganesa, Parwati sedangkan dewa dari pantheon Buddha antara lain: Budha, Padmapani, Amogapasa, dan Hariti.

Arca bukan dewa, menurut Endang Sri Hardiati (1993), adalah arca yang tidak mempunyai *laksana*. Yang termasuk kelompok ini adalah:

- a. Arca pendeta, pada umumnya digambarkan memakai jubah dan dandanan rambut pendeta atau digambarkan sebagai laki-laki berjenggot.
- b. Arca tidak beratribut dewa, yaitu pakaian dan perhiasannya mirip dengan arca dewa, tetapi tidak mempunyai *laksana* tertentu yang dapat dihubungkan dengan salah satu dewa. Termasuk ke dalam kelompok arca tidak beratribut dewa ini adalah arca sepasang tokoh laki-laki dan wanita. Arca ini disebut juga arca Bhatara-Bhatari atau Leluhur. Ciri arca tersebut yaitu bertangan dua ditekuk ke depan, pada telapak tangannya terdapat bunga mekar atau benda lonjong yang mirip dengan kuncup teratai atau semacam buah yang kulitnya terkelupas. Mahkota berhias kelopak bunga teratai kadang-kadang *sirascakra*. Perhiasan yang dipakai

antara lain jamang, kalung, hiasan telinga, gelang lengan, ikat pinggang, dan ikat perut.

Di antara arca perwujudan yang ditemukan di Bali, ada arca perwujudan yang merupakan penggambaran atau perwujudan raja dalam bentuk dewa tetapi dengan atribut-atribut yang tidak lazim seperti arca Caturkaya (Pura Penataran Sasih Pejeng), arca Siwa Mahaguru, arca Parwati (Pura Sibi Agung). Sikap kedua tangan depan yang berada di depan perut memegang sebuah bunga mekar atau kuncup, buah atau benda bulat lonjong yang sama dengan arca leluhur. Bunga mekar atau kuncup yang ada di tangan arca-arca perwujudan tersebut melambangkan pelepasan jiwa (Moens, 917:499).

Dari data ikonografi ini diduga bahwa arca perwujudan ada dua, yaitu arca perwujudan tidak beratribut dewa dan arca perwujudan yang artribut dewa, yaitu pengarcaan tokoh manusia yang di perdewakan (Hardiati, 1993:42). Seperti fragmen arca dewa dengan nama *Sang Hyang Marijumna*, arca Siwa Mahaguru dengan nama *Kaki Sangsara* dan arca Parwati dengan nama *Sang Ring Guha* (Pura Sibi Agung), (Stutterheim, 1929,1933; Goris 1954;Atmojo, 1974-1975).

- c. Arca penjaga, pada umumnya digambarkan dalam wujud raksasa, membawa senjata berupa gada dan perisai.

Menurut Stutterheim (1929) berdasarkan pertanggalan dan persamaan gaya arca-arca perwujudan di Bali dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Periode Hindu Bali abad VIII-X Masehi

Arca-arca yang tergolong periode ini langgamnya menunjukkan karakter internasional dan dijumpai di India Belakang, Nepal,

Tibet, dan Asia Tengah, yang berakar pada kesenian Gupta. Arca yang tergolong pada periode ini adalah arca Aksobya (Kutri), arca Siwa (Pura Putra Bhatara, Desa Bedulu).

2. Periode Bali Kuna abad X-XIII Masehi

Arca-arca yang tergolong periode ini yaitu: arca sepasang (Gunung Penulisan) yang berangka tahun 933 Saka (1011 Masehi), arca Durgamahisasuramardini (Kuktri), arca Bhatari Mandul (Gunung Penulisan) berinskripsi huruf Kadiri kuna.

3. Periode Bali Madya abad XIII-XIV Masehi

Arca-arca yang termasuk dalam periode ini yaitu: arca Bhatari yang berinskripsi 1342 Saka, arca Caturkaya (Pura Penataran Sasih), arca Arjuna, dan arca Bhatara di Pura Kebo Edan.

Arca-arca ini sengaja diciptakan sebagai perlengkapan dan objek pemujaan. Arca dewa berfungsi untuk membantu konsentrasi dalam upaya mendekati diri kepada dewa yang dipuja, memohon perlindungan, dan keselamatan lahir dan batin. Demikian pula halnya dengan pembuatan arca perwujudan yang erat kaitannya dengan upacara *Sradha* (*Memukur*) untuk membebaskan jiwa atau roh-roh orang yang meninggal dari hal-hal yang mengikatnya dengan dunia fana. Menurut Moens (1919:499), lambang pembebasan nampak pada bunga mekar atau kuncup yang dibawa oleh arca perwujudan. Fungsi arca perwujudan ini sebagai media pemujaan dalam upacara keagamaan oleh keturunannya untuk mohon perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Tinggalan arca-arca kuna yang tersebar tidak merata di seluruh di Bali nampaknya ada kaitannya dengan pusat-pusat pemerintahan pada masa lalu. Dari hasil penelitian ikonografi di Bali tampak daerah yang paling padat temuannya adalah Kabupaten Gianyar dan Kintamani. Hal ini disebabkan perkembangan kerajaan Bali Kuna dari abad ke X-XIV yang berpusat di Gianyar, Bedulu, Pejeng, dan Kintamani. Secara akademis penelitian ikonografi di Bali masih

banyak perlu diungkap seperti pusat pembuatan arca, aturan dan ukuran pembuatan arca dewa maupun perwujudan.

2.2. Perkembangan dan Pemanfaatannya

Dinamika suatu bangsa nampak dalam usaha-usaha pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebagaimana dirumuskan dalam PELITA VI bahwa tujuan pembangunan adalah untuk menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan makmur serta meletakkan landasan yang lebih mantap untuk tahap pembangunan berikutnya. Sesuai dengan kondisi daerah Bali, dalam mencapai tujuan pembangunan telah mengembangkan pariwisata budaya dengan memanfaatkan potensi yang tersedia termasuk sumberdaya arkeologi (Kanwil, Deparsenibud Bali, 2000:18). Pesatnya laju pembangunan Bali yang ditopang sektor pariwisata telah berperan dalam menggairahkan berbagai kerajinan masyarakat, seperti seni pahat (patung, relief), tenun, logam, dan gerabah. Dalam mengapresiasi karya-karya seni, masyarakat sangat membutuhkan disain dari sumberdaya arkeologi.

Sumberdaya arkeologi merupakan salah satu aset budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dalam pengertian secara umum. Sumberdaya arkeologi ini dapat bermanfaat apabila makna keberadaan nilai yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan ekonomi, pengembangan media apresiasi budaya, keagamaan, simbol daerah (Hidayat, 2000: 256-257).

Salah satu pengelolaan sumberdaya arkeologi telah dipercayakan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional di tingkat nasional dan balai arkeologi di tingkat daerah. Sebagaimana lembaga pemerintah lainnya, tujuan pembentukan balai arkeologi di daerah adalah untuk ikut berperan dalam pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam SK Mendikbud RI No. 0207/1978, tanggal 23 Juni 1978 disebutkan bahwa balai arkeologi bertugas dan berfungsi melaksanakan penelitian arkeologi di wilayahnya masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya tugas dan fungsi balai arkeologi diperluas seperti tertuang dalam SK. Mendikbud RI No. 0290/0/1992, tanggal 1 Juli 1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi. Dalam SK ini disebutkan, bahwa fungsi balai arkeologi adalah:

1. Melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi.
2. Melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi.
3. Memperkenalkan dan menyebarkan hasil penelitian arkeologi.
4. Melaksanakan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.

Mengacu pada kedua SK tersebut, maka tugas pokok balai arkeologi adalah melakukan penelitian dan menyajikan informasi hasil penelitian kepada masyarakat. Sesuai dengan kedudukan balai arkeologi di daerah diharapkan dapat berperan dalam membangun daerah kapasitasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai arkeologi yang telah dipercayai untuk mengelola salah satu aset daerah berupa sumberdaya arkeologi melalui penelitiannya tentu sangat diharapkan menyumbangkan produknya yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa daerah Bali dalam pembangunan yang ditopang pariwisata mengerahkan berbagai kerajinan masyarakat yang membutuhkan disain-disain kuna. Mengacu pada tugas pokok balai arkeologi yaitu menyajikan kepada masyarakat, maka untuk memenuhi harapan para pengerajin industri kecil masyarakat Bali, maka penelitian ikonografi ke depannya dapat

mengakomodasikan dua kepentingan yaitu sebagai ilmu murni (akademik) dan ilmu terapan. Penelitian ilmu murni merupakan penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi budaya masa lalu dan penelitian terapan terhadap ikonografi dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, terutama di bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri kecil dan pariwisata. Untuk itu, penelitian ikonografi dapat dikembangkan ke ikonometri, perhiasan, pakian, atribut, dan lain-lainnya.

Hasil penelitian ikonometri nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengrajin patung (arca). Pengrajin patung di Bali, dalam pembuatan arca yang bersifat Hindu maupun Buddha diharapkan nanti dapat mentaati aturan ikonografi Hindu-Buddha. Ketentuan yang tidak boleh diganggu gugat karena erat hubungannya dengan identitas dewa yang bersangkutan, dan dalam hal ini disebut ciri-ciri pokok (Maulana, 1997 : 2). Selain itu ikonometrinya juga harus diperhatikan. Bentuk arca Hindu dan Buddha menunjukkan ciri bentuk yang proposional karena dalam ikonometri Hindu terdapat patokan-patokan yang membedakan ukuran satu dewa dengan dewa lainnya. Patokan untuk dewa Ganesa misalnya, mempunyai ukuran tinggi *pancatala* yaitu lima *tala* atau *srada catus tala* yaitu empat setengah *tala* (Sedyawati, 1994 : 80). Hasil penelitian terhadap perhiasan, pakaian, atribut dan lainnya nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengrajin logam (emas, dan perak), tekstil dan lainnya. Pengrajin logam di Bali, emas dan perak yang memproduksi asisoris perkembangannya cukup pesat, akibat kemajuan pariwisata, sehingga para pengrajin dituntut kreatif dalam menciptakan disain-disain untuk merebut pasar. Industri kecil masyarakat Bali yang mempergunakan disain kuna, secara ekonomi akan mempunyai nilai jual lebih tinggi, karena ada nilai historisnya.

Hasil penelitian ikonografi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh industri kecil masyarakat Bali dalam apresiasi bentuk disain

karyanya. Dalam sosialisasi hasil penelitian dapat bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Perindustrian.

III Penutup

Penelitian ikonografi di Bali selama ini lebih ditekankan pada kepentingan akademik dan masyarakat. Untuk itu penelitian ikonografi ke depan selain berusaha mengungkap aspek akademik juga akan berkembang ke aspek praktis yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat, terutama industri kecil yang menopang pariwisata. Upaya pemasyarakatan hasil penelitian diharapkan dapat membantu pengrajin di Bali dalam memberi inspirasi dan apresiasi disain di setiap karya-karya mereka. ***

Daftar Pustaka

- Ambarawati, Ayu, 2000. "Penelitian Ikonografi Klungkung"
Laporan Penelitian Arkeologi, Denpasar : Balai Arkeologi
Denpasar.
- , 2003. "Penelitian Ikonografi Klungkung"
Laporan Penelitian Arkeologi, Denpasar : Balai Arkeologi
Denpasar.
- Astawa, A.A. Gede Oka, 1978. "Penelitian Ikonografi Gianyar",
Laporan Penelitian Arkeologi, Denpasar : Balai Arkeologi
Denpasar.
- Bagus, A.A. Gede, 2004. "Penelitian Ikonografi Kintamani",
Laporan Penelitian Arkeologi, Denpasar : Balai Arkeologi
Denpasar.
- Cleere, Henny, 1989. *Archaeological Heritage Management in the
Modern World*, London Unwin Hyman.
- Hardiati, Endang Sri, 1993. *Arca Tidak Berakribut Dewa di Bali
Sebuah Kajian Ikonografis dan Fungsional. Disertasi*,
Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- , 1993/1994. *Pura Gunung Penulisan*. Jakarta :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hidayat, Muhammad, 2000. "Pemanfaatan Penelitian Arkeologi
Bagi Pembangunan Daerah" Dalam *EHPA*, Bedugul.
Jakarta: Peningkatan Penelitian Arkeologi Jakarta, Hal. 256-
263.
- Kanwil Deparsenibud Bali, 2000. "Pengembangan Pariwisata dan
Pemerdayaan Desa Adat" Dalam *Eksistensi Desa Adat,
Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pusat Pengkajian
Pedesaan dan Kawasan Dengan Nusantara. Aneka Jasa
Abadi. Hal.5-12.

- Kusumahartono, Bogie, 1991. "Penelitian Arkeologi Dalam Konteks Pengembangan Sumberdaya Arkeologi", Dalam *Berkala Arkeologi*, Yogyakarta.: Balai Arkeologi Yogyakarta
- Kuspariyati, S. 2001. *Arca-Arca Kuna Tokoh Dewa Hindu di Bali, Sebuah Kajian Ikonografi dan Ikonologi. Disertasi*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Maulana, Ratnaesih, 1997. *Ikonografi Hindu* Depok : Falkutas Sastra Universitas Indonesia.
- Moens, J.L., 1919. "Hindu-Javaansche Potret Beelden Siwa Pratista En Boddha Pratista", *TBG*, 58, 493-527.
- Sedyawati, Edi, 1994. *Pengarcanaan Ganesa Masa Kediri Dan Singasari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian. Disertasi*, Jakarta : Universitas Indonesia

Refleksi Hasil Penelitian Arkeologi Islam Di Kalimantan Sampai Tahun 2005

Oleh: Bambang Sakti W.A.
(Balai Arkeologi Banjarmasin)

A. Pendahuluan

Operasional Balai Arkeologi Banjarmasin sudah eksis dan melaksanakan berbagai penelitian di Kalimantan sejak tahun 1994. Sampai tahun 2005, tercatat sudah lebih dari 80 kali penelitian arkeologi yang dilaksanakan di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pada saat ini sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Balai Arkeologi Banjarmasin adalah 9 orang sarjana arkeologi, 1 orang sarjana sejarah dan 1 orang tenaga administrasi. Dari jumlah tersebut 8 orang di antaranya tenaga fungsional peneliti. Ketiadaan tenaga teknisi merupakan kendala tersendiri karena pada saat penelitian dilaksanakan selalu harus meminjamnya dari instansi lain.

Penelitian arkeologi Islam sudah dirintis sejak tahun 1994 di Kalimantan Selatan, meskipun bersifat eksploratif. Pada tahun-tahun berikutnya dilaksanakan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Tema penelitian arkeologi Islam yang sudah dilaksanakan selama ini meliputi penelitian arsitektur makam di Kalimantan Timur dan Selatan sejak tahun 1999 - 2002, pusat Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan tahun 2004, pola tata kota kuna di Kalimantan Timur tahun 2004 dan Kalimantan Barat tahun 2006.

Tinggalan arkeologi Islam di Kalimantan selama ini cukup menarik untuk dikaji. Berdasarkan angka tahun yang terdapat pada sebagian tinggalan tersebut diketahui berasal dari abad ke -18 - 20. Meskipun tidak semua tinggalan dapat diketahui penanggalannya tetapi umumnya berasal dari masa tersebut. Berdasarkan tradisi, kerajaan Islam yang pernah ada sudah eksis sejak abad ke-16, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun tinggalan yang berangka tahun dari masa tersebut. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat hampir semua bangunan mempergunakan kayu sebagai bahan utama sehingga lebih cepat rusak dibandingkan batu.

Apabila melihat pada tinggalan arkeologi Islam di Kalimantan maka hampir semua daerah memiliki potensi yang cukup tinggi untuk diteliti kecuali Kalimantan Tengah. Hal tersebut berdampak pada banyaknya pemeluk agama Kristen dibandingkan Islam. Penyebaran agama Islam terbatas di daerah tepi pantai dan sepanjang Sungai Barito sedangkan di daerah pedalaman gerakan misionaris lebih kuat. Tingginya potensi kepurbakalaan Islam di Kalimantan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Islam di daerah tersebut. Hal tersebut tampak dari bangunan yang bernuansa Islam sejak ratusan tahun lalu.

B. Hasil Penelitian Arkeologi Islam Di Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah operasional Balai Arkeologi Bandung dan baru tahun 2005 secara resmi diserahkan pada Balai Arkeologi Banjarmasin. Sebelum tahun 1993, Bagian Proyek Penelitian Purbakala Banjarmasin telah melaksanakan penelitian arkeologi di Kabupaten Ketapang. Penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi sejumlah peninggalan zaman Islam, baik berupa masjid, istana, maupun makam. Masjid kuna terdapat di Desa Sutra, sedangkan istana terdapat di Kampung Dalam dan

Matan. Makam terdapat di berbagai tempat yaitu Kampung Dalam, Desa Sutra, Desa Pangkalan Buton, dan Desa Mulia Kerta.

Masjid kuna yang berada di Desa Sutra merupakan masjid kecil yang telah dipugar. Di halamannya terdapat dua buah meriam kuna dari besi yang sudah berkarat. Selain masjid, terdapat juga bekas istana Tengku Akil, yang sampai tahun 1993 masih dipergunakan sebagai tempat tinggal keturunan ke-7 Tengku Akil. Di dalam rumah tersebut terdapat sejumlah pusaka dari Kerajaan Siak antara lain genta kuningan dan pedang berhulu emas. Istana kedua yang berada di Matan, merupakan bekas istana Kerajaan Matan yang namanya pernah disebut dalam Kitab Negarakretagama. Istana tersebut terletak di tepi Sungai Pawan dan sudah dipugar. Sekarang bangunannya sudah dialihfungsikan menjadi museum dengan nama Museum Gusti M. Saunan (Hardiati, 1993 : 4-12).

Makam di Desa Sutra merupakan Kompleks Makam Tengku Akil yang merupakan kepala pemerintahan pertama di desa tersebut, serta sebuah makam di Dusun Tambak Rawang yang memiliki nisan tipe Demak sehingga diperkirakan sudah berusia cukup tua. Makam lain berada di Desa Pangkalan Buton terdiri dari dua kompleks yaitu Makam Tuk Mangku di Dusun Simpang Empat, dan Makam Raja Riau di sebuah kaki bukit. Makam yang berada di Kecamatan Matan tersebar di beberapa tempat yaitu Makam Kramat Tujuh di Dusun Muliakerta, Desa Muliakerta dan Keramat Sembilan di Dusun Negeri Baru, Desa Muliakerta. Hampir semua nisan di kedua kompleks makam tersebut memiliki tipe Troloyo di samping penamaannya yang mengadopsi makam-makam yang berada di Troloyo.

Di Pontianak terdapat kompleks istana dan masjid yang merupakan tinggalan Kerajaan Pontianak Qadariyah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, baik istana maupun masjid dibangun pada akhir abad ke-18 dan berada di tepian Sungai Kapuas. Istana nya merupakan bangunan cukup besar, terbuat dari kayu dan memiliki tiga lantai. Masjid yang dikenal dengan nama Masjid Jami Sultan

Abdurrahman berumur lebih tua daripada istana raja. Bangunan tersebut beratap tumpang tiga, gentingnya dari kayu sirap, pada bagian puncak berbentuk genta.

C. Hasil Penelitian Arkeologi Islam Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah penelitian arkeologi Islam secara khusus belum pernah dilaksanakan, tetapi masih digabung dengan penelitian bidang lain yang bersifat eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tinggalan arkeologi Islam di Kalimantan Tengah tidak sebanyak di wilayah Kalimantan yang lain. Tercatat peninggalan yang paling terkenal adalah masjid dan Istana Kotawaringin Barat yang dibangun sejaman dengan Kerajaan Banjar pada sekitar abad ke -17 Masehi. Masjid Kotawaringin Barat tersebut dikenal dengan nama Masjid Kyai Gede, mengikuti nama pendirinya seorang ulama dari Jawa yang menyebarkan agama Islam ke daerah tersebut. Masjid tersebut berdenah bujur sangkar, atap tumpang tiga, lantai dan dinding mempergunakan kayu ulin. Tiang pada bangunan tersebut berjumlah 36 terdiri dari 4 tiang utama, 12 tiang bulat mengelilingi tiang utama dan 20 tiang bulat mengelilingi dua deretan tiang di depannya (Anom, dkk, 1989/1999 : 94-95)

Pada tahun 2000 dilaksanakan penelitian arkeologi DAS Barito, difokuskan di dua kabupaten, yaitu Barito Selatan dan Kapuas. Peninggalan arkeologi Islam yang banyak berada di daerah Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur, yang pada masa lalu pernah menjadi wilayah Kerajaan Banjar. Di Desa Lampeong terdapat sebuah masjid yang menurut sejumlah nara sumber diperkirakan sudah berusia sekitar 125 tahun. Masjid tersebut dikenal dengan nama Al Musyahadah dan sampai dengan saat ini dianggap sebagai masjid paling tua di daerah Kecamatan Pematang Karau. Masjid tua lain terdapat di Desa Magantis yaitu Masjid Nurul Hikmah, yang

terletak di tepian Sungai Sirau. Selain itu masjid di Desa Matabu yang berasal dari awal abad ke-20 dan masjid di Desa Mambulau yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 1880 an.

Masjid-masjid tersebut hampir semuanya terdapat di DAS Barito yang sejak ratusan tahun lalu merupakan wilayah permukiman yang padat. Ada dua ciri yang tetap dipertahankan pada masjid-masjid kuna di daerah ini yaitu tiang utama yang berjumlah empat buah dengan salah satu tiang memiliki tangga melingkar yang dipergunakan untuk naik ke atas pada waktu mengumandangkan adzan. Kesamaan lain adalah makam-makam kuna di belakang yang seringkali dihubungkan dengan para pendiri masjid-masjid tersebut.

D. Penelitian Tataruang Kota Kuna Di Kalimantan Timur

Penelitian tataruang kota kuna di Kalimantan Timur tahun 2004 dilakukan di Tenggarong dan Pasir Balengkong. Tenggarong merupakan pusat Kerajaan Kutai Kartanegara, kini menjadi ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan Paser Balengkong merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Pasir dan kini menjadi sebuah kota kecamatan di Kabupaten Pasir. Secara geografis, Tenggarong terletak di pertemuan Sungai Tenggarong dengan Sungai Mahakam sehingga memiliki posisi sangat strategis karena berada di persimpangan lalulintas yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pantai. Hal inilah yang menyebabkan wilayah tersebut dipilih menjadi pusat kerajaan pada masa lalu. Alasan yang sama juga terjadi pada Paser Balengkong yang berada di tepi Sungai Kendilo, meskipun lokasinya tidak seramai Tenggarong.

Kota Tenggarong lama meliputi kompleks kraton, pasar yang sekarang menjadi lokasi pasar seni, pelabuhan, melebar ke sebelah utara meliputi Kampung Panji hingga Bukit Gunung Pedidi. Sebelah timur kraton terdapat Sungai Mahakam yang juga sebagai pembatas

kota sedangkan batas selatan kraton adalah Kampung Melayu. Pada sisi paling selatan terdapat sebuah bukit yang dipergunakan sebagai tempat untuk memakamkan seorang ulama Banjar. Secara keseluruhan wilayah kota kuna mencakup areal seluas 750 X 750 m. Kampung Melayu adalah tempat tinggal orang-orang Arab dan Melayu atau Banjar sedangkan Kampung Panji merupakan perkampungan para punggawa atau pegawai istana.

Seperti umumnya kraton pada masa Islam, kraton Tenggarong juga dikelilingi parit buatan sebagai batas antara lingkungan kraton dengan lingkungan masyarakat umum. Parit-parit tersebut mempunyai dua jalur keluar, yaitu ke Sungai Mahakam dan Sungai Tenggarong. Untuk parit yang mengelilingi lingkungan kraton jalur keluarnya ke Sungai Mahakam sedangkan parit yang berada di belakang kraton menuju Sungai Tenggarong. Parit tersebut ke arah utara bersambung dengan parit yang membujur dari barat-timur di sebelah utara kraton. Nampaknya parit tersebut mempunyai beberapa fungsi antara lain digunakan sebagai jalur transportasi, pertahanan, dan pengairan di sekitar kraton. Parit ini mempunyai lebar rata-rata 3 - 5 meter yang memungkinkan perahu ukuran kecil untuk melewatinya.

Bangunan kuna yang sampai dengan saat ini masih berdiri di Tenggarong antara lain istana, masjid, bangunan penginapan, dan gedung bioskop. Bangunan istana yang ada sekarang merupakan istana yang dibangun Belanda sekitar tahun 1935 sebagai pengganti istana lama yang terbakar. Istana tersebut dibuat dari beton dan kini difungsikan sebagai museum. Masjid berada di belakang istana, bangunan penginapan para pedagang berada di samping istana sedangkan bioskop terletak agak jauh di belakang istana. Pada masa lalu pasar berada di sebelah tenggara istana sedangkan pelabuhan berada di tepian Sungai Mahakam yang mengalir di depan istana.

Paser Balengkong yang pada masa lalu merupakan ibukota kerajaan, sekarang hanyalah sebuah kota kecil, ibukota kecamatan. Tataruang kota kuna menunjukkan bahwa konsentrasi bangunan

berada di sepanjang aliran Sungai Kendilo, berderet arah utara-selatan. Agak berbeda dengan kondisi di Tenggarong, bangunan yang ada di Kota Paser Balengkong tidak terlalu kompleks. Di kota tersebut hanya terdapat bangunan istana dan masjid yang berada dalam satu kompleks. Bangunan lain adalah pasar sebagai sentra perekonomian meskipun sekarang sudah merupakan bangunan baru, serta pelabuhan di depan istana. Di batas kota terdapat sebuah bangunan yang merupakan istana raja muda dan sebuah bangunan milik seorang saudagar kaya.

Sebagai sebuah kota kuna yang belum memiliki teknologi modern, sistem pertahanan menggunakan parit yang digali mengelilingi kota. Di sejumlah tempat sisa-sisa parit tersebut masih terlihat meskipun sebagian besar sudah menjadi bagian dari areal permukiman dan persawahan. Selain berfungsi sebagai sarana pertahanan, parit tersebut juga dipakai sebagai prasarana lalu lintas karena pada waktu itu belum ada jaringan jalan seperti sekarang ini. Nampaknya selain kedua fungsi tersebut parit juga dapat dikatakan sebagai batas lingkungan kota yang luasnya sekitar 800 X 600 m². Dibandingkan dengan kondisi pada masa lalu, kota tersebut sekarang sudah mengalami perluasan karena tuntutan kebutuhan ruang, baik untuk permukiman maupun pertokoan.

Penempatan berbagai bangunan di Tenggarong dan Paser Balengkong baik yang melayani kepentingan umum maupun tidak hampir semuanya berada di tepi jalan raya tradisional, yaitu parit kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa parit-parit keliling tersebut sangat penting artinya bagi masyarakat tradisional yang teknologinya belum memungkinkan untuk membuat jalan darat. Jalan darat yang saat ini berkembang di kedua kota tersebut keberadaannya belum lama, rata-rata baru muncul sekitar tahun 1970an. Dapat dikatakan bahwa sistem transportasi air tersebut melayani berbagai kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Struktur tata ruang kota di kedua tempat tersebut masih memiliki kelemahan, yang menunjukkan bahwa para penguasa di kedua tempat tersebut belum mampu mengatasi hambatan alam, terutama karena kemampuan teknologi yang belum memadai. Hal ini terlihat dari besaran kedua kota tersebut yang berukuran kurang dari 1 X 1 km. Di kedua kota tersebut hambatan alamnya relatif sama yaitu sungai yang lebar di depan kota serta kawasan rawa dan perbukitan di belakang kota. Sungai pada masa itu nampaknya hanya dimanfaatkan sebagai prasarana lalulintas saja karena tidak ada bukti perluasan kota di seberang sungai. Kawasan rawa dan perbukitan di belakang kota tidak dimanfaatkan sebagai wilayah hunian dan hanya berfungsi sebagai batas alam. Dengan demikian kawasan perkotaan pada kedua kota tersebut hanya terpusat di sepanjang satu sisi tepian sungai tanpa ada ekspansi keluar.

E. Penelitian Arsitektur Makam Kuna Di Kalimantan Timur Dan Selatan

Penelitian arsitektur makam dilaksanakan sejak tahun 1999-2002 di empat kabupaten provinsi Kalimantan Timur dan dua kabupaten wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Timur penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, Berau, Kutai Kartanegara, dan Pasir sedangkan di Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Secara keseluruhan terdapat 22 kompleks makam yang dapat dikategorikan sebagai situs makam kerajaan, tempat raja, keluarga kerajaan, ulama, maupun tokoh masyarakat dimakamkan. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut ; di daerah Kabupaten Bulungan terdapat 4 situs, Kabupaten Berau terdapat 3 situs, Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 4 situs, Kabupaten Pasir terdapat 4 situs, Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 6 situs, dan Kabupaten Kotabaru terdapat 1 situs. Di antara situs-situs tersebut sebagian masih terawat dengan baik karena adanya

ahli waris yang memelihara namun sisanya sudah tidak terawat. Ada komplek makam yang masih dipergunakan sebagai tempat pemakaman namun tidak sedikit yang sudah tidak dipergunakan lagi.

Ada empat variabel dalam penelitian arsitektur makam yakni tata letak, bahan jirat dan nisan, bentuk jirat dan nisan, serta ragam hias. Dalam buku “Metode Penelitian Arkeologi” yang diterbitkan oleh Puslit Arkenas tahun 1999 disebutkan sebagai analisis morfologi, analisis teknologi, analisis stilistik, dan analisis kontekstual (Truman dkk, 1999/2000 : 97-98) Berdasarkan letak geografisnya, kompleks makam didirikan di dataran rendah, namun ada pula yang didirikan di perbukitan. Sebagian di antaranya berada di lingkungan permukiman penduduk. Dalam hal tataletak, hampir semua makam dipisahkan dari makam yang lain dengan beberapa cara misalnya dipagari, ditinggikan, atau diletakkan tersendiri di dalam cungkup.

Dalam hal bahan yang dipergunakan untuk pembuatan jirat dan nisan sangat bervariasi, ada tujuh jenis bahan, yaitu kayu, batu alam, batu marmer, bata merah, logam, teraso, dan keramik. Bentuk nisan secara umum dibedakan atas bentuk gada untuk tokoh laki-laki dan pipih untuk tokoh perempuan. Bentuk gada terbagi menjadi empat variasi yaitu gada bulat, gada segi empat, gada segi enam, gada segi delapan sedangkan bentuk pipih terbagi menjadi dua variasi yaitu pipih kurawal dan pipih biasa. Ragam hias secara umum terdiri dari enam jenis yaitu geometris, flora, arabesk, kaligrafi arab, kaligrafi latin, dan huruf lontarak.

Salah satu hal yang dapat dikedepankan dari hasil penelitian arsitektur makam adalah penyebaran agama Islam di Kalimantan dilaksanakan oleh para ulama dari berbagai tempat. Dilihat dari bentuk nisannya, paling tidak terdapat tiga daerah sebagai asal mereka yaitu Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Ulama yang berasal dari Jawa ditunjukkan dari nisan yang bergaya Demak dan Troloyo. Selain itu ada sebagian nisan yang berinsripsi Jawa Kuna pada nisan baik

berupa aksara maupun angka, serta adanya formasi makam tujuh dan sembilan yang mirip dengan yang ditemukan di daerah Trowulan, Jawa Timur. Pengaruh dari Sulawesi nampak pada nisan bergaya Bugis dan Makassar berupa bentuk gada baik bulat maupun bersegi sedangkan dari Sumatera ditunjukkan dengan adanya makam yang dianggap sebagai makam Raja Riau dan langgam nisan bergaya Aceh di Kalimantan Timur dan Selatan.

F. Prospek Penelitian Ke Depan Serta Kendala Yang Dihadapi

Berdasarkan hasil penelitian arkeologi Islam yang sudah dilaksanakan selama ini belum banyak yang dapat diungkapkan karena baru menjangkau sebagian kecil wilayah operasional. Dengan demikian untuk pengembangan ke depan masih terdapat sejumlah permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian. Pada penelitian makam misalnya baru sebatas aspek bentuk arsitektural saja yang dikedepankan. Masih ada sejumlah masalah yang dapat dipakai untuk bahan penelitian lanjutan seperti kondisi sosial politik yang melatarbelakangi pemilihan tempat, daerah pembuatan jirat dan nisan, serta pengaruh antardaerah yang tercermin dalam bentuk-bentuk nisan. Apalagi ruang lingkup penelitian tentang makam tersebut pada beberapa waktu yang lalu masih terbatas di kawasan pesisir timur Kalimantan belum ke wilayah lain seperti pedalaman Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Sebagaimana diketahui masih sedikit buku yang menulis tentang kondisi sosial politik suatu kerajaan pada suatu masa tertentu yang dilandasi dengan temuan arkeologi di Kalimantan. Apabila penelitian kesejarahan yang didasarkan pada temuan arkeologi ini dilaksanakan akan dapat memberikan suatu sumbangan yang tidak kecil bagi perkembangan sejarah budaya suatu daerah, utamanya di Kalimantan. Sebagian besar penulisan didasarkan pada dongeng dan

legenda sehingga sangat sulit untuk membuktikan kebenaran suatu kasus. Dengan adanya penelitian arkeologi diharapkan penulisan sejarah menjadi lebih baik lagi, tetapi tentunya dalam pelaksanaannya harus juga melibatkan berbagai instansi dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu.

Di Kalimantan Selatan sendiri masih terdapat sejumlah tema penelitian yang dilaksanakan selain kajian terhadap makam, penelitian tentang sejarah Kerajaan Banjar yang didasarkan pada temuan arkeologi masih jauh dari sempurna. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya menghendaki suatu penelitian menyeluruh tentang eksistensi kerajaan tersebut terutama pada aspek di mana dan bagaimana bentuk istananya. Akan tetapi pelaksanaannya memang agak sulit. Balai Arkeologi Banjarmasin yang dimintai bantuan juga menghadapi berbagai kendala terutama tetapi karena dana dan personel yang kurang memadai dan pelaksanaannya yang tidak semudah seperti dibayangkan.

Tema penelitian lain yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan di Kalimantan Selatan adalah aspek arsitektur masjid, lokasi pusat-pusat kerajaan yang pernah ada, dan kajian naskah. Untuk penelitian yang terakhir ini tentunya akan lebih baik apabila melibatkan peneliti dari balai bahasa setempat. Penelitian lain yang juga dapat dikaitkan dengan arkeologi Islam adalah arsitektur rumah adat Banjar. Penelitian arsitektur rumah adat ini juga memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak lain, baik secara instansional misalnya Dinas Kimpraswil atau jurusan arsitektur, maupun secara perorangan dengan budayawan setempat yang memahami masalah tersebut.

Peninggalan yang berupa bangunan memiliki nilai tersendiri di bidang arsitektur, utamanya keragaman berbagai bentuk arsitekturalnya. Selain bentuk-bentuk lokal Kalimantan ternyata pada bangunan-bangunan tersebut terdapat juga unsur-unsur daerah lain dan unsur dari luar Indonesia. Sebagai contoh pada bangunan istana

terdapat berbagai gabungan bentuk lokal, daerah Kalimantan dan Bugis seperti istana raja di Berau. Di Tenggarong, istana kerajaan dibangun dengan mengadopsi arsitektur Barat. Pada sejumlah masjid, terdapat kubah yang mengadopsi langgam dari India dan Asia Barat. Kondisi makam agak berbeda karena “hanya” mempunyai bentuk-bentuk arsitektur makam Indonesia yaitu langgam Bugis-Makassar, Demak-Troloyo, dan Aceh, selain tentunya langgam lokal pada masyarakat umum.

Kawasan yang belum banyak tersentuh adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Di kedua wilayah tersebut masih sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai tema penelitian karena memang pada tema tema khusus belum tergarap dengan baik. Idealnya memang harus dimulai dari pengumpulan data di instansi lain yang berkaitan dengan hal tersebut sekaligus sebagai suatu penjajagan kerjasama antarinstansi pada masa mendatang. Setelah itu baru dilaksanakan penelitian eksploratif pada seluruh daerah kabupaten selanjutnya apabila memungkinkan baru dilaksanakan penelitian dengan tema-tema khusus.

Meskipun di Kalimantan Tengah potensi tinggalan arkeologi Islam nampaknya tidak sebanyak di wilayah yang lain namun kemungkinan untuk melakukan penelitian tetap terbuka. Di Kalimantan Tengah hanya terdapat satu kerajaan yang pernah berjaya yaitu Kotawaringin yang sekarang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Di kabupaten lain, data awal menunjukkan bahwa tidak ada kerajaan sehingga penelitian yang dapat dikembangkan adalah studi arsitektur masjid, karena studi perkotaan masa Islam hanya mungkin dilaksanakan di bekas perkotaan saja.

Provinsi Kalimantan Barat yang baru secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah kerja Balai Arkeologi Banjarmasin sejak tahun 2004, nampaknya memiliki potensi yang jauh lebih bagus daripada Kalimantan Tengah. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat pada

masa lalu banyak berdiri kerajaan Islam di wilayah tersebut. d berdasarkan pengamatan awal dapat dikatakan bahwa hampir setiap kabupaten merupakan bekas wilayah suatu kerajaan. Dengan demikian di wilayah tersebut dapat langsung dilaksanakan suatu penelitian dengan tema tertentu misalnya tatakota Islam, arsitektur masjid, atau arsitektur makam. Adanya sejumlah tulisan mengenai Kalimantan Barat, baik mengenai masalah sosial dan budaya, maupun sejarah yang sudah diterbitkan akan lebih mempermudah penelitian karena data awal dapat dicari dari buku-buku tersebut.

Secara kelembagaan di Pontianak juga terdapat unit pelayanan teknis (UPT) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST) yang dapat bertindak sebagai mitra dalam pelaksanaan penelitian. Mereka memiliki data mengenai sejarah di Kalimantan Barat yang dapat dipergunakan sebagai data pendukung dalam penelitian arkeologi. Pengetahuan mereka tentang kondisi sosial budaya Kalimantan Barat sangat mungkin untuk ditransfer menjadi bahan kajian yang cukup menarik. Di masa mendatang dapat saja dilaksanakan suatu kerjasama antara Balai Arkeologi dengan BKNST dalam suatu kegiatan bersama mengenai masalah penelitian, baik mengenai penelitian arkeologi maupun penelitian kesejarahan.

Sebagai suatu lembaga penelitian tentunya diperlukan tenaga peneliti yang cukup memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas berdasarkan analisis kepegawaian untuk Balai Arkeologi Banjarmasin paling tidak memerlukan 15 tenaga peneliti dan 10 tenaga administrasi. Jumlah tersebut diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik penelitian maupun penyebarluasan informasi, mengingat wilayah kerja yang meliputi seluruh Pulau Kalimantan atau hampir 4 kali luas Pulau Jawa. Pada kenyataannya, saat ini hanya memiliki 10 tenaga peneliti dan 1 tenaga administrasi. Kondisi ini dirasakan sangat menghambat berbagai kegiatan sehingga untuk menyelesaikan laporan penelitian

memerlukan waktu sekitar 4 sampai 5 bulan. Hal tersebut disebabkan para peneliti di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai peneliti juga harus melaksanakan pekerjaan administratif yang sangat menyita waktu.

Secara kualitas, dalam suatu lembaga penelitian idealnya terdapat peneliti dengan berbagai jenjang pendidikan, baik strata 1, strata 2 maupun strata 3. Akan tetapi pada kenyataannya di Balai Arkeologi Banjarmasin baru terdapat 2 orang S2 dan 8 orang S1. Meskipun demikian kondisi ini belum dirasakan sebagai suatu kendala karena penelitian dapat terus berlangsung, tentu saja analisis disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

Kendala lain yang dirasakan cukup berat adalah kondisi geografis Kalimantan yang banyak memiliki sungai dan rawa. Kondisi tersebut mengakibatkan cukup sulitnya perjalanan darat karena tidak setiap daerah dapat ditempuh dengan jalan darat. Untuk melaksanakan penelitian di Kalimantan Barat misalnya harus mempergunakan pesawat dari Banjarmasin - Jakarta - Pontianak, baru dilanjutkan ke situs. Tentunya hal ini memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu tempuh yang cukup lama apabila situs yang dituju jauh dari Pontianak. Demikian juga untuk perjalanan ke Kalimantan Timur selain Kabupaten Pasir harus ditempuh dengan beberapa kali berganti sarana angkutannya. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat, Malinau, Berau, dan Bulungan memerlukan waktu minimal 3 hari untuk sampai ke lokasi karena jarak yang cukup jauh dari Banjarmasin.

G. Penutup

Dari paparan di atas dapat disampaikan bahwa penelitian arkeologi Islam di Kalimantan sudah berjalan sejak awal berdirinya Balai Arkeologi Banjarmasin. Meskipun hasilnya belum optimal namun paling tidak sudah mampu memberikan sedikit sumbangan

baik untuk ilmu pengetahuan maupun masyarakat setempat. Pada awalnya aktivitas balai arkeologi kurang diketahui masyarakat sehingga hasilnya juga tidak diketahui. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyaknya publikasi, kegiatan seminar maka hasil penelitian arkeologi dapat lebih memasyarakat. Bahkan seringkali ada permintaan untuk melaksanakan ceramah tentang arkeologi baik oleh institusi pendidikan maupun yang lainnya.

Dalam hal penelitian arkeologi Islam nampaknya semakin tahun semakin baik karena bertambahnya tenaga peneliti. Namun demikian dalam satu tahun mungkin hanya dapat dilaksanakan satu atau dua kegiatan saja. Harapan yang muncul adalah pada masa mendatang hasil penelitian arkeologi Islam ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik masyarakat umum maupun lembaga pendidikan.***

Daftar Pustaka

- Sukendar, Haris, dkk. 1999/2000. *Metode Penelitian Arkeologi*. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Zein, Abdul Baqir, 1999. *Masjid-masjid Bersejarah di Indonesia*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hardiati, Endang Sri, 1993/1994. *Laporan Penelitian Arkeologi Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*. Banjarmasin : Bagian Proyek Penelitian Purbakala Banjarmasin.
- Daljoeni, N. ,1998. *Geografi Kota dan Desa (Edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Anom, I.G.N. dkk., 1998/1999. *Masjid Kuno Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simanjuntak, Truman, dkk., 2003. *Rancangan Induk Pusat Penelitian Arkeologi*. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi.

Masalah Penelitian Etnoarkeologi Gua-gua Penguburan Tradisional Di Kalimantan

Oleh: Bambang Sugiyanto (Balai Arkeologi Banjarmasin)

I. Pendahuluan

Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di wilayah negara kepulauan Republik Indonesia yang didiami oleh suku Dayak dan suku Banjar yang merupakan suku pribumi asli. Pada dasarnya antara suku Dayak dan suku Banjar itu sama, karena menurut para ahli, suku Banjar adalah suku Dayak yang telah memeluk agama Islam¹. Sebagai satu rumpun, tentunya suku Dayak dan suku Banjar sekarang banyak tersebar di Pulau Kalimantan dan mempunyai akar sejarah dan adat yang tidak berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, disebutkan bahwa nenek moyang suku Dayak dan Banjar adalah suku Deutro Melayu dan Proto Melayu yang datang ke Kalimantan sekitar 500 tahun sebelum Masehi². Selanjutnya kedua suku tersebut masuki Kalimantan melalui jembatan darat yang terbentuk pada masa glasial dari Semenanjung Malaysia.

Berdasarkan data arkeologi, suku Deutro Melayu dan Proto Melayu diketahui sebagai kelompok masyarakat yang membawa budaya megalitik yang tersebar luas di kepulauan Indonesia. Kebudayaan megalitik ini juga pernah berkembang pesat di wilayah Kalimantan Timur, terutama di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang, Kabupaten Malinau. Pada situs tersebut ditemukan

banyak kubur tempayan dolmen yang pernah digunakan sekitar abad ke-18 M. Kubur tempayan dolmen tersebut menurut Karina Arifin dan Bernard Sellato merupakan benda peninggalan dari suku Ngorek³. Selain kubur tempayan dolmen, juga banyak ditemukan data penguburan tradisional suku Dayak yang dilakukan di gua-gua atau ceruk alam. Tulisan ini akan membahas mengkaji etnoarkeologi penguburan tradisional yang dilakukan di gua dan ceruk yang ada di Kalimantan.

II. Penguburan

Penguburan merupakan salah satu kegiatan yang telah lama dikenal oleh manusia. Dari data arkeologi di Kalimantan diketahui bahwa kegiatan penguburan pertama ditemukan di situs Gua Niah (Serawak) yang diperkirakan berumur ± 40.000 tahun yang lalu. Sementara itu, untuk wilayah Indonesia, situs penguburan ditemukan antara lain di situs Gua Babi dan Gua Tengkorak (Tabalong), Liang Jon dan Gua Kebobo (Bengalon), serta beberapa gua prasejarah di Hulu Sungai Birang (Berau). Pada umumnya jenis penguburan yang ditemukan pada beberapa situs penguburan gua di atas berupa jenis penguburan primer (langsung) tanpa wadah, dengan posisi rangka terlipat atau telentang. Pada situs Gua Tengkorak ditemukan sisa penguburan dengan posisi mayat terlipat. Posisi yang sama juga ditemukan di Gua Kebobo dan gua di Hulu Sungai Birang. Di situs Gua Kebobo ditemukan sisa penguburan 2 individu yang terpisah (anak-anak dan dewasa). Sementara itu di situs Liang Jon ditemukan sisa penguburan dengan posisi mayat telentang dengan tulang tengkorak terpisah dari badannya.

Bukti adanya sisa penguburan dari masa prasejarah yang ditemukan di Gua Tengkorak (Muarauya, Tabalong) menunjukkan bahwa paling tidak sekitar 6.000 tahun yang lalu terdapat suatu kelompok masyarakat prasejarah yang pernah melakukan prosesi penguburan di situs tersebut. Menurut Widiyanto, berdasarkan pada

pengamatan morfologi diketahui bahwa kelompok yang menyelenggarakan prosesi penguburan itu adalah kelompok masyarakat Australomelanesid⁴. Prosesi penguburan yang pernah dilakukan di situs Gua Tengkorak ini tampaknya masih lebih muda jika dibandingkan dengan prosesi penguburan yang ditemukan di gua-gua di Pegunungan Marang, Bengalon, Kalimantan Timur⁵.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa data penguburan atau budaya prasejarah yang berhasil dikumpulkan dari bumi Kalimantan masih sangatlah sedikit sehingga masih banyak hal mengenai kehidupan dan kebudayaan masyarakat prasejarah yang belum terungkap. Tetapi data prasejarah yang sedikit itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengungkapkannya fenomena yang ada berkaitan dengan tradisi penguburan yang masih dilakukan oleh beberapa subsuku Dayak, terutama yang tinggal di daerah pedalaman.

Beberapa kegiatan penelitian eksploratif yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin, baik di wilayah Kalimantan Selatan, Tengah, Timur maupun Barat, seringkali menemukan atau mendapatkan informasi tentang adanya gua yang digunakan sebagai tempat penguburan. Gua-gua seperti ini pada umumnya oleh masyarakat sekitarnya disebut dengan Gua Tengkorak sehingga tidaklah mengherankan jika banyak terdapat gua dengan nama yang sama, yaitu Gua Tengkorak⁶. Sisa-sisa penguburan yang ada dalam gua-gua tersebut pada umumnya berupa satu atau lebih tulang tengkorak dan tulang-tulang manusia lainnya.

Sisa-sisa penguburan dalam gua ini pada umumnya merupakan jenis penguburan sekunder (Penguburan kedua). Berdasarkan wadah kubur yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : kelompok penguburan tanpa wadah kubur, kelompok penguburan dengan wadah kubur, dan kelompok gabungan kedua jenis penguburan tersebut. Kelompok pertama antara lain dapat dijumpai di situs Gua Tengkorak dan Gua Lutok (Kendilo, Batusopang, Pasir); Kelompok kedua dijumpai di situs Liang Tutui, Liang Balik I, dan

Liang Sawak (Dambungraya, Haruai, Tabalong), Ceruk Leokara (Patas, Buntok), Ceruk Lungun (Pengadan, Sangkulirang), dan Gua Lungun Aji Bawo (Muser, Batusopang); sementara kelompok ketiga dijumpai di situs Gua Malui (Dambungraya, Haruai, Tabalong).

Sisa-sisa penguburan tradisional yang terdapat di dalam gua dan ceruk tersebut di atas, sampai saat tulisan ini dibuat belum diketahui dengan pasti merupakan hasil kebudayaan siapa. Sisa penguburan tersebut jelas menunjukkan berasal dari masa sejarah bukan prasejarah. Berdasarkan hasil pengamatan tampaknya ada kemungkinan perilaku tersebut merupakan kelanjutan dari kehidupan manusia prasejarah yang pernah ada ribuan tahun yang lalu. Permasalahan yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan keberadaan situs-situs penguburan tersebut adalah :

1. Siapa masyarakat pendukung budaya penguburan di dalam gua?
2. Berdasarkan bentuk wadah kubur yang digunakan apakah ada hubungannya dengan salah satu subsuku Dayak tertentu?
3. Bagaimana hubungannya dengan budaya penguburan prasejarah yang pernah ada di beberapa situs prasejarah di Kalsel dan Kaltim?

III. Pembahasan

Pembahasan sistem penguburan yang ditemukan pada beberapa situs di atas akan dilakukan dengan pendekatan studi etnoarkeologi pada beberapa subsuku Dayak tertentu, seperti Suku Ngaju, Maanyan, Lawangan, Dea, Dusun, Tunjung, Benuaq, Kenyah, Iban, dan Punan. Memang tidak semua kegiatan penelitian etnoarkeologi ini dilakukan oleh penulis, ada beberapa data etnoarkeologi yang diambil dari literatur hasil penelitian etnoarkeologi yang dilakukan oleh orang lain. Sesuai dengan tujuan dari studi etnoarkeologi, diharapkan dari studi ini dihasilkan model yang bisa dipakai untuk menjelaskan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan data arkeologi. Jadi kajian etnoarkeologi dapat memberikan gambaran kemungkinan adanya persamaan antara gejala

budaya masa lampau dengan budaya masa kini, atau dapat digunakan sebagai argumentasi penghubung (*bridging argument*) dalam rangka uji hipotesis, model atau teori.

Studi etnoarkeologi tentang tradisi penguburan yang dilakukan oleh suku Ngaju di sekitar Kotawaringin Timur (Sampit) mendapatkan gambaran bahwa suku Ngaju sampai saat ini masih mempertahankan adat dan tradisi penguburan leluhur. Prosesi penguburan pertama (*primer*) dimulai dengan menguburkan si mati pada liang lahat yang telah disiapkan dengan mempergunakan wadah kubur berupa peti mati dari kayu. Peti mati tersebut biasanya dibentuk menyerupai bentuk perahu yang terdiri dari wadah dan tutup. Beberapa tahun kemudian (setelah semua perlengkapan dan biaya sudah disiapkan) akan dilakukan prosesi penguburan kedua (*sekunder*). Penguburan kedua ini dilakukan dengan menggali kubur dan memindahkan tulang-tulang si mati ke dalam wadah kubur berikutnya, yang disebut *sandung*⁷. Dari penelitian etnoarkeologi terhadap konsep kematian dan religi terhadap suku Maanyan memberikan gambaran bahwa suku Maanyan mempunyai kemiripan dengan suku Ngaju. Persamaan itu tampak pada tradisi penguburan yang mereka lakukan, yang disebut *upacara marabia dan mambatur*. Sementara dari penelitian terhadap suku Lawangan, Dea dan Dusun yang tinggal di wilayah Tabalong, Kalimantan Selatan diketahui bahwa mereka tampaknya mempunyai tradisi penguburan dengan upacara penguburan yang sering disebut *upacara wara*.

Untuk wilayah Kalimantan Timur, didapatkan gambaran bahwa hampir semua suku Dayak yang berdiam di wilayah tersebut sudah berpindah kepercayaan sebagai penganut agama Kristen atau Katolik. Perubahan kepercayaan tersebut tentunya membawa dampak yang cukup kuat terhadap kelangsungan adat tradisi penguburan leluhur. Bisa dikatakan hampir tidak ada lagi suku Dayak yang melakukan adat prosesi penguburan leluhur mereka, dan berganti dengan adat sesuai ajaran agama Kristen dan Katolik. Seperti suku

Kenyah yang sekarang bermukim di Desa Long Hubung, di Hulu Sungai Mahakam misalnya, 100 % sudah beralih menjadi penganut agama Kristen dan Katolik sejak tahun 1974. Mereka sudah tidak lagi melakukan adat penguburan warisan leluhur mereka, dan berganti dengan prosesi penguburan sesuai dengan ajaran agama mereka yang baru.

Proses penguburan yang dilakukan oleh sebagian besar suku Dayak di atas, baik yang penguburan primer ataupun sekunder hampir semuanya dilakukan pada lahan terbuka. Maksudnya, tempat yang digunakan untuk menempatkan wadah kubur itu merupakan lokasi penguburan umum yang berada di lahan khusus yang terbuka, tidak jauh dari pemukiman mereka. Mereka tidak pernah (tidak mengenal) melakukan penguburan sekunder dengan wadah kubur tertentu pada lubang-lubang di pegunungan kapur. Seperti yang diutarakan oleh para tetua adat Dayak Lawangan yang tinggal di sekitar situs Gua Malui, Liang Tutui dan Liang Balik, di Desa Dambungraya, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Beberapa variasi penguburan yang ditemukan pada ketiga situs tersebut tidak dikenal oleh mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa mereka seperti umumnya kelompok suku Dayak Lawangan, hanya mengenal satu jenis adat penguburan yaitu *upacara wara*.

Hal seperti ini juga terjadi pada beberapa situs gua penguburan tradisional lainnya, sehingga masih belum diketahui dengan pasti siapa atau kelompok masyarakat mana yang melakukan kegiatan penguburan tersebut. Sisa-sisa penguburan itu dapat dibedakan berdasarkan wadah kuburnya menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. kelompok yang tidak menggunakan wadah kubur (langsung) seperti yang terdapat di Gua Tengkorak, Gua Lutok, dan Gua Malui.
2. kelompok yang menggunakan wadah kubur ;
 - a. peti kayu kotak (Liang Sawak)
 - b. lungun (Gua Lungun Aji Bawo, Ceruk Lungun, Liang Tutui dan Liang Balik)

- c. keriring (Gua Malui dan Ceruk Leokara)
- d. tempayan keramik (Gua Malui)

Kelompok tradisi penguburan dalam gua yang langsung meletakkan tulang tengkorak dan beberapa tulang manusia lain, seperti yang terdapat pada situs Gua Tengkorak dan Gua Lutok (Batusopang, Pasir), merupakan jenis penguburan sekunder tanpa wadah. Lokasi situs gua ini berada di wilayah adat kelompok masyarakat Pasir yang sebagian besar sudah menganut agama Islam. Pada bagian selatan, tepatnya di perbukitan kapur di Desa Muser, juga terdapat gua penguburan tradisional yang dinamakan Gua Lungun Aji Bawo. Pada gua tersebut terdapat sisa-sisa lungun (peti mati kayu ulin yang berbentuk perahu) dari tokoh yang bernama Aji Bawo⁸.

Sementara itu, situs penguburan tradisional Gua Malui terdapat pada perbukitan kapur di wilayah pemukiman masyarakat suku Dayak Lawangan bersama dengan situs Liang Sawak, Liang Tutui, dan Liang Balik. Gua Malui merupakan sebuah situs penguburan tradisional yang sangat kompleks karena mempunyai 8 jenis penguburan antara lain:

1. empat buah tulang tengkorak manusia yang diletakkan berjajar pada tingkat dua ceruk dinding gua sisi barat laut, dengan ciri-ciri menunjuk pada ras Mongoloid.
2. dua buah tulang tengkorak manusia yang diletakkan berjajar pada tingkat satu ceruk dinding sisi barat laut, tepatnya di bawah kelompok pertama dengan ciri-ciri menunjuk pada ras Mongoloid.
3. sebuah tulang tengkorak manusia yang diletakkan pada tingkat dua dinding sisi tenggara, yang menunjukkan ciri-ciri ras Mongoloid.
4. dua buah tulang tengkorak pada tingkat satu ceruk dinding sisi

- tenggara, satu diletakkan di sisi baratdaya dan satunya di sisi timurlaut. Ciri-ciri juga menunjuk ras Mongoloid.
5. penguburan dengan *tebela* (peti mati) yang berada di dekat mulut gua. Di dalam *tebela* itu terdapat sejumlah tulang tengkorak dan tulang manusia lainnya dengan ciri-ciri ras Mongoloid.
 6. dua buah penguburan dengan tempayan keramik (*keriring*) yang menunjukkan ciri-ciri Mongoloid.
 7. sebuah penguburan yang menggunakan wadah kubur berupa tempayan keramik yang ditopang oleh empat tiang penyangga dari kayu ulin. Penguburan jenis ini biasa disebut dengan *teloh* yang diberi tutup sebuah piring keramik. Ciri-ciri juga ras Mongoloid.
 8. dua buah tulang tengkorak yang diletakkan pada sebuah ceruk yang agak dalam pada dinding sisi baratdaya bagian atas, tepatnya pada bagian lekukan dinding ceruk. Ciri-ciri menunjukkan ras Mongoloid (Kosasih, 1998).

Kelompok 1-4 dan kelompok ke 8 merupakan jenis penguburan yang sama, yaitu penguburan sekunder tanpa wadah dengan meletakkan langsung tulang tengkorak manusia pada tempat-tempat yang layak di dinding gua atau ceruk. Kebiasaan melakukan penguburan seperti ini juga ditemukan pada masyarakat di Minahasa, Sulawesi Selatan yang menguburkan tulang-tulang si mati pada lubang-lubang yang mereka buat pada dinding perbukitan atau pegunungan. Sementara jenis penguburan lain yang mempergunakan wadah kubur (*tebela*, *keriring*, *teloh*, *lungun*) menunjukkan adanya persamaan dengan penguburan yang sama pada lokasi penguburan terbuka lainnya. Pada umumnya pelaksanaan penguburan sekunder yang dilakukan oleh beberapa subsuku Dayak dilaksanakan pada lokasi penguburan terbuka (dataran) khusus, seperti yang dilakukan masyarakat Ngaju, Maanyan, dan Lawangan.

Pada umumnya kelompok masyarakat suku Dayak yang sekarang tidak banyak lagi yang mengenal jenis penguburan yang dilakukan dalam gua. Seperti yang dijelaskan oleh tetua adat masyarakat Lawangan yang menyatakan bahwa dia tidak tahu dengan adat penguburan yang terdapat di Gua Malui. Yang mereka tahu hanya satu upacara penguburan untuk kalangan masyarakat Lawangan, yaitu upacara *wara*. Hal yang agak sedikit berbeda didapatkan dari hasil informasi dari wawancara dengan tetua adat masyarakat Lawangan yang tinggal di Desa Bintang Ara (Patas, Buntok). Masyarakat Lawangan disini sangat yakin bahwa sisa penguburan yang terdapat pada sebuah ceruk yang dinamakan Ceruk Leokara, di tepi Sungai Ayu, merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu.

Sementara itu, informasi tentang penguburan dalam gua yang ditemukan di wilayah Kalimantan Timur, banyak berhubungan dengan suku Kenyah, Ngorek dan Punan. Seperti dilaporkan oleh Intan dkk bahwa salah satu suku Punan yang berdiam di hulu Sungai Sajau, Berau, Kalimantan Timur, masih mempertahankan kehidupan dari gua ke gua dengan mengandalkan pemenuhan kebutuhan makanan dari lingkungan alam sekitarnya (Intan, 1995). Masih perlu penelitian untuk memastikan kebenaran adanya hubungan yang erat antara suku Dayak dengan tradisi penguburan dalam gua atau ceruk.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa kegiatan penguburan yang ditemukan di dalam gua dan ceruk itu kemungkinan besar memang berhubungan dengan perkembangan salah satu atau beberapa subsuku Dayak yang berkembang dan bermukim di pedalaman Kalimantan. Kesimpulan ini didasarkan pada cara kehidupan suku Dayak yang *nomaden*, sering berpindah tempat mencari daerah baru yang lebih banyak menyediakan sumber bahan makanan. Sistem pertanian ladang berpindah dengan sesekali berburu binatang di hutan merupakan

faktor pendukung pergerakan kelompok masyarakat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kegiatan berpindah itu tidak dapat dilaksanakan secara serentak tetapi memerlukan waktu yang agak lama karena dilaksanakan secara bertahap. Ada kelompok pertama yang bertugas membuka lahan, membuat rumah tinggal sementara dan menyiapkan bahan baku yang diperlukan. Setelah semua siap, baru menyusul gelombang kedua, ketiga dan seterusnya pergi meninggalkan kampung lama menuju ke kampung baru yang lebih menjanjikan. Dalam proses perpindahan tersebut, tidak jarang terjadi kecelakaan atau musibah yang mengakibatkan kematian dari anggota kelompok. Kemungkinan besar kondisi daruratlah yang memaksa mereka untuk melakukan proses penguburan pada tempat-tempat yang mereka temukan di sepanjang perjalanan tersebut. Salah satu tempat yang paling memungkinkan adalah gua dan ceruk, yang siap digunakan saat itu juga. Pemilihan gua dan ceruk sebagai tempat penguburan itu kemungkinan juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti : adanya ketakutan tentang adanya pencurian tulang tengkorak oleh beberapa kelompok suku tertentu, untuk dipergunakan sebagai benda keramat dalam pelaksanaan upacara adat; dan karena letaknya yang cukup sulit dijangkau, sehingga merupakan tempat yang aman untuk menghindari pencurian tersebut.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya terdapat *benang merah* yang menghubungkan antara data prasejarah, data penguburan tradisional, dan data sejarah. Data sejarah sampai saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya suku Dayak meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari daratan Cina seperti yang dikisahkan dalam legenda suku Dayak Kenyah. Menurut legenda itu nenek moyang mereka berasal dari daratan Asia, propinsi Yunan, daerah selatan Gurun Gobi di Cina Selatan, yang pindah ke daratan Kalimantan sekitar abad ke-14 SM. Memang terdapat banyak

kesamaan antara masyarakat Yunan dan Dayak, baik dalam pola kehidupan, kesenian, kebudayaan, dan juga bentuk morfologi fisik manusianya. Sementara itu menurut sejumlah ahli seperti Coomans, MacKinnon dan Sellato, suku Dayak adalah imigran dari Yunan (dalam Lahajir, 2002). Kelompok imigran yang pertama kali masuk adalah kelompok ras Negrid dan Weddid serta ras Australoid. Selanjutnya adalah kelompok imigran Melayu yang datang sekitar tahun 3000 - 1500 SM. Kelompok imigran terakhir adalah kelompok yang masuk sekitar 500 SM.

Ada banyak versi tentang kelompok-kelompok suku tersebut, Riwut (1958) menyatakan bahwa orang Dayak terdiri dari 12 suku dan setiap sukunya terdiri dari tujuh subsuku⁹. Sementara itu, Kennedy membagi Dayak menjadi enam kelompok besar, yaitu : Kenyah-Kayan-Bahau, Ngaju, Dayak Darat, Klementan-Murut, Iban dan Punan. Menurut Lahajir, pada mulanya semua subsuku tersebut di atas adalah bagian dari kelompok yang sama. Proses geografis dan demografi yang berlangsung selama lebih dari seribu tahun, telah membuat kelompok besar ini terpecah-pecah. Kalau diperhatikan dengan lebih cermat, masih nampak beberapa kesamaan yang diakibatkan oleh asal - usul yang sama, yaitu dari propinsi Yunan¹⁰. Sejumlah kesamaan itu antara lain : bahwa mereka tinggal di rumah-rumah panjang, menggunakan parang (mandau), menggunakan manik-manik dalam ritual-ritual adat, melakukan pertanian dengan sistem ladang berpindah, dan dalam pertunjukan tarian ritual mereka.

Persamaan-persamaan itulah yang kemungkinan besar mendasari adanya tradisi penguburan yang dilakukan pada gua-gua atau ceruk yang terdapat di sekitar lokasi perkampungan mereka. Pemilihan gua dan ceruk sebagai lokasi penguburan itu kemungkinan besar dilakukan untuk menghindari adanya pencurian tulang tengkorak yang dulu sering terjadi. Tulang-tulang tengkorak itu memang menjadi barang keramat yang mempunyai peran penting

dalam pelaksanaan upacara adat ritual hampir semua suku Dayak. Bahkan ada informasi di pedalaman Kalimantan Timur, akibat ketakutan akan tindakan pencurian tulang tengkorak yang sering terjadi, suatu kelompok masyarakat terpaksa mengambil kembali tulang tengkorak anggota kelompok yang telah mati dan membungkusnya dengan kain untuk kemudian menenggelamkannya dalam sebuah lubang di dasar sungai. * * *

Endnotes

¹ Istilah “dayak” bukan merupakan sebutan lokal yang dikenal oleh para penduduk asli di pedalaman Kalimantan. Istilah itu muncul dari kalangan Belanda untuk menyebut kelompok suku asli yang masih mempertahankan adat serta religi lama. Sementara anggota suku dayak yang telah beragama Islam kemudian lebih dikenal dengan suku Banjar.

² Lihat Michael Coomans dalam bukunya *Manusia Daya : Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta : P.T. Gramedia. 1987.

³ Suku Ngorek merupakan pecahan dari suku Dayak Kenyah yang menurut sejarahnya berasal dari daratan Cina, masuk ke wilayah Serawak di daerah sekitar Sungai Iwan dan kemudian berkembang luas di wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Apo Kayan).

⁴ Lihat Harry Widiyanto dan Retno Handini dalam

⁵ Berdasarkan informasi sementara dari Michael Chazine yang melakukan penelitian gua-gua prasejarah di Pegunungan Marang, dikatakan bahwa sisa-sisa penguburan yang ditemukan di Gua Kebobo dan Liang Jon kemungkinan besar sejaman dengan keberadaan lukisan dinding gua yang banyak terdapat di lokasi itu. Menurut Chazine, lukisan dinding gua itu mempunyai umur sekitar 10.000 tahun yang lalu.

⁶ Gua yang didalamnya terdapat sisa-sisa penguburan seperti tulang tengkorak dan tulang-tulang manusia lainnya seringkali dinamakan dengan Gua Tengkorak oleh masyarakat sekitar. Hal seperti ini sangat lazim terjadi di wilayah Kalimantan Timur.

⁷ Sandung adalah wadah kubur penguburan kedua suku Ngaju, yang biasanya berbentuk rumah-rumahan kecil yang didirikan dengan ditopang satu atau lebih papan kayu. Biasanya didirikan di pinggir sungai dengan arah hadap

ke hilir sungai. Sandung ini dilengkapi dengan sanggaran, sapundu, pantar dan lainnya.

⁸ Aji Bawo adalah tokoh legenda yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai cikal bakal masyarakat Pasir sekarang.

⁹ Klasifikasinya terdiri dari dua belas suku, yaitu : gugus Ngaju terdiri dari empat kelompok yang bernama Ngaju, Maanyan, Lawangan, dan Dusun. Gugus Apo Kayan terdiri dari Kenyah, Kayan, dan Bahau. Gugus Iban, gugus Klementan terdiri dari Klementan dan Ketungan. Gugus Murut terdiri dari Idaan/Dusun, Tidung, dan Murut. Gugus Punan terdiri dari Basap, Punan, dan Ot, serta Gugus Ot Danum.

¹⁰ Kecuali orang Punan yang memang lebih nomadik daripada subsuku Dayak lainnya dan tidak tinggal dalam rumah panjang.

Daftar Pustaka

- Arifin, Karina dan Bernard Sellato. 1999, "Survei dan Penyelidikan Arkeologi di Empat Kecamatan di Pedalaman Kalimantan Timur (Long Pujungan, Kerayan, Malinau, dan Kayan Hulu)", dalam Bernard Sellato dan Cristina Eghenter (penyunting). *Kebudayaan Dan Pelestarian Alam : Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan*, hlm. 397-436.
- Arifin, Karina. 1999, "Penelitian Etnoarkeologi Terhadap Praktek Penguburan Kedua dan Tipe Monumennya di Kayan Mentarang", dalam Cristina Eghenter dan Bernard Sellato (Penyunting). *Kebudayaan Dan Pelestarian Alam : Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan*, hlm 437-464.
- Intan, M. Fadhlan S., Arfian, dan Rokhus D Awe. 1995, "Punan Benau : Masyarakat Tradisional di Hulu Sungai Sajau, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur", *Laporan Penelitian Arkeologi Bidang Arkeometri*, Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, belum terbit.

- Jatmiko, Nasrudin dan Bambang Sugiyanto. 2004, "Eksplorasi Situs Gua dan Ceruk Hunian Prasejarah di Pegunungan Marang, Kutai Timur, Kalimantan Timur", *Laporan Penelitian Arkeologi Kerjasama Penelitian Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional dan CREDO-CNRS, Maison Asie-Pasifique, Marseille France*, belum terbit.
- Kosasih, E. A. Dan Bagyo Prasetyo. 1995/1996, "Survei Gua-gua di Pegunungan Muller, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur", *Laporan Penelitian Arkeologi*, Banjarmasin : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- Lahajir. 2001, *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Lingang*. Yogyakarta : Galang Press.
- Maunati, Yekti. 2004, *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta : LKIS.
- Montana, Suwedi dkk. 1996, "Survei Eksploratif Arkeologi di Kalimantan Timur" *Laporan Penelitian Arkeologi*, Banjarmasin : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- Nitihaminoto, Gunadi dan Bambang Sakti W. A. 1998, "Survei Eksploratif DAS Barito Tahap I, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah", *Laporan Hasil Penelitian Arkeologi*, Banjarmasin : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- Pritchard, E. E. Evans. 1984, *Teori-teori Tentang Agama Primitif*. Ludjito (terjemahan), Yogyakarta : PLP2M.
- Praseyo, Bagyo dan Harry Widiyanto. 1994/1995, "Survei Eksploratif Situs-situs Prasejarah di Wilayah Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan", *Laporan Hasil Penelitian Arkeologi*, Banjarmasin : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
-
- _____. 1996/1997, "Laporan Survei Prasejarah di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan", *Laporan Hasil Penelitian Arkeologi*, Banjarmasin : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.

- Sugiyanto, Bambang. 2000, "Prospek Penelitian Gua-gua di Kalimantan" dalam *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi*, Bedugul, Bali 14-18 Juli, hlm 174-187.
- . 2003, "Survei Eksploratif Gua-gua Prasejarah di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan", *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- . 2004, "Penelitian Gua Prasejarah di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur" dalam, *Berita Penelitian Arkeologi No. 14*. Banjarbaru : Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Sulistiyanto, Bambang. 2001, "Konsep Kematian dan Penguburan Masyarakat Dayak Lawangan di Desa Dambung Raya, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong", *Laporan Penelitian Arkeologi*, Banjarbaru : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- Riwut, Nila (ed.,). 1994, *Kalimantan Membangun – Alam dan Kebudayaan* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Riwut, Tjilik dan Sanaman Mantikei. Penyunting Dra. Nila Riwut. 2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangkaraya : Penerbit Pusakalima.
- Wasita. 2005, "Penelitian Sistem Penguburan Pada Masyarakat Dayak Lawangan di Barito Selatan", *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru : Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- Yondri, Lutfi. 1996, "Temuan Awal Tinggalan Seni Lukis Gua/ Ceruk di Wilayah Indonesia Barat" dalam *Journal Penelitian Arkeologi Bandung No. 3/April/1996*, Bandung : Balai Arkeologi Bandung.

Evaluasi Dan Pengembangan Program Tematik Di Balai Arkeologi Yogyakarta

Oleh: Baskoro Daru Tjahjono (Balai Arkeologi Yogyakarta)

I. Program Penelitian Tematik

Penelitian menjadi jiwa dan dasar kelembagaan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Selama penelitian arkeologi dibutuhkan, selama itu pula eksistensi lembaga ini terjamin. Oleh sebab itu penelitian merupakan kata yang tidak terpisahkan dari lembaga ini dan menjadi landasan filosofis bagi setiap kiprahnya. Menghilangkan fungsi penelitian berarti menghilangkan eksistensi lembaga Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas).

Penelitian arkeologi memiliki dimensi luas, di satu sisi diarahkan pada kepentingan akademis yaitu untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Di sisi lain penelitian harus dapat memenuhi kepentingan ideologis. Puslit Arkenas dituntut berperan dalam mengembangkan kebudayaan nasional, mencerdaskan bangsa, dan memperkokoh jati diri bangsa, seperti telah diamanatkan dalam UUD 1945. Pada sisi lain, penelitian arkeologi harus dapat bermuara pada kepentingan praktis, yaitu pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian untuk kepentingan akademis sering disebut penelitian murni, sementara untuk kepentingan lainnya disebut penelitian terapan.

Untuk mencapai tugas-tugas tersebut penelitian arkeologi menggunakan pendekatan holistik, tematik, dan kewilayahan. Holistik dalam arti mengamati setiap gejala yang timbul yang dapat

mempengaruhi kehidupan manusia, budaya, dan lingkungannya untuk dapat memberi pemahaman terhadap kehidupan masa lampau. Dalam konteks itu maka penelitian dilaksanakan secara multidisiplin dan transdisiplin dengan melibatkan ilmu-ilmu terkait atau ilmu-ilmu dasar sesuai kebutuhan. Tematis artinya penelitian berdasarkan pada permasalahan (*problem oriented*) yang dapat bermuara pada tiga tujuan utama penelitian arkeologi, yaitu rekonstruksi sejarah budaya, rekonstruksi cara-cara hidup, dan menggambarkan proses perubahan budaya (RIPAN, 2004: 33-35).

Rencana Induk Penelitian Arkeologi Nasional (RIPAN) yang dibidani oleh Puslit Arkenas tahun 2004 merupakan acuan bagi setiap perencanaan program penelitian di lingkungan Puslitarkenas beserta jajarannya, Balai Arkeologi (Balar) di seluruh Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam kata pengantarnya yang menyatakan bahwa RIPAN dibuat sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban suatu kegiatan penelitian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka buku itu disusun dan dikembangkan, tidak lagi sekedar pedoman manajerial kegiatan tetapi jauh lebih lengkap karena membahas landasan keberadaan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan misinya. Oleh sebab itu, dari sudut substansi buku itu lebih tepat disebut Buku Putih Arkeologi. Melalui prinsip-prinsip dasar ini maka penyimpangan-penyimpangan dapat dihindari dan seluruh kegiatan dapat terarah untuk pencapaian visi kelembagaan.

RIPAN yang merujuk pada hasil EHPA 1993 di Kaliurang telah menetapkan 5 tema utama sebagai acuan penelitian. Tetapi 5 tema utama yang masih abstrak itu dijabarkan ke dalam tema-tema besar yang merupakan program penelitian tematik kemudian diimplementasikan ke dalam program penelitian yang operasional. Sejak ditetapkannya RIPAN semestinya setiap perencanaan program penelitian di lingkungan Puslitarkenas sudah mengacu pada panduan tersebut.

II. Program Penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta

Balai Arkeologi Yogyakarta tak lepas dari pasang surut dalam merancang, menetapkan, dan melaksanakan program-program penelitiannya. Dulu ketika program-program penelitian masih berorientasi kepada data artefak (*artifact oriented*) dan situs (*site oriented*) maka penelitian mengenai bentuk-bentuk dan fungsi artefak atau situs banyak dilakukan para peneliti. Perencanaan program penelitian didasarkan pada minat dan kemampuan masing-masing peneliti. Program penelitian semacam ini telah berlangsung sejak berdirinya Balar Yogyakarta tahun 1976 yang kala itu bernama Proyek Penelitian dan Penggalian Purbakala Yogyakarta sampai menjadi Balai Arkeologi Yogyakarta tahun 1990. Permasalahan utama kegiatan penelitian arkeologi di Balar Yogyakarta adalah miskinnya paradigma yang digunakan sebagai orientasi penyusunan program-programnya. Hal ini disebabkan belum tersedianya arah kebijakan penelitian arkeologi yang berlaku nasional, eksplisit, dan lengkap yang seharusnya dimiliki Puslit Arkenas selaku lembaga pusat yang memiliki tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan, membina, dan melaksanakan penelitian arkeologi nasional (Bambang Sulistyanto, 1993: 5). Karena belum tersedianya arah kebijakan penelitian arkeologi yang berlaku nasional secara eksplisit dan lengkap dengan pedoman implementasinya maka program-program penelitian di Balar Yogyakarta cenderung lebih berorientasi pada minat dan kemampuan individual.

Ketika model-model penelitian tidak berorientasi lagi pada data artefak atau situs melainkan telah beralih pada data kewilayahan maka program penelitian mengacu kepada tema-tema tertentu yang menarik minat para peneliti. Maka tema-tema yang didasarkan pada isu-isu kewilayahan atau kawasan menjadi topik utama penelitian di Balar Yogyakarta. Model penelitian tematik kewilayahan ini mulai dikembangkan di Balar Yogyakarta sekitar tahun 1991.

Tetapi tidak lama setelah itu – sekitar tahun 1998 – model perencanaan program penelitian berkembang lagi tidak hanya mengacu pada tema-tema kawasan melainkan para peneliti diberi kebebasan untuk mengembangkan minatnya, baik yang berorientasi pada kewilayahan maupun artefak atau situs. Para peneliti diberi kebebasan untuk memilih topik penelitian mereka masing-masing.

Perencanaan program-program penelitian di Balar Yogyakarta baik yang berorientasi pada data artefak atau situs maupun yang berorientasi pada tema kewilayahan kebanyakan masih didasarkan pada minat pribadi para peneliti sehingga hasil penelitiannya sulit diintegrasikan karena masih bersifat parsial. Hal ini disebabkan belum ada buku panduan perencanaan penelitian dari Puslit Arkenas yang dapat menjadi pedoman bersama. Di Balar Yogyakarta dan mungkin juga di Balar lain, terdapat 2 jenis program penelitian, yaitu program terencana dan program insidental. Program terencana disusun setiap akhir tahun anggaran dan diajukan ke Puslit Arkenas. Tidak setiap program penelitian yang diajukan dapat dilaksanakan, tergantung dari proses seleksi di Puslit Arkenas. Program penelitian insidental disusun berdasarkan pada laporan-laporan penemuan situs-situs baru oleh instansi terkait maupun masyarakat (Hidayat dkk., 1993: 5-6).

Jadi sejak tahun 1991, Balar Yogyakarta sebenarnya sudah mengembangkan program penelitian tematik. Namun program-program penelitian tematik ini belum terintegrasi dengan program penelitian di Puslit Arkenas. Selain itu program-program penelitian juga masih mengacu pada kepentingan akademik semata yang didasarkan pada minat pribadi para peneliti dan belum mengacu pada kepentingan daerah maupun nasional. Program-program penelitian tematik yang pernah dikembangkan Balar Yogyakarta antara lain:

Bidang Studi	Program Kegiatan
1. Arkeologi Prasejarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pola Pemanfaatan Lahan Guab. Pemanfaatan Sumberdaya Alam di Kawasan Pegunungan Seribu c. Sistem Sosial pada Akhir Masa Prasejarah d. Pola Permukiman di Dataran Aluvial Pantai Selatan Pulau Jawa e. Teknologi Alat batu
2. Arkeologi Klasik	<ul style="list-style-type: none"> a. Seni Bangun Majapahit b. Permukiman di Lingkungan Candi c. Budaya Marginal pada Masa Klasik di Jawa Tengah Bagian Baratdaya
3. Arkeologi Islam	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasang Naik dan Pasang Surut Kota-kota Pesisir Utara Jawa Tengah dan Jawa Timur b. Perkembangan Paleografi Islam c. Arsitektur Benteng Kolonial di Jawa d. Permukiman dan Jalur Transportasi di Pedalaman Jawa Bagian Selatan pada Masa Mataram Islam
4. Etnoarkeologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian Demografi pada Satuan Arkeologi Hunian Ruang Mikro di Situs Medowo Jawa Timur b. Hubungan antara Pakaian Dengan Stratifikasi Sosial Masa Klasik c. Pola Pakai-Buang Gerabah pada Situs Pakauman d. Upacara Penghormatan Leluhur pada Masa Klasik e. Penelitian Etnobiologi pada Relief Candi
5. Arkeometri	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanggalan Radiokarbon terhadap Tinggalan Candi dan Habitasi Terkait di Jawa b. Pola Perolehan Makanan Manusia Penghuni Gua di Jawa Timur c. Lingkungan Biotik Candi

III. Evaluasi Program Tematik

Dulu Puslit Arkenas belum mempunyai panduan yang berskala nasional sehingga program-program penelitian di lingkungan Puslit Arkenas beserta jajarannya belum mempunyai arah yang jelas dan masih bersifat parsial berupa ranting-ranting yang terpisah dari batangnya. Sejak tahun 2004, Puslit Arkenas sudah mempunyai buku panduan yang jelas berupa RIPAN. Dengan adanya RIPAN ini tentunya diharapkan program-program penelitiannya menjadi lebih terarah, jelas, dan hasilnya menjadi lebih konkrit dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan berbagai kepentingan.

Program penelitian tematik yang telah dicanangkan dalam RIPAN tentunya harus segera diberlakukan sejak ditetapkannya. RIPAN menjadi acuan dan pedoman bagi penelitian-penelitian di Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi di seluruh Indonesia. Penelitian yang menggunakan strategi model pohon akan menggantikan strategi penelitian model ranting yang terkesan parsial dan cenderung menekankan kegiatan pengumpulan data lapangan saja (RIPAN, 2004: 38). Dalam strategi model pohon ini penelitian dirancang dalam tema besar yang mencakup seluruh proses penelitian hingga pemasyarakatan produk-produknya. Tema besar itu disimbolkan sebagai batang pohon sedangkan penelitian berbagai aspek tema disimbolkan sebagai cabang dan rantingnya.

Tetapi kenyataannya buku panduan itu belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tema-tema besar yang diharapkan merupakan masukan dari balar-balar ke Puslitbang Arkenas (*bottom-up*) pada kenyataannya belum berjalan. Tahun 2005 ternyata Puslitbang Arkenas telah menetapkan tema religi (*top-down*) untuk setiap penelitian di balar-balar. Sementara balar-balar sudah terlanjur mengajukan program-program penelitiannya yang sebagian besar tidak

sesuai dengan tema tersebut. Maka tema yang sudah ditetapkan oleh Puslitbang Arkenas tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Mengapa hal tersebut terjadi? Apakah karena sosialisasi yang kurang? Mungkin tidak, sosialisasi sudah jalan tetapi belum ada perhatian ke arah itu. Atau mungkin belum ada juklak-juknisnya sehingga para pembuat program penelitian masih ragu-ragu untuk melangkah sesuai panduan. Atau apakah karena dulu yang menyusun RIPAN adalah Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional – sekarang menjadi Puslitbang Arkenas – maka RIPAN menjadi tidak berlaku lagi? Tentunya tidak demikian, apapun nama lembaganya (karena sering ganti nama) RIPAN tetap berlaku. Sebenarnya kalau sejak awal Puslitbang Arkenas mempunyai panduan semacam ini, maka jika terjadi gejolak perubahan kelembagaan di tingkat lebih atas (departemen) yang berakibat juga pada lingkungan Puslitbang Arkenas, perubahan itu tidak akan berpengaruh banyak bagi kelembagaan Puslitbang Arkenas.

Bagaimana menyikapi hal ini, apakah RIPAN yang telah dipersiapkan cukup lama dan memerlukan energi serta dana yang besar hanya akan menjadi sederetan buku yang dipajang dipergustakaan atautkah akan menjadi pondasi yang kuat bagi perencanaan program penelitian dan pengembangan arkeologi nasional ke depan?

IV. Pengembangan Program Tematik

Program penelitian tematik yang telah ditetapkan oleh Puslitbang Arkenas untuk memandu kegiatan penelitian di lingkungan Puslitbang Arkenas dan balar-balarnya sudah tepat dan bagus. Dengan program penelitian tematik maka setiap kegiatan penelitian akan diarahkan ke tema-tema penelitian yang telah ditetapkan bersama. Namun permasalahan yang masih mengganjal adalah pada implementasinya. Mulai dari menetapkan tema-tema besar yang diharapkan merupakan usulan dari balar-balar, diolah di

Puslitbang Arkenas, lalu dikembalikan ke balar-balar untuk diimplementasikan menjadi program-program penelitian yang terarah belum dijalankan sepenuhnya. Sehingga buku RIPAN yang tebal itu belum menjadi bermakna dan belum dapat menjadi acuan bagi setiap kegiatan penelitian di lingkungan Puslitbang Arkenas.

Sebagaimana tertuang dalam RIPAN, perencanaan setiap tema penelitian akan disusun secara periodik, yang setiap periodenya ditargetkan memberikan hasil yang konkrit baik dalam skala regional, nasional, maupun global. Satu periode ditetapkan lima tahun sehingga setiap lima tahun penelitian Puslitbang Arkenas akan menyodorkan hasil-hasil penelitian dari tema-tema besar yang telah dilaksanakan. Penelitian terhadap suatu tema besar tidak harus berhenti pada lima tahun pertama, tetapi terbuka kemungkinan hingga tahun kedua (jangka menengah), atau bahkan lima tahun ketiga (jangka panjang). Dalam hal ini pengujian yang matang terhadap perencanaan tema besar sangat dipentingkan untuk mengarahkan penelitian pada hasil-hasil konkrit dan optimal.

Permasalahannya apakah selalu demikian, setiap tema penelitian dapat dibatasi oleh waktu lima tahun, sepuluh tahun, atau lima belas tahun? Tema-tema penelitian tidaklah statis melainkan dinamis mengikuti perkembangan jamannya. Tema-tema tertentu mungkin hanya diminati atau berlaku pada masa-masa tertentu saja, sehingga tema-tema penelitian harus selalu diperbaharui. Selain itu kemungkinan juga tema-tema tertentu hanya dapat dikembangkan di suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu pengembangan program-program penelitian tematik sangat diperlukan, jangan hanya terpaku pada tema-tema yang telah ditetapkan saja. Puslitbang Arkenas bisa saja menetapkan tema-tema tertentu dalam satu periode yang wajib dilaksanakan oleh balar-balar. Program penelitian tematik yang telah ditentukan itu kemudian menjadi program penelitian kelembagaan Puslitbang Arkenas. Program-program penelitian tematik ini bisa berskala global, nasional, maupun regional. Untuk program

penelitian yang berskala regional perlu sinergi dengan balar-balar di daerah masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih. Namun pada kenyataannya sinergi itu juga belum berjalan dengan baik.

Untuk mengantisipasi perkembangan jaman yang saat ini bergerak dengan cepat perlu juga dikembangkan tema-tema penelitian aktual, yang mungkin hanya sesaat dan tidak memerlukan waktu panjang. Tema-tema penelitian jenis ini kemungkinan bisa dikembangkan oleh balar-balar berkaitan dengan pembangunan atau perkembangan di daerah-daerah yang merupakan wilayah kerja masing-masing balar. Keberadaan sumberdaya arkeologi merupakan salah satu aset budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan apabila makna, keberadaan, dan nilai-nilai yang terkandung pada sumberdaya arkeologi tersebut dapat diungkap. Makna keberadaan sumberdaya arkeologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan ekonomi, penguatan jati diri, media apresiasi budaya, keagamaan, maupun sebagai simbol/ citra daerah (Hidayat, 2000: 256). Maka dalam hal ini, balar-balar dapat mengembangkan penelitian tematik yang berkaitan dengan pembangunan di wilayahnya. Program ini merupakan program kelembagaan masing-masing balar. Selain itu, untuk menampung aspirasi dan minat masing-masing peneliti baik di lingkungan Puslitbang Arkenas maupun di lingkungan balar perlu dikembangkan program penelitian tematik. Dengan demikian hasrat meneliti para peneliti sesuai dengan minat dan kemampuannya juga terpuaskan.***

Daftar Pustaka

- Anonim, *Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional*, Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional, Jakarta, 2004.
- Bambang Sulistyanto, 1993, Penyelenggaraan Penelitian di Balai arkeologi Yogyakarta pada PJPT I: Suatu Upaya Retrospeksi dalam *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi 1993*, Yogyakarta, 25 - 30 Juli 1993. Yogyakarta : Balai Arkeologi Yogyakarta
- Muhammad Hidayat dkk., 1993, Program Penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta pada PJPT I, dalam *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi 1993*, Yogyakarta, 25 - 30 Juli 1993. Yogyakarta : Balai Arkeologi Yogyakarta.
- _____, 2000, Pemanfaatan Penelitian Arkeologi bagi Pembangunan Daerah dalam *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, Bedugul, 14-17 Juli 2000*, Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian Arkeologi Jakarta.

Studi Arkeolinguistik Sebagai Upaya Pengungkapan Proses Migrasi Puak-puak Di Wilayah Kerja Balai Arkeologi Medan

Kasus Persebaran Puak-puak Batak di Padang Lawas,
Tapanuli Selatan

Oleh: Ery Soedewo (Balai Arkeologi Medan)

I. Pendahuluan

I.1. Arkeologi-Epigrafi-Sejarah-Linguistik

Studi arkeolinguistik merupakan salah satu kajian terapan dalam bidang arkeologi. Seperti halnya studi etnoarkeologi maupun studi arkeologi lingkungan, studi arkeolinguistik juga memanfaatkan bidang studi lainnya sebagai alat untuk memecahkan permasalahan arkeologi. Hal yang membedakan antara kajian-kajian terapan dalam arkeologi itu adalah objek kajian serta metodologinya. Jika etnoarkeologi memanfaatkan hasil penelitian etnografi -salah satunya- untuk dijadikan sebagai bahan analogi bagi kasus-kasus arkeologi, dan arkeologi lingkungan memanfaatkan pendekatan ilmu alam khususnya lingkungan (*environment*), maka arkeolinguistik memanfaatkan hasil maupun metodologi linguistik bagi pemecahan masalah-masalah arkeologi. Salah satu permasalahan arkeologi khususnya di Indonesia -yang juga dijadikan sebagai salah satu bagian

dari arah kebijakan serta arah pengembangan penelitian arkeologi Indonesia- adalah: proses serta aliran migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dan keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak.

Sejarah kebudayaan suatu bangsa dapat pula dijelaskan melalui studi tentang *loan words* (kata-kata serapan). Dalam hal ini Christopher Ehret (1976:16 dalam Montana, 1989:197) menganggap *loan words* sebagai bukti linguistik yang erat kaitannya dengan penelitian sejarah dan arkeologi. Dia mengatakan bahwa: *linguistic evidence, in the form of loan words can show the appearance of new ideas and things of course of history, course of society and indicate their sources; and if preserfeable material culture is involfed, the sam things and their directions of spread will show up in the archaeological records well.*

Hingga kini sebenarnya telah banyak pakar arkeologi yang memanfaatkan hasil penelitian linguistik sebagai salah satu alat untuk memecahkan masalah-masalah arkeologi. Khusus di Indonesia hal tersebut telah tampak -bahkan- sejak sebelum berdirinya Lembaga Purbakala pada 1913 (Montana, 1989:192). Salah satu contoh dari hal tersebut adalah dalam hal pengungkapan banyaknya leksikon (kosakata) adopsi/ peminjaman/ serapan dari bahasa-bahasa non-Austronesia (Melayu-Polinesia). Sebagaimana diketahui bahasa-bahasa di kepulauan Nusantara sebagian besar dapat dimasukkan ke dalam rumpun bahasa Austronesia.

Kecenderungan untuk menyerap kata-kata dari bahasa lain didorong oleh berbagai faktor. Faktor pertama, banyak peristiwa peminjaman terjadi karena bahasa peminjam tidak mempunyai kata-kata sendiri untuk menggambarkan benda atau gagasan asing yang diperkenalkan atau diimpor melalui pelbagai jenis kontak (Gonda, 1991:49). Kedua, bahasa asing dapat membantu seseorang untuk memahami secara lebih cermat dan meyakinkan, untuk mencari ungkapan yang lebih sesuai dan berbobot dalam mengungkapkan nuansa dan perbedaan halus yang tidak atau dirasakan tidak mampu untuk diungkapkan dengan kata-kata dalam bahasanya sendiri

(Gonda, 1991:50). Ketiga, tidak jarang ditemukan contoh kata-kata pinjaman yang mengarah pada kemudahan, keringkasan, dan kehematan (Gonda, 1991:50). Selain ketiga hal tersebut adalah kenyataan -sebagaimana diketahui orang banyak- bahwa kata-kata asing seringkali dianggap lebih adab (Gonda, 1991:51).

Hal-hal tersebut tampak pada bagaimana bahasa-bahasa Nusantara menyerap bahasa Sanskerta. Sampainya unsur-unsur Sanskerta ke pelosok-pelosok Nusantara (termasuk Kepulauan Filipina) sangat berbeda dengan masuknya unsur-unsur tersebut ke negeri-negeri Indo-Cina yang berdekatan; penerimaannya berlangsung melalui jalur yang sangat berbeda dan hasil peminjaman itu begitu berbeda. Contohnya, ternyata dari 175 kata dalam bahasa Tagalog yang dikumpulkan oleh Kern dalam daftar kata pinjaman Tagalog dari bahasa Sanskerta juga dikenal dalam bahasa Melayu sedangkan sebagian besar sisanya terwakili dalam bahasa Jawa Kuno (Kern, 1880:251 dalam Gonda 1991:53). Sementara 100 kata dalam bahasa Bisaya yang sebagian besar ada dalam bahasa Tagalog, juga terdapat dalam bahasa Melayu, Gayo serta Aceh di Sumatera, dalam bahasa Sunda, dan sebagainya. Sementara unsur-unsur India yang sering muncul dalam bahasa Campa ternyata terdapat juga dalam sebagian besar kata-kata Melayu yang dipinjam dari bahasa Sanskerta (Gonda, 1991:53).

Apa yang lazim disebut peminjaman/penyerapan budaya atau peminjaman ekstern biasanya hampir merupakan proses sepihak, yakni masyarakat yang lebih “unggul” menempatkan istilah-istilah khusus dalam bidang seni dan ilmu, perniagaan dan administrasi, teknik dan mode, untuk dipergunakan oleh masyarakat yang lebih “rendah” (Gonda, 1991:53–54). Namun, bila diteliti lebih cermat, peminjaman merupakan proses timbal balik, seperti tampak pada contoh berikut: kata *kamper* atau *kapur barus* (Inggris: *champer*) sebagai produk alam Nusantara yang terkenal diserap oleh beberapa bahasa asing non-Austronesia. Dalam bahasa Arab kata itu disebut

kāfur yang kemudian menjadi *camfre*, *champur* dan sebagainya dalam bahasa-bahasa Eropa (Gonda, 1991:55).

Selain dari segi leksikon yang terutama mengkaji penyerapan kosa kata, kajian linguistik mengambil peran yang menentukan berkaitan dengan kritik sumber, terutama bagaimana melihat perbedaan bahasa prasasti yang dipergunakan oleh suatu prasasti maupun dalam sekelompok prasasti (Prasodjo, 1998:108). Kemungkinan penerapan kajian bahasa seperti ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan kritik sumber, seperti misalnya penentuan prasasti otentik dan tinulad berdasarkan kajian linguistik (Prasodjo, 1998:108).

Studi tentang persebaran bahasa yang dikaitkan dengan persebaran dan asal-usul kelompok-kelompok masyarakat sudah pernah dicoba Collin Renfrew (1987) yang mengamati keterkaitan tinggalan arkeologi, bahasa, dan asal-usul masyarakat Indo-Eropa (Prasodjo, 1998:108).

I.2. Permasalahan

Berkaitan dengan persebaran puak-puak di wilayah Sumatera bagian utara, hingga saat ini kajian arkeologi-historis yang telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan belum memberikan jawaban yang memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya data arkeologi yang berhasil dihimpun sehingga secara otomatis berimbas kepada minimnya hasil analisis yang dapat dihubungkan secara langsung dengan masalah persebaran puak-puak di daerah Sumatera bagian utara. Senada dengan data arkeologi, ternyata data historis yang ada di daerah tersebut boleh dikata juga minim, walaupun ada sifatnya masih meragukan sebab sebagian besar berupa hikayat-hikayat atau tarombo-tarombo yang seringkali kabur titimangsanya.

Kemacetan tersebut tentunya memerlukan pemecahan dengan pendekatan serta metode baru, dalam hal ini penulis menawarkan kajian linguistik. Dalam linguistik terdapat suatu metode terapan

yang dapat digunakan untuk menentukan kala secara relatif, yakni kala pisah antara satu bahasa dari bahasa lainnya. Asumsi yang mendasari dipilihnya metode tersebut adalah: seiring dengan berpisahannya kelompok-kelompok masyarakat, dan terjadinya kontak antar kelompok-kelompok masyarakat yang mengakibatkan terjadinya kontak budaya, yang salah satunya tercermin pula melalui perubahan bahasa. Salah satu penyebab perubahan bahasa adalah terjadinya pinjam-meminjam antar bahasa, antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Demikian halnya dengan masyarakat penutur bahasa proto-Toba dan Mandailing yang dahulu merupakan suatu bahasa yang satu namun seiring terjadinya kontak antara sebagian puak-puak Batak yang telah bermigrasi ke selatan dengan kelompok masyarakat lain, mungkin telah mengakibatkan terbentuknya suatu dialek bahasa baru. Hal itulah yang akan dibahas pada kesempatan ini, sebagai salah satu jalan untuk dapat mengungkapkan salah satu aspek migrasi puak-puak di Sumatera bagian utara, yakni aspek waktu.

II. Metodologi

Aspek bahasa yang paling cocok untuk dijadikan bahan studi perbandingan adalah *bentuk*. Pada kenyataan, struktur formal bahasa-bahasa tidak banyak menimbulkan masalah dalam perbandingan jika dibandingkan dengan struktur makna. Kaidah-kaidah mengenai kekerabatan antarbahasa dapat dirumuskan secara meyakinkan dengan mempergunakan kesamaan-kesamaan bentuk yang telah diselidiki dan dipelajari secara sistematis (Keraf, 1984:33).

Jadi dengan demikian bahasa mana pun di bumi ini secara teoritis dapat menjadi objek perbandingan. Tiap bahasa di dunia memiliki ciri-ciri kesemestaan (*universal*) tertentu. Kesemestaan bahasa itu mencakup:

1. bentuk dan makna. Tiap bahasa memiliki bentuk-bentuk tertentu

yang dikaitkan dengan maknanya yang khas untuk memudahkan referensi;

2. tiap bahasa memiliki perangkat unit fungsional yang terkecil yaitu *fonem* dan *morfem*;
3. tiap bahasa memiliki kelas-kelas teretntu, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti orang, dan kata bilangan.

Lingusitik bandingan historis hanya mempergunakan kesamaan bentuk dan makna sebagai cerminan dari sejarah warisan yang sama. Bahasa-bahasa kerabat yang berasal dari bahasa proto yang sama selalu akan memperlihatkan kesamaan-kesamaan berikut (Keraf,1984:34):

1. kesamaan sistem bunyi (fonetik) dan susuna bunyi (fonologis);
2. kesamaan morfologis, yaitu kesamaan dalam bentuk kata dan kesamaan dalam bentuk gramatikal;
3. kesamaan sintaksis, yaitu kesamaan relasi antara kata-kata dalam suatu kalimat.

Salah satu cara dalam menentukan pengelompokan serta waktu pisah bahasa-bahasa kerabat adalah *Leksikostatistik* yang secara salah kaprah seringkali disamakan dengan *Glotokronologi*. Secara umum dapat dikatakan bahwa:

1. Leksikostatistik adalah suatu teknik dalam pengelompokan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan peneropongan kata-kata (leksikon) secara statistik, untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan prosentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa lain.
2. Glotokronologi adalah suatu teknik dalam linguistik historis yang berusaha mengadakan pengelompokan dengan lebih mengutamakan perhitungan waktu (*time depth*) atau perhitungan usia bahasa-bahasa kerabat. Dalam hal ini usia bahasa tidak dihitung secara mutlak dalam suatu tahun tertentu, tetapi

dihitung secara umum, misalnya mempergunakan satuan ribuan tahun (*millenium*).

Pada kenyataannya kedua bidang itu seringkali dipakai secara bersamaan, karena untuk menentukan usia bahasa dengan teknik glotokronologi harus dipergunakan leksikostatistik. Sebaliknya untuk membuat pengelompokan bahasa dengan metode leksikostatistik tersirat juga masalah waktu, yang menjadikan landasan bagi pengelompokan itu. Oleh sebab itu maka pengelompokan bahasa-bahasa berdasarkan usia bahasa, dipakai kedua istilah itu dengan pengertian yang sama. Jadi, *leksikostatistik* atau *glotokronolgi* dapat didefinisikan sebagai: suatu teknik yang berusaha menemukan keterangan-keterangan (data) untuk suatu tingkat waktu yang agak tua dalam bahasa guna menentuikan usia bahasa dan pengelompokan bahasa-bahasa (Keraf,1984:122).

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap berbagai bahasa, akhirnya diperoleh empat macam asumsi dasar yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam usaha mencari jawaban mengenai usia bahasa, atau secara tepatnya bilamana terjadi diferensiasi antara dua bahasa atau lebih. Asumsi-asumsi dasar tersebut adalah (Keraf,1984:123 – 125):

1. Sebagian dari kosa kata suatu bahasa sukar sekali berubah jika dibandingkan dengan bagian lainnya. Kosa kata yang sukar sekali berubah dimaksud adalah kosa kata dasar (perbendaharaan kata dasar atau *basic vocabulary*). Kosa kata dasar merupakan kata-kata yang sangat intim dalam kehidupan bahasa, sekaligus merupakan unsur-unsur yang menentukan hidup matinya suatu bahasa. Kosa kata dasar dimaksud meliputi:
 - a. kata-kata ganti;
 - b. kata-kata bilangan;
 - c. kata-kata tentang anggota badan (dan sifat atau aktivitasnya);
 - d. alam dan sekitarnya: udara, langit, air, gunung, dan sebagainya beserta sifat atau aktivitasnya;

- e. alat-alat perlengkapan sehari-hari yang sudah ada sejak permulaan: tongkat, pisau, rumah, dan sebagainya.

Morrish Swades mengusulkan sekitar 200 kosa kata dasar yang dianggapnya universal, artinya bisa terdapat pada semua bahasa di dunia.

2. Retensi (ketahanan) kosa kata dasar adalah konstan sepanjang masa. Asumsi dasar kedua ini mengungkapkan bahwa dari kosa kata dasar yang ada dalam suatu bahasa, prosentase tertentu selalu akan bertahan dalam 1000 tahun. Kalau asumsi ini diterima, maka implikasinya adalah dari 200 kosa kata dasar yang dimiliki suatu bahasa, dalam 1000 tahun akan bertahan sekian persen, dan sisanya sesudah 1000 tahun kemudian akan bertahan lagi persentase yang sama.
3. Perubahan kosa kata dasar pada semua bahasa adalah sama. Asumsi ketiga ini telah diuji dalam 13 bahasa, di antaranya ada yang memiliki naskah-naskah tertulis. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam tiap 1000 tahun, kosa kata dasar suatu bahasa bertahan antara 86,4 % – 74,4 %, atau dengan angka rata-rata 80,5 %.
4. Bila persentase dari dua bahasa kerabat (*cognate*) diketahui, maka dapat dihitung waktu pisah kedua bahasa kerabat. Asumsi dasar keempat ini merupakan konsekuensi logis dari asumsi dasar kedua dan ketiga. Asumsi ini berlaku dengan syarat bahwa tidak ada hal-hal yang memperlambat atau mempercepat pemisahan, misalnya karena penaklukan atau bentuk kontak sosial yang lain. Penaklukan suatu masyarakat bahasa oleh suatu bangsa lain dapat mempercepat perubahan, bila bangsa penakluk memaksa bangsa taklukan untuk mempergunakan bahasa penakluknya.

Untuk menerapkan keempat asumsi dasar di atas, maka perlu diambil langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah tersebut

sekaligus merupakan teknik dalam metode leksikostatistik. Langkah-langkah dimaksud adalah:

1. mengumpulkan kosa kata dasar bahasa kerabat;
2. menetapkan pasangan-pasangan mana dari kedua bahasa tertentu adalah kata kerabat (*cognate*);
3. menghitung waktu pisah kedua bahasa;
4. menghitung jangka kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang lebih tepat.

Keempat prosedur tersebut akan diterapkan dalam kajian ini untuk menentukan kala pisahnya.

III. Analisis

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan berkaitan dengan topik bahasan.

III.1. Daftar Kosa Kata Dasar

Hal pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan kosa kata dasar. Kosa kata dasar yang dikumpulkan terdiri dari 200 kata berdasarkan daftar yang disusun oleh Swadesh, ditambah 99 kata berdasarkan daftar yang disusun oleh Prof. DR. N.H. Kern. Daftar kata oleh Kern ditambahkan sebab memuat kata-kata yang dianggap ada sejak penyebaran bahasa-bahasa Austronesia. Tabel ini (lihat lampiran) merupakan daftar 299 kata dari kedua bahasa yang dijadikan bahan kajian, yakni bahasa Toba dan bahasa Mandailing.

III.2. Menghitung Kata Kerabat

Langkah kedua dalam analisis teknik leksikostatistik ini adalah menghitung kata kerabat. Untuk menetapkan kata-kata kerabat (*cognates*) dari kedua bahasa yang diselidiki, maka perlu diperhatikan prosedur-prosedur berikut ini (Keraf, 1984:127–133):

a) **Gloss yang tidak diperhitungkan.** Pertama-tama wajib dikeluarkan *gloss* yang tidak akan diperhitungkan dalam penetapan kata kerabat atau non-kerabat. *Gloss* yang tidak diperhitungkan itu adalah *kata-kata kosong*, yaitu *gloss* yang tidak ada katanya baik dalam salah satu bahasa maupun dalam kedua bahasa. Kedua, wajib dikeluarkan semua kata pinjaman baik dari bahasa-bahasa kerabat maupun dari bahasa non-kerabat. Misal kata *es* dan *salju* dalam bahasa Melayu jelas merupakan kata pinjaman dari bahasa nonkerabat. Ketiga, kata-kata jadian pada suatu kata benda atau mengenai suatu kata benda memperlihatkan bahwa kata itu bukan kata dasar. Misalnya adalah kata *matahari* dalam bahasa Melayu, atau *panon* 'mata' dalam bahasa Sunda jelas bukan kata dasar; oleh karena itu harus diperhitungkan sebagai *nol*. Keempat, bila dalam *gloss* ada dua kata yang sama, yang satu merupakan kata dasar dan lain kata jadian dengan dasar yang sama, maka *gloss* untuk kata dasar yang diperhitungkan, sedangkan kata jadiannya tidak diperhitungkan. Misalnya untuk *gloss* 'path' dalam bahasa Inggris diberikan kata 'jalan' dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk *gloss* 'to walk' diperoleh kata 'berjalan'. Maka dalam hal ini hanya untuk *gloss* 'path' yang dipakai sedangkan untuk *gloss* 'to walk' dianggap kosong.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka beberapa *gloss* yang wajib dikeluarkan dari daftar tersebut dan tidak akan diperhitungkan untuk penetapan kata kerabat atau nonkerabat. Pertama yang dikeluarkan adalah *gloss* yang tidak ada katanya baik dalam salah satu bahasa maupun dalam kedua bahasa. *Gloss* itu adalah bangau, baring, beberapa, binatang, busur, gurita, hiu, kasar, laba-laba, layar, musim kemarau, panah, pari, penyu, perisai, tanduk, tombak, dan tuna. *Gloss* kategori kedua yang juga dikeluarkan dari daftar tersebut dan tidak akan diperhitungkan untuk penetapan kata kerabat atau

nonkerabat adalah semua kata pinjaman baik dari bahasa-bahasa kerabat maupun nonkerabat. *Gloss* itu adalah: pikir (adopsi dari kata *fikr* dalam bahasa Arab), mate (adopsi dari kata *pati* dalam bahasa Sanskerta, kata asli dalam bahasa-bahasa austronesianya adalah *tiwas* atau *tewas*) dan lisa (adopsi dari kata *lisa* dalam bahasa Sanskerta). Ketiga adalah kata-kata jadian pada suatu kata benda atau mengenai suatu kata benda memperlihatkan bahwa kata itu bukan kata dasar. *Gloss* yang dikeluarkan dari kategori ketiga ini adalah kata mataniJari dan ombarnijabu. Keempat adalah bila dalam *gloss* ada dua kata yang sama, yang satu merupakan kata dasar dan lain kata jadian dengan dasar yang sama, maka *gloss* untuk kata dasar yang diperhitungkan, sedangkan kata jadiannya tidak diperhitungkan. Kata yang termasuk kategori keempat ini adalah mardalan.

Selain keempat kriteria tersebut, penulis juga tidak memasukkan beberapa *gloss* karena beberapa pertimbangan, yakni: adanya kesamaan makna (ditinjau secara semantik) dari dua kata berbeda seperti kata buluh dan bambu, serta enau dan lontar, sebab masing-masing dari kata tersebut sebenarnya merujuk pada satu benda saja. Munculnya kedua kata dengan makna yang sama dalam daftar *gloss* tersebut terjadi karena penulis menggunakan daftar yang disusun oleh Swadesh dan Kern, sehingga muncullah keadaan tersebut.

b) Pengisolasian morfem terikat.

Bila dalam data yang telah dikumpulkan terdapat morfem-morfem terikat, maka sebelum mengadakan perbandingan untuk mendapatkan kata-kata kerabat atau non-kerabat, semua morfem terikat itu harus diisolir terlebih dahulu. Misalnya untuk *gloss* 'give' dalam bahasa Indonesia 'memberi', harus

diisolasi morfem terikatnya sehingga yang dibandingkan nanti adalah bentuk dasarnya 'beri'. Untuk mudahnya pada waktu mencatat kata itu dapat langsung dilakukan isolasi dengan mencatatnya sebagai: *beri (mem)*.

c) Penetapan kata kerabat

Jika kedua prosedur di atas telah dilakukan, baru dimulai perbandingan antara pasangan-pasangan kata dalam kedua bahasa yang akan dibandingkan, untuk menentukan apakah pasangan itu berkerabat atau tidak. Kata-kata yang sama dalam suatu pasangan akan dinyatakan sebagai kata kerabat, sedangkan yang berbeda akan dinyatakan sebagai kata yang non-kerabat.

III.3. Menghitung Waktu Pisah

Waktu pisah antara dua bahasa kerabat yang telah diketahui prosentase kata kerabatnya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Keraf, 1984:130–131):

$$W = \frac{\log. C}{2 \log. r}$$

W = waktu perpisahan dalam ribuan (millenium) tahun yang lalu; r = retensi atau persentase konstan dalam 1000 tahun (lihat (Keraf,1984:123 – 125, khususnya poin 3 tentang asumsi dasar bilamana terjadi diferensiasi antara dua bahasa atau lebih), atau disebut juga *indeks*; C = persentase kata kerabat; log = logaritma dari.

Sebelum menerapkan rumus tersebut untuk mengetahui waktu pisah antara bahasa Toba dan bahasa Mandailing, maka harus diketahui terlebih dahulu beberapa hal berikut: pertama adalah jumlah pasangan lengkap dari kata-kata kedua bahasa

tersebut yang didasarkan atas daftar kata Swadesh dan Kern, dikurangi beberapa kata berdasarkan prosedur 'a' Gloss yang tidak diperhitungkan- adalah sebanyak 270 kata. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa sebanyak 190 kata adalah kata kerabat, atau bila diprosentasekan berarti sebesar 70 %. Setelah diketahui poin-poin tersebut berikut ini adalah penerapannya dalam rumus dimaksud.

$$W = \frac{\log. 0,70}{2 \log. 0,805} \quad W = \frac{-0,357}{2 \times -0,217} \quad W = \frac{0,357}{0,434}$$

$$W = 0,822$$

Hasil tersebut menunjukkan waktu pisah dalam ribuan tahun sehingga untuk mengubahnya menjadi tahun biasa maka hasil akhir itu dikalikan dengan 1000 yang menghasilkan angka 822. Jadi berdasarkan perhitungan waktu pisah tersebut, bahasa Toba dan bahasa Mandailing terpisah pada 822 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain hasil perhitungan waktu pisah bahasa Toba dan bahasa Mandailing dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. bahasa Toba dan bahasa Mandailing diperkirakan merupakan satu bahasa tunggal sekitar 822 tahun yang lalu;
- b. bahasa Toba dan bahasa Mandailing diperkirakan mulai berpisah dari suatu bahasa proto kira-kira abad ke-9 Masehi.

Namun, mustahil bahwa perpisahan antara dua bahasa terjadi dalam suatu waktu tertentu, yaitu 822 tahun lalu, tetapi harus terjadi berangsur-angsur, maka harus ditetapkan suatu jangka waktu perpisahan itu terjadi. Untuk maksud tersebut harus diadakan perhitungan tertentu untuk menghindari kesalahan semacam itu. Sebab itu masih diperlukan teknik statistik di bawah ini.

III.4. Menghitung Jangka Kesalahan

Cara yang jamak dipergunakan untuk menghindari kesalahan dalam statistik adalah memberi suatu perkiraan bahwa suatu hal terjadi bukan dalam kurun tertentu, tetapi dalam rentang waktu tertentu. Dalam rentang waktu itu terjadi akumulasi perbedaan-perbedaan antara kedua bahasa yang dibandingkan, yang dari hari ke hari bertambah besar, sehingga perlahan-lahan tetapi pasti menandai perpisahan antara kedua bahasa tersebut (Keraf,1984:131).

Dalam metode statistik dikembangkan cara tertentu untuk menghitung janka kesalahan yang mungkin timbul dalam perhitungan tersebut. Jangka kesalahan itu biasanya dibuat untuk tiga asumsi yang berbeda:

1. ketepatan perhitungan diperkirakan berkisar sekitar 68 % dari kebenaran, atau untuk mudahnya dikatakan 0,7 mengandung kebenaran;
2. ketepatan perhitungan dapat diperkirakan 90 % atau 0,9 dari kebenaran;
3. kebenaran diperkirakan 50 % atau 0,5 dari keadaan yang sebenarnya.

Untuk menghitung jangka kesalahan biasanya dipergunakan kesalahan standar, yaitu 70 % dari kebenaran yang diperkirakan. Kesalahan standar diperhitungkan dengan rumus berikut (Keraf,1984:132):

$$S = \rho \frac{C(1-C)}{n}$$

S = kesalahan standar dalam persentase kata kerabat; C = persentase kata kerabat; n = jumlah kata yang dibandingkan (baik kerabat maupun non-kerabat). Penghitungannya dapat dilakukan dengan mengikuti urutan berikut:

- 1) 1 dikurangi C;
- 2) C dikalikan dengan hasil dari (1);
- 3) Hasil dari (2) dibagi dengan n;
- 4) Menarik akar atas hasil dari (3);
- 5) Hasil dari (4) merupakan jangka kesalahan dari prosentase kata kerabat atas dasar 0,7 adalah perkiraan mengenai kebenaran sesungguhnya.

Setelah diperoleh hasilnya, maka harus dilakukan perhitungan kesalahan standar dalam tahun, dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- 1) jangka kesalahan dari prosentase kerabat no (4) ditambahkan dengan C;
- 2) jumlah dalam (1) diperlakukan sebagai C baru, yang akan dimasukkan dalam rumus perhitungan waktu;
- 3) perhitungan waktu yang baru sebagaimana diperoleh dalam (2) dikurangi dengan jumlah waktu yang pertama (lihat III.3 / waktu pisah). Angka yang baru ini ditambah dan dikurangi dengan angka yang pertama (III.3) untuk memperoleh jangka kesalahan atas dasar 0,7 dari keadaan sebelumnya.

Jika rumus di atas diterapkan dalam bahasa Toba dan bahasa Mandailing, maka kesalahan standar bagi kedua bahasa itu adalah:

$$S = \rho \frac{0,70 (1-0,70)}{270} \quad S = \rho \frac{0,70 (1-0,70)}{270} \quad S = \rho \frac{0,70 (0,3)}{270}$$

$$S = \rho \frac{0,21}{270} \quad S = \rho \frac{0,21}{270} = \rho 0,00077 \quad S = 0.028$$

Hasil dari kesalahan standar ini (0,028) dijumlahkan dengan persentase kerabat untuk mendapatkan C baru: $0,70 + 0,028 = 0,73$. Dengan C yang baru ini sekali lagi dihitung waktu pisah dengan menggunakan rumus waktu pisah tadi (III.3).

$$W = \frac{\log. 0,73}{2 \log. 0,805} \quad W = \frac{-0,315}{2 \times -0,217} \quad W = \frac{0,315}{0,434}$$
$$W = 0,725$$

Dari hasil tersebut, untuk menghitung jangka kesalahan, maka waktu yang lama (822) dikurangi dengan waktu yang baru (725) = 97. Angka inilah yang harus ditambah dan dikurangi dengan waktu yang lama (822) untuk memperoleh usia atau waktu pisah kedua bahasa itu secara relatif.

Jadi dengan memperhitungkan angka dalam jangka kesalahan pada kesalahan standar (0,7 dari keadaan sebenarnya), maka hasilnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahasa Toba dan bahasa Mandailing merupakan bahasa tunggal pada 822 ± 97 tahun yang lalu.
- 2) Bahasa Toba dan bahasa Mandailing merupakan bahasa tunggal pada 919 - 725 tahun yang lalu.
- 3) Bahasa Toba dan bahasa Mandailing mulai berpisah dari suatu bahasa proto antara tahun 1087 Masehi - 1281 Masehi (dihitung dari tahun 2006).

Mengingat perpisahan itu tidak dapat dihitung dengan angka tahun secara absolut, maka dipergunakan ribuan atau millenium tahun atau satuan abad. Sehingga angka-angka di atas dapat dibaca: 9,19 - 7,25 abad yang lalu atau antara abad XI Masehi - XIII Masehi.

IV. Migrasi Puak-puak Batak Di Padang Lawas

IV.1. Legenda dan Fakta Historis Batak

Meskipun sudah banyak spekulasi berkaitan dengan kata Batak -baik yang berhubungan dengan sejarahnya, makna etimologisnya, maupun puak/etnisnya sendiri- namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang memuaskan tentang hal tersebut. Sumber sejarah tertua yang dapat dihubungkan dengan Batak adalah yang laporan yang dituliskan oleh Zhao Rugua/ Chao Jukua, seorang Inspektur Perdagangan Luar Negeri yang berkedudukan di Fujian/Fu Kien, pada pertengahan abad ke-13 M. Disebutkannya tentang salah satu daerah bawahan dari *San-fo-tsi* (Sriwijaya) yang bernama *Ba-ta* (Hirth dan Rockhill, 1966:35,62,66, dalam Andaya,2003:368). Penyebutan tentang Batak berikutnya berasal dari abad ke-16, yang bersumber dari pemberitaan Tome Pires -seorang juru tulis Portugis yang pernah tinggal di Malaka antara tahun 1512–1515. Dalam karyanya yang berjudul *Suma Oriental*, Pires menyebutkan keberadaan suatu kerajaan Bata, yang wilayahnya dibatasi oleh Kerajaan Pasai di satu sisi, dan Kerajaan Aru di sisi lain (Corteseo,1990:145).

Berkaitan dengan nama Batak penulis lokal (lihat Sangti,1978:26) mengaitkan kata Batak dengan daerah asal mereka, yakni *Bataha*. Nama suatu tempat di daerah Burma atau Siam, sebagai tempat asal etnis Batak sebelum berserak ke Kepulauan Nusantara. Lebih jauh Sangti menghubungkan nama Batak dengan nama suku bangsa *Bataq* di Provinsi Ilocos Utara, Pulau Luzon, Filipina.

Namun sampai sejauh ini pendapat Sangti tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah, sebab data pendukung baik yang sifatnya antropologis maupun kebahasaan yang dapat dijadikan bahan analog (jembatan penghubung) antara etnis Batak di Pulau Sumatera dengan penduduk suatu tempat di Burma atau Siam yang bernama *Bataha*, maupun suku bangsa *Bataq* di Provinsi

Ilocos Utara, Pulau Luzon, Filipina. Jadi untuk sementara waktu hingga ditemukannya data yang lebih sahih yang dapat dijadikan sebagai rujukan tentang asal mula nama serta daerah asal suku Batak ditemukan, maka pendapat itu hanya dapat dianggap sebagai dugaan belaka.

Dalam perspektif lain, Rita Kipp (Kipp,1996:27) menghubungkan kata *Batak* dengan fungsi mereka di masa lalu yang berasal dari kata *bhata* atau *bhrta* dalam bahasa Sanskerta yang berarti: prajurit, tentara bayaran, pejuang, orang sewaan, pelayan. Penyebutan Batak sebagai nama etnis adalah suatu hal yang jamak di banyak kelompok masyarakat pribumi di dunia. Dari sekian banyak kelompok masyarakat itu adalah orang-orang *Batek* di daerah Semenanjung Malaya, mereka mengartikankan kata tersebut (*Batek*) sebagai *manusia*. Meskipun secara leksikal kata *Batak* yang merujuk pada nama suku bangsa di Sumatera Utara (Indonesia) dengan kata *Batek* yang merujuk pada suatu etnis di daerah Semenanjung Malaya, adalah mirip, namun sayangnya tidak ditemukan keterkaitan antara kedua kata tersebut. Sebab, kata *Batek* secara linguistik digolongkan dalam rumpun bahasa-bahasa Austro-Asiatik, sedangkan kata *Batak* secara linguistik termasuk dalam rumpun bahasa-bahasa Austronesia (Andaya,2002:368).

IV.2. Legenda dan Fakta Historis Mandailing

Seperi halnya saudara-saudaranya di utara, hingga kini belum diperoleh keterangan yang jelas berkaitan dengan kata Mandailing, baik yang berhubungan dengan sejarah, makna etimologis, maupun puak/etnisnya sendiri. Sumber sejarah tertua yang mungkin dapat dihubungkan dengan kata Mandailing adalah yang termuat dalam buku Desawarnnana atau lebih populer dikenal sebagai Nagarakretagama karya Prapanca, pujangga keraton Majapahit, yang diselesaikannya pada 1365 M. Karya

tersebut sangat penting artinya tidak saja bagi telaah kesejarahan, namun terbukti juga menjadi data penting untuk studi etnografis serta geografis. Sebab di dalamnya disebutkan sejumlah nama tempat yang hingga kini masih dikenal. Hal penting lainnya adalah, ternyata nama-nama tempat itu juga menjadi nama diri (sebutan) suatu kelompok etnis, seperti Melayu dan Mandailing yang di dalam karya Prapanca itu disebut sebagai *Malayu* dan *Mandahiling*.

Banyak spekulasi bermunculan berkaitan dengan nama Mandailing, antara lain menyebutkan (Meuraxa, 1974:349) bahwa kata itu berasal dari bahasa Minangkabau, yakni *Mande Hilang* (Ibu Hilang). Lebih jauh lagi Meuraxa (1974:349) mengemukakan kemungkinan lainnya adalah dari kata *Munda Hilang* (Munda mengungsi), yang dikaitkannya dengan nama bangsa Munda di India yang mengungsi dari anak benua itu karena desakan bangsa Arya. Sekali lagi Meuraxa (1974:17) mengemukakan kemungkinan lainnya, bahwa kata itu dapat dihubungkan dengan *Mandalay*, nama suatu tempat di Myanmar (Burma). Sedangkan menurut salah satu sumber tutur setempat kata Mandailing dihubungkan dengan nama suatu kerajaan bernama *Mandala Holing*, yang kemudian berangsur berubah menjadi seperti sekarang penyebutannya.

Menurut sumber tutur Mandailing diceritakan bahwa nenek moyang salah satu marga besar di daerah itu yakni Lubis berasal dari tanah Bugis (Sulawesi Selatan). Sosok leluhur itu bernama Daeng Malela bergelar Namora Pande Bosi, yang -konon- bermigrasi ke daerah hulu Sungai Barumun sekitar abad ke-10 M. Sementara marga yang lain seperti Nasution menganggap leluhurnya berasal dari daerah Pagarruyung (Sumatera Barat) sedangkan marga Batubara menganggap leluhurnya berasal dari daerah Batubara-Tanjung Balai (daerah pantai timur Asahan) yang bermigrasi sekitar abad ke-14 M. Orang-orang bermarga Rangkuti

menganggap leluhurnya datang dari daerah Rondeng (Aceh Selatan).

V.3. Migrasi Batak ke Padang Lawas: Fakta dan Kemungkinannya

Satu hal menarik berkaitan dengan angka-angka hasil analisis glotokronologi di atas (XI Masehi – XIII Masehi) adalah adanya kesamaan rentang waktu relatif dengan data tertulis yang berasal dari situs Padang Lawas. Data tertulis tertua -hingga kini- yang berasal dari situs Padang Lawas adalah inskripsi pada lapik arca Lokanatha dari Gunungtua yang kini disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Pada lapik arca logam tersebut selain dituliskan nama pembuatnya yakni Suryya, juga dituliskan angka tahun 945 Çaka (1023 M). Data tertulis lain yang ditemukan di situs Padang Lawas adalah lembaran emas berukuran 14 cm x 5 cm dari situs Candi Sangkilon. Selain menyebutkan mantra-mantra dalam agama Buddha, dicantumkan pula angka tahun 1314 Çaka (1392 M). Prasasti-prasasti lain dari Padang Lawas meskipun tidak diketahui angka tahunnya secara tepat, disebabkan kondisinya yang aus sehingga bagian berangka tahun tidak terbaca atau memang tidak mencantumkannya, namun secara paleografis dapat ditentukan pertanggalannya secara relatif. Prasasti-prasasti tersebut adalah: Prasasti Batu Gana I (ditemukan di areal Candi Bahal I), dari bentuk aksaranya diperkirakan berasal dari abad XII – XIV M, Prasasti Tandihat II (ditemukan di areal Candi Tandihat II) dari bentuk aksaranya diperkirakan berasal dari abad XII – XIV M (Margaretha et.al., 2003: 5 –12).

Selain prasasti-prasasti yang secara kontekstual dapat dihubungkan dengan keberadaan bangunan-bangunan monumental (percandian atau biara dalam bahasa setempat), di Padang Lawas, ditemukan pula prasasti-prasasti yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa Batak tidak sekonteks dengan biara-biara Padang

Lawas. Prasasti-prasasti itu ditemukan sekonteks dengan beberapa makam tua di Lobu Dolok dan Padang Bujur. Namun ada satu prasasti yang ditulis dengan aksara Batak ditemukan sekonteks dengan bangunan biara (per candian), yakni yang ditemukan di Candi Manggis. Unsur bahasa Batak ditemukan pula pada prasasti yang berasal dari Biara Sitopayan. Hal itu diwakili oleh munculnya satu kata bahasa tersebut (*bagas*) di antara sejumlah kata bahasa Melayu Kuna dalam pertulisan Sitopayan I.

Ditemukannya sejumlah prasasti di Padang Lawas yang mengandung anasir-anasir berciri kebatakan adalah salah satu bukti kuat bahwa pada masa itu orang-orang yang berbahasa proto-Toba-Mandailing -yang berangsur berubah secara linguistik setidaknya sejak abad XI Masehi- telah ikut andil dalam membangun peradaban yang dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha.

Jika memang seperti itu keadaannya di masa lalu, maka patut dipertimbangkan pernyataan dalam tarombo-tarombo Toba berkaitan dengan migrasi mereka ke arah selatan yang seringkali menarik rentang masa proses perpindahan itu pada pertengahan/akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 M. Dalam tarombo Toba disebutkan bahwa beberapa marga besar di daerah Tapanuli Selatan seperti Harahap dan Siregar yang dominan di daerah Angkola dan Padang Lawas, maupun Lubis dan Nasution yang dominan di daerah Mandailing, bermigrasi ke selatan sedini akhir abad ke-15 M.

Sebab-sebab perpindahan itu berbeda antara marga-marga tersebut (Sangti, 1977:41–43), seperti marga Harahap mereka mula-mula bergeser ke Nagasaribu dikarenakan desakan keturunan Sibagotni Pohan yang lebih cepat berbiak. Peristiwa itu terjadi pada sundut ke-7 (1485–1513). Sedangkan marga Siregar mula-mula *marserak* (menyebarkan) dari Muara ke Lobu Siregar disebabkan desakan keturunan Sibagotni Pohan. Tidak

lama setelah itu mereka bergerak lagi menuju ke Pangaribuan (daerah Silindung). Setelah berbiak di tempat terakhir tersebut sebagian bermigrasi ke Angkola (Sipirok) dan bermukim di sana. Peristiwa itu terjadi pada sundut ke-10/ke-11 (1575–1605). Marga besar lain di daerah Padang Lawas (daerah hulu Sungai Batang Pane dan Barumon) adalah Dalimunte yang datang ke daerah ini sejak sundut ke-5 (1425–1455). Sementara marga Hasibuan datang ke daerah ini pada sundut ke-6 (1455–1485). Sedangkan perpindahan marga Lubis yang terjadi sejak sundut ke-9/10 (1545–1575) ke daerah selatan juga disebabkan oleh desakan keturunan Sibagotni Pohan yang berbiak lebih banyak.

Hasil penghitungan waktu pisah kedua bahasa tersebut tampaknya sejalan dengan hipotesis Andaya bahwa terjadinya migrasi awal etnis Batak -yang berbahasa proto-Toba-Mandailing- ke daerah selatan Danau Toba dapat dirunut sejak ramainya permintaan Sriwijaya terhadap produksi kamper/kapur barus (*Dryobalanops aromatica*) dan kemenyan (*Styrax benzoin*) sejak abad ke-8 M untuk dijual lagi pada pembeli dari luar (Andaya, 2002:385). Merujuk pada sumber tradisi Melayu Kampar, daerah Rao (termasuk pula daerah di timurnya) dahulu adalah daerah orang-orang Batak, namun kemudian dikuasai oleh orang-orang dari Minangkabau. Keterangan itu ternyata diperkuat pula oleh adanya sebuah batu prasasti bertuliskan aksara Batak yang dilihat oleh seorang Belanda pada abad ke-19 M di daerah dekat Kota Gelugur di tepian Sungai Kampar (Andaya, 2002:385).

Beragam mata dagangan eksklusif (emas, kamper atau kapur barus, kemenyan, dan hasil bumi lain) diperdagangkan di sejumlah bandar yang berada di bawah perlindungan Kerajaan Sriwijaya. Pengangkutannya melalui lembah-lembah sungai dan aliran sungai besar dari daerah penghasilnya yang berada di pedalaman Sumatera Utara tempat etnis Batak tinggal. Jalur pasokan dari sumber-sumber produksi mata dagangan itu ke pusat

Kerajaan Sriwijaya adalah melalui Padang Lawas (yang kala itu berfungsi sebagai tempat pengumpulan dari daerah pedalaman) via Sipirok, lalu menuruni lembah Batang Toru, hingga mencapai pantai Samudera Hindia yang kemudian dibawa ke arah utara menuju Barus sebagai pelabuhan utama di wilayah pantai barat Sumatera pada masanya (Andaya, 2002:377).

Sementara keterangan dalam *tarombo-tarombo* Batak berkaitan dengan *marserak* etnis ini ke selatan yang dirunut sedini pertengahan abad ke-15 hingga awal abad ke-16 dapat dihubungkan dengan sebab-sebab lain. Migrasi (*marserak*) berikut dari puak-puak Batak terjadi sekitar abad ke-15 M ketika permintaan terhadap lada hitam (*Piper nigrum*) yang digunakan untuk membumbui dan mengawetkan makanan oleh Cina semakin meningkat. Menjelang abad ke-17 Cina mengimpor lada hitam sebanyak 10.000 hingga 12.000 pikul (1 pikul=60,5 kg) setiap tahunnya. Selain Cina, Eropa pun turut meramaikan permintaan terhadap komoditas ini. Menjelang tahun 1500 mereka mengimpor setidaknya 1200 ton tiap tahun. Termotivasi oleh tingginya permintaan terhadap komoditas ini, kerajaan-kerajaan di Sumatera kala itu (Aceh, Palembang, dan Jambi) meningkatkan jumlah produksi ladanya, dengan membuka areal tanam baru. Kondisi tersebut menjadi pendorong terjadinya migrasi puak-puak Batak dari dataran tinggi ke wilayah kerajaan-kerajaan itu untuk membuka lahan dan menanam lada hitam (Andaya, 2002:387–388).

Stimulus ekonomis yang dipicu oleh tingginya permintaan sejumlah mata dagangan eksklusif yang dihasilkan oleh hutan-hutan Sumatera bagian utara telah mendorong terjadinya migrasi puak-puak berbahasa proto-Toba-Mandailing ke daerah selatan Danau Toba. Seiring berjalannya waktu, puak-puak tersebut yang dulunya berbahasa ibu yang sama sedikit demi sedikit mengalami perbedaan secara linguistik, dan secara pasti pula membentuk

kesadaran jati diri baru kepada puak-puak yang telah bermigrasi ke daerah baru di selatan Danau Toba. Meskipun secara garis besar terdapat ciri-ciri umum yang mereka miliki bersama, namun pada kenyataannya kelompok-kelompok yang kini mendiami daerah di sekitar Padang Lawas lebih suka bila mereka tidak disebut sama -sebagai orang 'Batak'- dengan kelompok-kelompok yang masih mendiami daerah di sekitar Danau Toba. Namun, hal itu tidak akan diulas lebih jauh lagi pada kesempatan ini. Mungkin kajian-kajian yang sifatnya antropologis atau etnografis akan dapat mengungkap akar dari hal tersebut.

V. Penutup

Hasil perhitungan waktu pisah antara bahasa Toba dan Mandailing menunjukkan secara relatif kedua bahasa tersebut merupakan bahasa tunggal pada 822 ± 97 tahun yang lalu, atau dengan kalimat lain bahasa Toba dan Mandailing merupakan bahasa tunggal pada 919 - 725 tahun yang lalu (angka-angka di atas dapat pula dibaca: 9,19 - 7,25 abad yang lalu atau antara abad XI Masehi - XIII Masehi), sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Toba dan bahasa Mandailing mulai berpisah dari suatu bahasa proto antara tahun 1087 Masehi - 1281 Masehi (dihitung dari tahun 2006).

Angka-angka itu ternyata bersesuaian dengan pertanggalan mutlak berdasarkan angka tahun pada prasasti serta pertanggalan relatif berdasarkan gaya aksara dalam sejumlah inskripsi dari situs Padang Lawas yang merujuk pada rentang masa antara abad ke-10 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Masa itu adalah awal puak-puak penghuni daerah sekitar danau Toba bermigrasi ke daerah selatan oleh rangsangan yang dimunculkan permintaan sejumlah mata dagangan penting yang dihasilkan di hutan-hutan daerah sekitar Danau Toba seperti kemenyan dan kapur barus.

Masa yang merujuk pada *tarombo-tarombo* berkaitan dengan migrasi puak-puak Batak, merupakan angka tahun relatif yang

menunjukkan gelombang berikut dari proses tersebut yang terjadi jauh kemudian. *Marsarak* (persebaran) kedua ini didorong oleh permintaan terhadap lada hitam (*Piper nigrum*) oleh Cina yang semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian linguistik dapat dijadikan sebagai salah satu ilmu bantu bagi arkeologi dalam memecahkan masalah-masalah arkeologi. * * *

Daftar Pustaka

- Andaya, Leonard Y., 2002. "The Trans- Sumatra Trade and The Ethnicization of The 'Batak" dalam *Bijdragen tot de Taal, Land an Volkenkunde*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV)
- Ehret, Christopher. "Linguistic Evidence and Its Correlation with Archaeology", dalam *World Archaeology Vol. 8 No. 1 June 1976:16*
- Meuraxa, Dada, 1974. *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. Medan: Fa. Hasmar
- Lubis, Mhd. Arbain, 1993. *Sejarah Marga-Marga Asli di Tanah Mandailing*
- Gonda, J. 1991. "Proses Peminjaman di Asia Tenggara", dalam: *Masa Lampau Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Keraf, Gorys, 1984. *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: Gramedia
- Montana, Suwedi. 1989. "Studi Tentang Arkeolinguistik, Lingkup dan Terapannya", dalam: *Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) V*. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
- Kipp, Rita Smith, 1996. *Dissociated Identities, Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*. Ann Arbor: University of Michigan Press
- Prasodjo, Tjahjono. 1998. "Epigrafi Indonesia: Peran, Kedudukan, dan Pengembangannya", dalam *Berkala Arkeologi Tahun XVIII: Manfaat Kajian Prasasti Dalam Penelitian Arkeologi dan Sejarah*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta
- Sangti, Batara, 1977. *Sejarah Batak*. Balige: Karl Sianipar

Penerapan Penelitian Perkotaan dalam Arkeologi: Prospek dan Pengembangannya

Oleh: Eka Asih Putrina Taim,.M.Si

Latar Belakang

Penelitian Perkotaan dalam arkeologi merupakan salah satu bagian dari kajian arkeologi permukiman. Dalam penelitian permukiman pada skala perkotaan biasanya dilakukan pada kota-kota kuna masa klasik ataupun kolonial/Islam. Yang sebagian besar kota-kota tersebut masih dimukimi dan sering terjadi perubahan oleh pembangunan fisik kota yang baru. Selama ini penelitian perkotaan dalam arkeologi lebih sering menekankan pada aspek fisiknya melalui penelusuran pada sumber sejarah, peta-peta kuna dan foto udara yang semua itu merupakan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survai dan ekskavasi. Akan tetapi pada beberapa hal, ekskavasi sukar dilaksanakan pada kota-kota tua tertentu yang kota tersebut masih ramai dihuni oleh pemukimnya. Sebagai alternatifnya, kegiatan survai yang tepat merupakan salah satu andalannya alternatifnya. Pada tahap survai, metode arkeologi saja tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk mengumpulkan data dan mau tidak mau, kita pun meminjam beberapa metode survai perkotaan dari disiplin ilmu lain di antaranya ilmu antropologi terutama antropologi perkotaan. Makalah ini membahas beberapa metode penelitian antropologi perkotaan yang dapat di adaptasi dalam penelitian arkeologi.

Perkotaan

Perkotaan merupakan salah satu bentuk makro dari permukiman. Kota yang dalam ilmu antropologi dan sosiologi memiliki berbagai definisi mengenainya dan sebagian besar dapat dikategorikan sebagai :

1. masyarakat dan kumpulan kegiatan masyarakat
2. sebuah populasi yang melakukan berbagai pertukaran barang dan jasa baik untuk makanan, barang yang jarang ditemui dan berbagai komoditi-komoditi lainnya.
3. memiliki organisasi politik yang memungkinkan penduduknya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara kolektif diatur oleh suatu hukum yang berlaku.
4. memiliki organisasi sosial dan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan akan keberadaannya (*existence*) dan berbagai hal yang berhubungan dengannya, Pengaturan religi, pendidikan, keluarga, kegiatan kesejahteraan, kesehatan, dan hiburan.
5. kebutuhan akan organisasi sosial (John Zirjazaki dalam Uka Tjandrasasamita, 1991).

Kemudian dari berbagai definisi tersebut, Peter J.M. Nass menarik lima pokok penting sebagai definisi sebuah kota (1986) yaitu:

1. sebuah lingkungan materi yang sengaja dibuat oleh manusia
2. sebuah pusat produksi
3. sebuah komunitas sosial
4. sebuah komunitas kebudayaan
5. sebuah masyarakat yang terkontrol/diatur oleh suatu aturan.

Berdasarkan sejarahnya, bentuk-bentuk kota bermacam-macam dan masing-masing itu memiliki dinamikanya sendiri. Weber dalam studi sejarah kota menyusun 5 tipologi kota:

11. Penerapan Penelitian Perkotaan dalam Arkeologi

1. kota-kota kuna di Timur Tengah. Dahulunya adalah kota pusat kerajaan dengan para pegawainya , imam, tentara serta budak biasanya dikelilingi oleh sebuah benteng kota. Penduduk biasa dan orang asing umumnya tinggal diluar benteng. Warga kota dalam arti sebenarnya belum ada, penduduk masih terbagi-bagi berdasarkan suku dan daerah asal. Pembagian yang ada hanyalah berdasarkan pekerja bebas dan pekerja budak.
2. kota-kota kuna di Asia, keadaannya mirip dengan kota kuna di Timur Tengah
3. kota - kota Eropa abad pertengahan. Muncul dan berkembang setelah penduduknya mendapat hak kekotaan dari pera bangsawan penguasa. Kota seperti pulau dalam lautan feodalisme; penduduknya adalah kaum bebas yang bekerja bertukang dan berdagang sehingga kemudian muncul kaum proletariat
4. kota Eropa dalam masa sejarah modern bercirikan keterbukaan ekonomi. Dari fungsi untuk melayani daerah sekitar akhirnya berfungsi sebagai pelayanan nasional. Penduduk berkembang pesat seiring dengan perkembangan mobilitas.
5. kota modern merupakan kota metropolitan yang kemudian dapat berkembang menjadi megapolitan.

Definisi-definisi di atas sebagian besar mengacu kepada keadaan dan kondisi kota/perkotaan modern sedangkan dalam ilmu arkeologi, kota diteliti dalam ruang lingkup kota atau perkotaan kuna. Bagaimana sebuah kota tumbuh, rekonstruksi dan tata letak kota kuna serta segala hal/aspek (sosial budaya ekonomi dan hukum /penguasa) yang mendukung dan terjadi di dalamnya.

Menurut Uka Tjandrasasmita, hal-hal yang mendorong munculnya kota-kota kuna adalah:

1. lingkungan alam yang mendukung
2. kumpulan beberapa populasi
3. perkembangan teknologi dan ekonomi yang maju

4. organisasi sosial yang telah berkembang
5. kekuasaan dan kekuatan politik dan sosial yang mapan

Penelitian Perkotaan

Pendekatan Arkeologi dalam penelitian perkotaan yang dilakukan terdiri.

1. pengumpulan data primer dan sekunder, terdiri dari berbagai data sejarah meliputi naskah lokal dan wawancara, sumber asing, dst
2. pengumpulan data permukaan di lapangan (survai)
3. pengumpulan data pictorial, termasuk peta-peta kuna dan berbagai rekaman foto dan foto udara
4. setelah semua data telah terkumpul dan dianalisa, dilakukan pengecekan data di lapangan dan membuat beberapa studi perbandingan antara beberapa kota kuna atau bersejarah.
5. pada tahap berikutnya, untuk mengetahui segala aspek yang mendukung dalam kehidupan perkotaan kuna maka diperlukan bantuan berbagai disiplin lain dalam menafsirkannya. (Uka Tjandrasasamita, 1991).

Tahap terakhir inilah kita (arkeologi) memerlukan atau menerapkan pendekatan dari disiplin ilmu lain. Kadangkala atau lebih sering sebuah kota kuna di Indonesia adalah wilayah yang umumnya merupakan pemukiman yang cukup padat cenderung kumuh dan lebih sering/ lebih banyak kaum pendatang (urban). Beberapa bangunan kuna yang dahulu cukup penting telah berubah fungsi bahkan berubah bentuk.

Pendekatan sosiologi/antropologi seperti yang dilakukan oleh sosiolog Bouwman adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. menafsirkan struktur-struktur kota serta perubahannya dari segi sejarah budaya. Kedua-duanya itu mewujudkan pola budaya yang

terus saja berubah. Mumford dalam bukunya “*Culture of The Citeis*” menyebutkan, kota yang dijumpai dalam sejarah adalah titik maksimum dari pengumpulan kekuasaan dan kebudayaan suatu masyarakat. Masyarakat kota serta bangunan-bangunannya adalah endapan-endapan dari pola-pola budayanya.

2. mencari kriteria sosiologi bagi kehidupan kota sebagai penjumlahan dari banyak relasi antar manusiawi. Kekuasaan kota menurut Wirth terletak pada gaya hidupnya yang disebut urbanisme. Di dalamnya terkandung sifat-sifat serba bergerak, kontak-kontak yang dangkal dan anonimitas.

Dalam Ilmu Antropologi, terdapat beberapa teori dan untuk mengetahui bagaimana pola tata letak permukiman yang juga dapat diterapkan dalam permukiman di perkotaan kuna. Salah satu pendekatan adalah melalui penelusuran hubungan kekerabatan. Siapa penduduk pertamanya, siapa saja yang bermukim di wilayah tersebut, ada berapa kelompok keluarga/keturunan, siapa yang merupakan pemukim awal dan siapa yang pendatang, bagaimana pola tataletak rumahnya : seperti letak rumah kakek, paman, bibi, adik, dan anak, Dapat juga ditelusuri dari cluster-cluster permukiman dalam perkotaan melalui jenis pekerjaannya, daerah asal, dan agama. Tentu saja semua data yang menyeluruh dapat dikumpulkan bila ditunjang dengan perekaman yang lengkap dan strategi wawancara yang tepat.

Penutup

Aplikasi beberapa teori dari berbagai ilmu dalam penelitian perkotaan sangat perlu dilakukan karena kota itu sendiri sangat kompleks dan memiliki berbagai aspek serta sistem yang mau tidak mau harus ditelaah. Dengan demikian kita pun mendapat gambaran kota dan kehidupannya selengkap mungkin.

Daftar Pustaka

- Bouwman, P.J.,1968 “*Fundamentele sociologie*”, Standaard Uitgeverij, Antwerpen / Utrecht, p.116-119
- Malinowski, B., 1944, *A scientific theory of culture*, University of North Caroline Press.
- Nas , Peter J.M. (ed), 1986, “ *The Indonesia City Studies in Urban Development and Planning*” Foris Publications V.K.I.
- Sjoberg, Gideon, 1985, “ *The Preindustrial City Past and Present*” A Free Press Paperback. The Free Press New York , 1985
- Tjandrasasmita, Uka.,1991, *The Concept of Ancient Cities in Southeast Asia and Their Protection*, SPAFA Training Course on Conservation of Ancient Cities and/or Settlements, Banten , Borobudur, Trowulan, Jakarta.
- Weber, Max, 1966: “*The City*”, The Free Press, New York - London.
- Wirth, Louis,1978, “*Urbanisme as Way of Life*” American Journal of Sociology XLIV (Juhj, p.1-24)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
Jalan Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12510 - Indonesia
Telp. +62 21 7988171 / 7988131
Fax. +62 21 7988187
Homepage: www.indoarchaeology.com
E-mail: arken3@arken.com
atik_arken@yahoo.com

Perpustakaan
Jenderal